



Katalog BPS : 7203002

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Financial Statistics of Province Government

2014-2017



BADAN PUSAT STATISTIK

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Financial Statistics of Province Government

2014-2017



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI 2014-2017

Financial Statistics of Province Government 2014-2017

ISSN. 0126.7906

No. Publikasi / Publication Number : 06310.1707

Katalog / Catalog : 7203002

Ukuran Buku / Book Size : 29,7 Cm x 21 Cm

Jumlah Halaman / Number of Pages : vi + 149 halaman / pages

Naskah / Manuscript :

Subdirektorat Statistik Keuangan

Subdirectorate of Financial Statistics

Gambar Kulit / Cover design :

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Subdirectorate of Statistical Compilation and Publication

Diterbitkan oleh / Published by :

Badan Pusat Statistik

BPS–Statistics Indonesia

Dicetak oleh / Printed by :

6 UXUb'Di gUhGHJHgh

ÓÚÙ. Úceææ ÁQå[} ^•ãe

8]UfUb['a Yb[i a i a _Ubža Yb[ca i b]_Ug]_UbžXUb#UH['a Yb[[UbXU_Ub'gYVU[]Ub

UH['gYi fi \ 'jg]Vi _i 'jb]i bh[_hi 'Ub''_ca Yfg]U'UbdoU]n]b'hYfhi 'jg'XUf]6 UXUb

Di gUhGHJHgh

Ú'[@æææ Á{ Á{ }[' } &^ææædææ'cææ{ { ' } ææææææ' Á{] ^ Á{ æææ' Á{ Á{ Á{ Á{ [' }

{'Á{ { { ^!&æææ' ' }[•^• Á{ æQ'ç{ ^' { æ•ç } Á{ [{ ÁÓÚÙËUceææ ÁQå[} ^•ãe

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi merupakan publikasi tahunan yang diolah dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Kantor Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang diperoleh melalui Survei Keuangan Pemerintah Daerah.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) Pemerintah Provinsi, untuk periode tahun 2014-2016. Selain data realisasi APBD, publikasi ini memuat pula data tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga publikasi ini dapat disajikan. Kritik dan saran yang membangun dari pengguna data sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Jakarta, Desember 2017
Kepala Badan Pusat Statistik,



Dr. Suhariyanto

PREFACE

Provincial Government Financial Statistics is an annual publication that compiled and published by BPS-Statistics Indonesia. The financial data are obtained from the office of the provincial government through the Financial Survey conducted throughout Indonesia.

The data and information presented in this publication contains data on the realization of Revenue and Expenditure (Budget realization) of the provincial government, for the years of 2014-2016. In addition, this publication also contains data on State (Budget) Revenue and Expenditure in 2017.

We are grateful and thanks to all those who have given their support which make this publication be realized. Constructive suggestions from the users are expected for further improvement for the next issues.

Jakarta, December 2017

BPS-STATISTICS INDONESIA



*Dr. Suhariyanto
Chief Statistician*

DAFTAR ISI/CONTENTS

	<u>HALAMAN</u>
	<u>PAGE</u>
Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	iii
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	v
I. Penjelasan Umum/ <i>General Explanation</i>	1
II. Uraian Ringkas/ <i>Brief Description</i>	19

TABEL

TABLE

1. Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (juta rupiah), 2014-2017/ <i>Actual Receipt and Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia (million rupiahs), 2014-2017</i>	37
2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2014-2017/ <i>Actual Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Receipt (thousand rupiahs), 2014-2017</i>	43
3A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (ribu rupiah), 2014-2017/ <i>Actual Revenue of Provincial Government Throughout Indonesia (thousand rupiahs), 2014-2017</i>	81
3B. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (ribu rupiah), 2014-2017/ <i>Actual Financing Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia (thousand rupiahs), 2014-2017</i>	93
4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2014-2017/ <i>Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure (thousand rupiahs) 2014-2017</i>	97

DAFTAR ISI/CONTENTS

<u>TABEL</u> TABLE	<u>HALAMAN</u> PAGE
Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 5A. (ribu rupiah), 2014-2017 / <i>Actual Indirect Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia (thousand rupiahs), 2014-2017</i>	135
Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (ribu rupiah), 2014-2017 / <i>Actual Direct Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia (thousand rupiahs), 2014-2017</i>	144
Realisasi Belanja Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (ribu rupiah), 2014-2017/ <i>Actual Financing Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia (thousand rupiahs), 2014-2017</i>	148

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi secara umum memuat data tentang Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia. Periode yang dicakup adalah empat tahun anggaran, yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2017.

Beberapa indikator/informasi penting yang dimuat dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi ini, antara lain:

- a. Informasi tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi.
- b. Informasi tentang potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing provinsi.
- c. Informasi untuk menentukan jenis dan besaran bantuan bagi masing-masing provinsi, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai potensi dan kemampuan dari

I. GENERAL EXPLANATION

I.1. Preliminary

Provincial Government Finance Statistics publication covers data on Receipt and Expenditure of provincial governments all around Indonesia. The time period is for the four fiscal years, i.e. from 2014 to 2017.

Some indicators/important information covered in the publication of Provincial Government Finance Statistics, among others are:

- a. Information on actual revenue and expenditure of Provincial Government.*
- b. Information on the potential and the contribution of fund sources in each province.*
- c. Information to determine the type and amount of grant/relief fund for each province, both the Special Allocation Fund (DAK) and the General Allocation Fund (DAU).*

In other words, the Provincial Government Finance Statistics publication can be used as an indicator to assess the potential and capabilities of each provinces, in attempting to

Masing-masing provinsi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

improve the welfare of local communities in its region.

I.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kantor Gubernur masing-masing provinsi yang dikumpulkan melalui survei Keuangan Daerah dengan menggunakan Daftar K-1 dan APBD-1.

I.2. Scope and Data Collection Method

Provincial Government Finance Statistics data is obtained from Regional Finance and Asset Management Agency of the Governor office all over Indonesia which is collected through Financial Survey by using the questioner K-1 and APBD-1.

I.3. Konsep dan Definisi

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi adalah realisasi/perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun anggaran.

1.3. Concept and Definition

***Actual Receipt and Expenditure of Provincial Government** is the realization/provincial budget calculations for every fiscal year.*

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain - lain Pendapatan yang Sah

Revenue

Revenue consists of:

- a. *Original Local Government Revenue*
- b. *Balanced Budget*
- c. *Other Legal Revenue*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

***Original Local Government Revenue** is revenue that withheld based on local regulations in accordance with the*

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta,

legislation, for the purposes of financing their activities. PAD consists of local taxes, retributions, income of regional government corporate and management of separated regional government wealth and other local government revenue.

Local Taxes is revenue that levied based on the local laws and regulations. Local taxes can be divided into two categories: 1) local tax that set up by local rule, and 2) state tax that are managed and used by the local government. Local tax revenue consists of motor vehicle tax, title transfer tax, motor vehicle fuel tax, and others.

Retributions is a levy taken in accordance with any services or facilities provided by the local government directly to taxpayers. Retributions include health care, testing of motor vehicles, the replacement cost of printing maps,

pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek, dan lain-lain.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan / atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

fishing vessel testing, the use of regional assets, wholesale or retail markets, the sale of local production, the land use designation permits, licenses route of public transport and other.

Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Regional Government Wealth is revenue in the form of income of regional government corporate and separated regional government wealth which consists of the Regional Water Company's earnings, the profit share of bank, the profit share of non-banking financial institutions, the other locally-owned company's profits, and the return on equity/investment to a third party.

Other Original Local Government Revenue is the revenue of local government that includes the sale of regional assets that can not be separated, giro services, interest income and commissions, discounts or other forms as a result of the sale and / or supply of goods and/or services by region.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup **kesenjangan fiscal** (*fiscal gap*)

Balanced Budget is the fund coming from the state budget that allocated to regions to fund their needs in the context of decentralization. Balanced budget consists of Tax share/Non Tax share, General Allocation Fund (DAU), and the Special Allocation Fund (DAK).

Tax share consists of land and building tax (PBB), customs of land and buildings right (BPHTB), income tax of Article 25 and Article 29, and Article 21 of the Personal Income Tax, and others.

Non-Tax Share consist of dues of utilization right of forest (HPH), provision of forest resources (PSDH), land titling state, landrent, dues of exploration/exploitation/royalties, levies on fishery enterprise and result of fishery, mining oil/gas nature result, and others.

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of fund from the central government to local government that is intended to reduce the fiscal gap

dan **pemerataan** kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu **kemandirian** pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri pendapatan hibah; dana darurat

across regions and the equalization of fiscal capacity in order to support the independence of local governments in carrying out its functions and duties to serve the public.

Special allocation fund (DAK) is a fund set up to the region to meet specific need. There are three criterias for special need as set out in the legislation, namely:

- *The need can not be calculated by using the formula of the general allocation fund*
- *The need is a commitment or a national priority*
- *The need is to finance reforestation and afforestation of the region*

Thus DAK is basically a specific transfer for the purposes that have been outlined.

Other Legal Revenue is other income that coming from the central government and or from the central agencies, as well as from other local government. Other revenue comprises; grants; emergency fund

yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; bantuan dana kontijensi/penyeimbang/penyesuaian dari pemerintah; bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil

which is fund of the state budget allocated to areas get a national disaster, extraordinary experiencing a national disaster, extraordinary events and/or solvency crisis; tax share from provincial and other local governments; contingency funds/balancing/adjustment from government; financial assistance from provincial and other local governments, and other legal income

Local Government Expenditure

Local Government Expenditure consists of:

- 1. Indirect Expenditure*
- 2. Direct Expenditure*

***Indirect Expenditure** is part of personnel expenditure, interest expenditure, subsidies expenditure, grant expenditure, social assistance expenditure, sharing fund expenditure, financial assistance expenditure and unpredicted expenditure. Those items are not directly related to the implementation of programs and activities.*

***Indirect Personnel Expenditure** is a compensation in the form of salaries and benefits, and other income provided to civil servants*

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

based on legislation. Include here are representations and benefits for head and the members of parliament, salaries and benefits of regional head and deputy head of the region, as well as other income that stipulated under law budgeted.

***Interest Expenditure** is expenditure used to pay debt interest that calculated based on the principal outstanding under the short term, medium term and long term agreement.*

***Subsidies Expenditure** is expenditure that has been budgeted and used to support the cost of production to the certain company/organisation, so that the selling price of the goods/services produced can be affordable. The intended company/agency must be providing products or services for public/society needs.*

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga / organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah

Grant Expenditure is expenditure that has been setting out to give to other party as a grant, both in form of money, goods and or services. The grant can be given to the central government, other local governments, village government, regional corporate/state/ enterprise, agency/institution/ organization, or community group/ individual.

Social Assistance Expenditure is expenditure that is budgeted to provide assistance to civil society organizations, political parties and others with the aim to improve the welfare of the community.

Social Assistance to Community Organizations is the provision of assistance to community organizations for social purposes. This assistance done selectively and has clarity in its use.

Sharing Fund Expenditure to Provincial/District/City and Village Government is expenditure that has been budgeted as sharing fund which is derived from provincial revenue, and given to district/city, village, or a particular local government revenue

daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.

that is given to other local governments in accordance with law.

This expenditure consists of:

- *Tax shares expenditure to the provincial government*
- *Local tax shares expenditure to the district / city*
- *Local tax shares expenditure to the village government*
- *Local retribution shares to the district / city*
- *Local retribution shares to village government*

Financial Assistance Expenditure to Provincial/District/City and Village Government is a general or specific assistance from the provincial government to the district / city, village government, or other local governments for the purpose of equalizing and increasing the financial capability. General financial assistance is the assistance from the local government where the use and the management of fund delivered is done by the recipient government.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari:

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya
- Bantuan keuangan kepada partai politik

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait

Specific financial assistance is the assistance where the used and the management of fund is directed by the donor government.

Financial Assistance consists of:

- *Financial assistance to the provincial government*
- *Financial assistance to district / city government*
- *Financial assistance to the village government*
- *Financial assistance to local government/other village government*
- *Financial assistance to Political Party*

Unpredicted Expenditure is expenses used for the activity that is unusual or unexpected such as natural disaster and social disaster, including refund of the excess revenue from previous years.

Direct Expenditure is a part of personnel expenditure, goods and services expenditure, and capital expenditure, that are budgeted directly related to the implementation of programs and activities

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan, pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

that are budgeted directly related to the implementation of programs and activities.

Direct Personnel Expenditure is expenses used for honorarium/ wages, overtime and other expenses to increase employee motivation and quality in implementing government programs and activities.

Goods and Services Expenditure is expenses used for purchasing/procurement of goods that worth less than a year (non durable goods), and or the use of services in carrying out the programs and activities of the local government.

Purchasing/procurement of the goods and services among other are for non durable goods, materials, office services, insurance premiums, vehicle maintenance, printing and copying, building rent, vehicle rent, heavy equipment rent, leasing of office supplies and equipment, food and beverages, uniforms, wearpack, official journey, travel duty, returning officers and other goods and services

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan dan pemeliharaan pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, alat rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, peralatan pemancar, alat-alat kedokteran dan kesehatan, alat-alat laboratorium, alat peraga/praktek sekolah, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, pengelolaan sampah, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, pengadaan BLUD dan JKN serta persenjataan/ keamanan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Capital Expenditure is expenses used for purchasing/procurement of a tangible fixed asset that worth more than a year (durable goods). The establishment of these assets include provision of land, heavy equipment, transportation equipment, workshop tools, agricultural processing and maintenance equipment, equipment and office supplies, computers, household appliance, studio equipment, communication tools, measuring tools, transmitting equipment, medical equipment, laboratory equipment, school practice tools, construction of roads, bridges, water installations, street lighting, parking area and urban forests, electric and telephone installations, waste management, buildings, books/literature, arts, animal procurement/livestock and plants, procurement of BLUD and JKN as well as weapons/security.

Local Government Financing is any revenue that needs to be paid back and /or expenditure that will be readmitted, both in the current fiscal year and in the next fiscal years. Net financing is the difference between financing receipt and financing expenditure.

Jumlah pemberian neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pemberian, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pemberian daerah terdiri dari:

1. Penerimaan pemberian daerah ;
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - b. Transfer dari dana cadangan
 - c. Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - d. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
2. Pengeluaran pemberian daerah ;
 - a. Transfer ke dana cadangan
 - b. Penyertaan modal
 - c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
 - d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pemberian dikurangi dengan pos pengeluaran pemberian, pada periode anggaran tahun yang lalu.

Total net financing should be able to cover the budget deficit, on the other way around budget surplus would be allocated to finance expenses, whether for payment of principal, as well as for investment or the creation of a reserved fund.

Local government financing consists of:

- 1. Local government financing receipt;*
 - a. Last fiscal year budget surplus*
 - b. Transfer from reserved fund*
 - c. Receipt from loans and bonds*
 - d. Income of separated selling assets*
- 2. Local government financing expenditure;*
 - a. Transfer to reserved fund*
 - b. Equity*
 - c. Principal payment of debt*
 - d. Current fiscal year budget surplus*

Last Fiscal Year Budget Surplus is last fiscal year surplus/deficit plus the financing receipt less financing expenditure.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat

Reserved Fund Disbursement is revenue derived from the disbursement of the reserve fund, i.e from reserved fund account to general cash account along the current fiscal year.

Income of Separated Property Sales Results is the selling of government assets through third party, or the income of local government divestment of equity.

Local Government Revenue from Loan is revenue from the loans, including the issuance of local bonds that will be issued in the current fiscal year.

Revenue from Lending is all revenue obtained from lending to the central government and/or to other local government.

Establishment of Reserved Fund is expenditure to establish a reserved fund to finance activities that the provision of funds can not be

Sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran

fully implemented in one fiscal year.

Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Equity (Investment) of Local Government

government expenses that allocated to equity/investment, both in the short and long term, permanent or non-permanent. This investment can be in the form of deposit, the purchase of government securities (GS), Bank Indonesia Certificates (SBI), Treasury Bills (SPN), shares, investment in state/public enterprises, purchase of bonds and long-term debt.

Payment of Principal Debt is the payment of the principal debt which is calculated based on the short, medium and long term agreement.

Regional Lending is government spending in the form of lending to the central government, local government, and/or third parties.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

Current Fiscal Year Budget Surplus is a surplus/deficit added by the financing receipt subtracted by financing expenditure.

II. URAIAN RINGKAS

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan yang handal dan profesional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

II. BRIEF DESCRIPTION

Regional development is an effort to create the government which has reliable and professional capabilities. As an integral part of national development which aims to improve the living standard and welfare of the people, development in the local government, both at the provincial level and district/city level must be carried out effectively and efficiently. Thereby, the regional independency and equality of development will be achieved.

The issue of financial independence becomes very important, particularly the ones that relate to regional financial contribution to regional economic growth. The contribution of local government expenditure on regional economic growth is an opportunity that should be utilized optimally to stimulate the local economy.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut.

Dealing with the matter, the provincial government formulates the Receipt and Expenditure Budget (APBD) Province as a form of regional development planning. In the APBD, the details of programs that will be implemented along with funding sources were recorded. Budgeting should be arranged in such a way, so it can improve the performance of regional government and public services oriented.

The sources of funds for financing the regional development should be come from the region's own financial ability, with the aim to accelerate the government independency. In other words the local government must be spurred to increase the capability in financing the organization and public services by utilized their own potensial fund.

II.1. Pendapatan Daerah

Tabel A menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan, dengan total pendapatan 233,28 triliun rupiah pada tahun 2014; 242,71 triliun rupiah pada tahun 2015; dan 275,57 triliun rupiah pada tahun 2016 atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen pada tahun 2015 dan 13,54 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017 pendapatan pemerintah provinsi ditargetkan naik 15,83 persen menjadi 319,20 triliun rupiah. Peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan di tahun 2017, lebih disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari dana perimbangan, khususnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang naik sebesar 43,80 persen dibanding tahun 2016. Peningkatan ini merupakan salah satu akibat penambahan cadangan DAU yang berasal dari penundaan pembayaran DAU untuk tahun anggaran 2016. Selain itu, peningkatan pendapatan juga didukung oleh meningkatnya target

II.1. Revenue

Table A shows that the realization of the Provincial government's total revenue in Indonesia during 2014-2017 continue to increase, with the total revenue of 233.28 trillion rupiahs in 2014, 242.71 trillion rupiahs in 2015, and 275.57 trillion rupiahs in 2016, or increased by 4.04 percent; and 13.54 percent respectively. In 2017, the revenue of provincial government is targeted to increase by 15.83 percent to 319.20 trillion rupiahs. The increasing in 2017 was mostly caused by the increasing of balanced budget, especially from General Allocation Fund (DAU) which increased by 43.80 percent. This condition is the result of additional DAU reserves derived from delays in DAU payments for fiscal year 2016. Moreover, the increasing was also supported by the increasing of

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya komponen hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang naik sebesar 13,80 persen dibandingkan tahun 2016. Provinsi yang memiliki pertumbuhan pendapatan tertinggi pada tahun 2017 adalah Maluku Utara yaitu sebesar 41,63 persen dibanding tahun 2015.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah.

Original Government Revenue (PAD), especially from income of regional government corporate and management of separated regional government wealth component which increased by 13.80 percent. Maluku Utara as the province that have the highest growth in 2017 which increased by 41.63 percent.

The Original Local Government Revenue (PAD) is one of the important sources of income for the region.

Tabel A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (Miliar Rupiah), 2014-2017
Actual Revenue of Provincial Goverment Throughout Indonesia by Kind of Revenue (Billion Rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pendapatan	2014	2015	2016	2017 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pendapatan Asli Daerah		121 451	127 497	133 179	140 994
a. Pajak Daerah		103 088	107 892	112 690	120 198
b. Retribusi Daerah		1 705	1 690	1 876	1 800
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 972	3 224	3 159	3 595
d. Lain-lain PAD yang Sah		13 685	14 692	15 455	15 401
2. Dana Perimbangan		68 883	61 589	113 733	153 767
a. Bagi Hasil Pajak		17 482	13 330	22 176	26 724
b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		15 406	9 359	8 491	7 695
c. Dana Alokasi Umum		34 122	35 289	38 538	55 418
d. Dana Alokasi Khusus		1 873	3 610	44 529	63 930
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah		42 944	53 620	28 659	24 441
JUMLAH/TOTAL		233 277	242 706	275 571	319 202

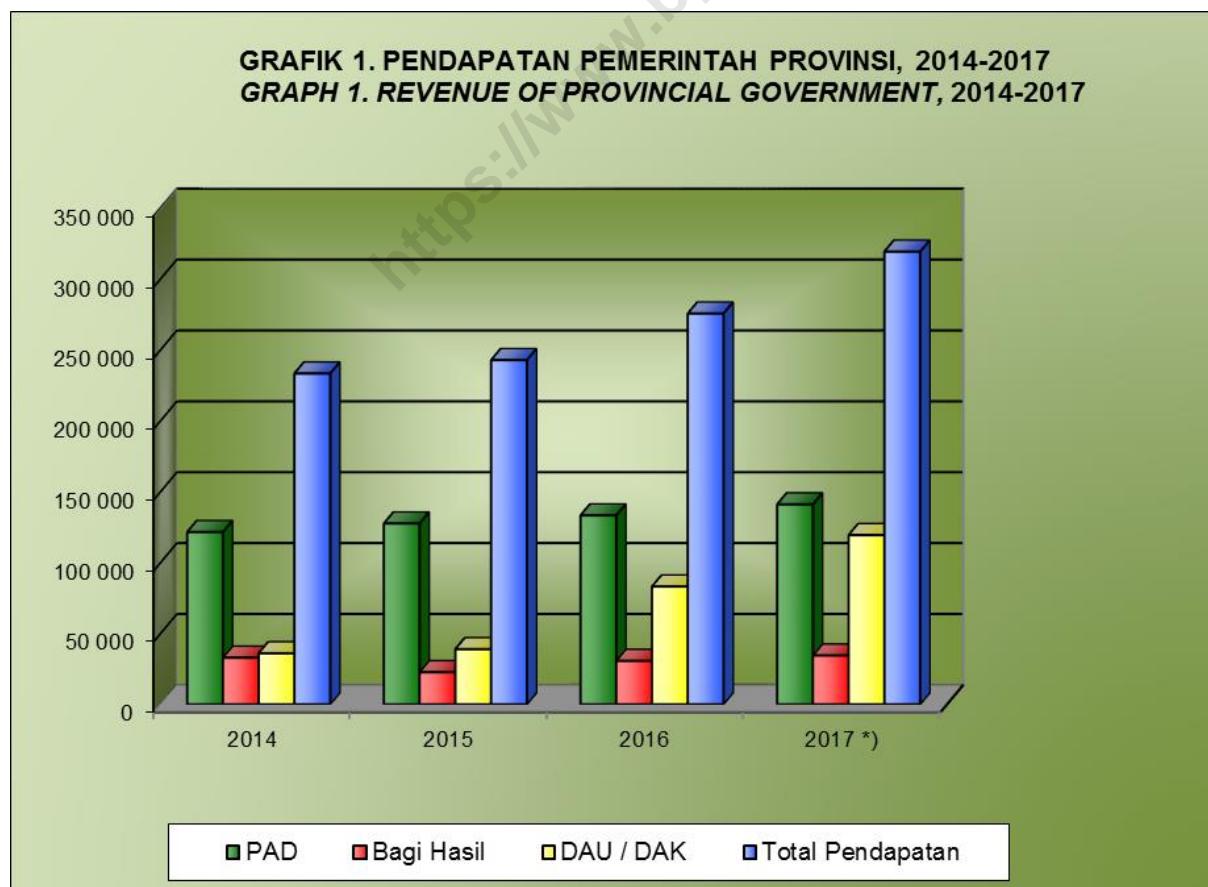
*) Data APBD

Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

Selama periode tahun 2014-2016, PAD terus mengalami kenaikan, yaitu dari 121,45 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 127,50 triliun rupiah pada tahun 2015 dan 133,18 triliun rupiah pada tahun 2016. Pajak daerah merupakan komponen yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap PAD.

The local government that has capability to increase its PAD significantly, meaning that this region has been able to utilized the existing potential optimally.

During the period 2014-2016, the development of PAD was steady increasing, i.e., from 121.45 trillion rupiah in 2014 to 127.50 trillion rupiahs in 2015 and 133.18 trillion rupiahs in 2016. This increasing was supported by local tax revenue as the biggest contribution to PAD in each years.



Komponen lain-lain PAD yang sah berada pada peringkat kedua, kemudian diikuti oleh pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah

Pada tahun 2017, PAD ditargetkan naik menjadi 140,99 triliun rupiah, sedangkan penerimaan pajak daerah ditargetkan meningkat sebesar 6,66 persen.

PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali”, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat

The second biggest contribution was from others legal PAD, followed by management of separated local government wealth, and retrIBUTions.

In 2016, PAD was targeted to 140.99 trillion rupiahs, while tax revenue was targeted to increase by 6.66 percent.

PAD is an important component in measuring the financial independence of a local government. The greater the role of PAD in the budget, the more independence is the local government. If the level of independence of a region is “very low”, it can be said that the central government has

Tabel B. Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Tingkat Kemandirian 2014-2017
The Distribution of Province in Indonesia by Independence Rate Categories 2014-2017

Kategori Kemandirian (1)	2014 (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017 *) (5)
Rendah Sekali (0-25 %)	7	7	8	10
Rendah (>25-50 %)	15	15	19	17
Sedang (>50-75 %)	11	10	7	7
Tinggi (>75%)	0	1	0	0
Jumlah	33	33	34	34

*) Data APBD

memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “**rendah**”, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “**sedang**”, menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “**tinggi**”, bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan pemerintah provinsi pada tahun 2014 hingga 2016 berkisar antara 40 hingga 60 persen, sehingga secara rata-rata tingkat kemandirian provinsi di Indonesia pada tahun-tahun tersebut dikategorikan sedang. Pada tahun 2014 tingkat kemandirian provinsi di Indonesia sebesar 52,06 persen dimana masuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa secara umum pemerintah provinsi sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah

the dominant role than the local government itself. Meanwhile, if a region has a degree of independence "low", it means that the central government intervention has been decreased, because the region is considered to be a little more able to implement regional autonomy. Then, for the government with "medium" category, it means that the goverment region has been able to implement regional autonomy, while the category of "high", it could be mean that the local government has been able and independent in carrying out the affairs of local autonomy.

PAD contribution to total revenue of provincial goverment in 2014 to 2016 was in the range 40 to 60 percent. Thus, on average, the independence level of provinces in Indonesia is categorized as medium level. In 2014, the independence level of provinces in Indonesia was 52.06 percent which was in medium level. It indicated that in general, the provincial goverment was nearing able to implement regional autonomy.

Pada tahun 2015, kontribusi PAD mengalami kenaikan menjadi 52,53 persen, dan mengalami penurunan menjadi 48,33 persen pada tahun 2016. Pemerintah provinsi sangat berhati-hati dalam mentargetkan anggaran PAD-nya pada tahun 2017, karena khawatir tidak dapat memenuhi target, sehingga porsi PAD terhadap total pendapatannya menurun menjadi 44,17 persen.

Selanjutnya, pada tabel C dapat dilihat bahwa kontribusi pendapatan daerah yang berasal dari PAD memberikan peranan terbesar pada tahun 2014-2016.

In 2015, PAD contribution increased to 52.53 percent; and become 48.33 percent in 2016. The provincial government was very careful in targeting the PAD in 2017, for the reason of that they could not meet the target. Consequently, PAD contribution to total revenue decreased to 44.17 percent in 2017.

Moreover, from table C it can be seen that the PAD contribution to total revenue had dominant effect in 2014 to 2016.

Tabel C. Kontribusi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (persen), 2014-2017
Revenue Contribution of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Revenue (percent), 2014-2017

No.	Jenis Pendapatan	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	52,06	52,53	48,33	44,17
a.	Pajak Daerah	44,19	44,45	40,89	37,66
b.	Retribusi Daerah	0,73	0,70	0,68	0,56
c.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,27	1,33	1,15	1,13
d.	Lain-lain PAD yang Sah	5,87	6,05	5,61	4,82
2.	Dana Perimbangan	29,53	25,38	41,27	48,17
a.	Bagi Hasil Pajak	7,49	5,49	8,05	8,37
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6,60	3,86	3,08	2,41
c.	Dana Alokasi Umum	14,63	14,54	13,98	17,36
d.	Dana Alokasi Khusus	0,80	1,49	16,16	20,03
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	18,41	22,09	10,40	7,66
JUMLAH/TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Data APBD

Namun, pada tahun 2017 dana perimbangan ditargetkan menjadi komponen yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah. Pajak daerah merupakan komponen PAD yang memiliki kontribusi paling besar dengan besaran yang terus meningkat pada tahun 2014-2015, yaitu sebesar 44,19 persen pada tahun 2014; dan 44,45 persen pada tahun 2015; Akan tetapi, pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD menurun menjadi 40,89 persen dan dianggarkan menurun kembali menjadi sebesar 37,66 persen pada tahun 2017.

Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan memiliki kecenderungan meningkat dengan kontribusi sebesar 29,53 persen; 25,38 persen; dan 41,27 persen terhadap total pendapatan pada tahun 2014-2016. Kontribusi dana perimbangan ini ditargetkan semakin meningkat menjadi sebesar 48,17 persen pada tahun 2017.

Penerimaan dari dana perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu i) dana bagi hasil berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam, ii) dana alokasi yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

However, the balanced budget has been targeted to be the biggest contribution to total revenue in 2017. Local taxes were component of PAD which had the biggest contribution. with the value was always increased in 2014-2015. The values were 44.19 percent in 2014 and 44.45 percent in 2015 and decreased become 40.89 percent in 2016. The local taxes contribution to PAD also has been determined to decrease become 37.66 percent in 2017.

Revenue derived from the balanced budget has tendency to increase with a contribution of 29.53 percent, 25.38 percent, and 41.27 percent during the period of 2014-2016. In 2017 the balanced budget contribution has been targeted to 48.17 percent.

The balanced budget consists of two parts, namely, i) the revenue from tax shares and natural resource shares, ii) the allocation of funds which include General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK)

yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Kontribusi terbesar pada dana perimbangan ini secara rata-rata berasal dari DAU, diikuti dengan DAK. Disisi lain jika dilihat dari DAU dan DAK yang diberikan pemerintah pusat, menandakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat berkisar 20 persen.

Sumber penerimaan pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terkecil adalah lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2014 kontribusi komponen ini hanya sebesar 18,41 persen sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 22,09 persen dan 10,40 persen. Dan di tahun 2017 lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan mempunyai kontribusi yang menurun menjadi sebesar 7,66 persen.

that came from central government fund transfers. The highest contribution of the balanced budget on average was from General Allocation Fund (DAU), followed by Special Allocation Fund (DAK). Viewed from the DAU and DAK that given by central government, it showed that dependency level of local government to central government approximately 20 percent.

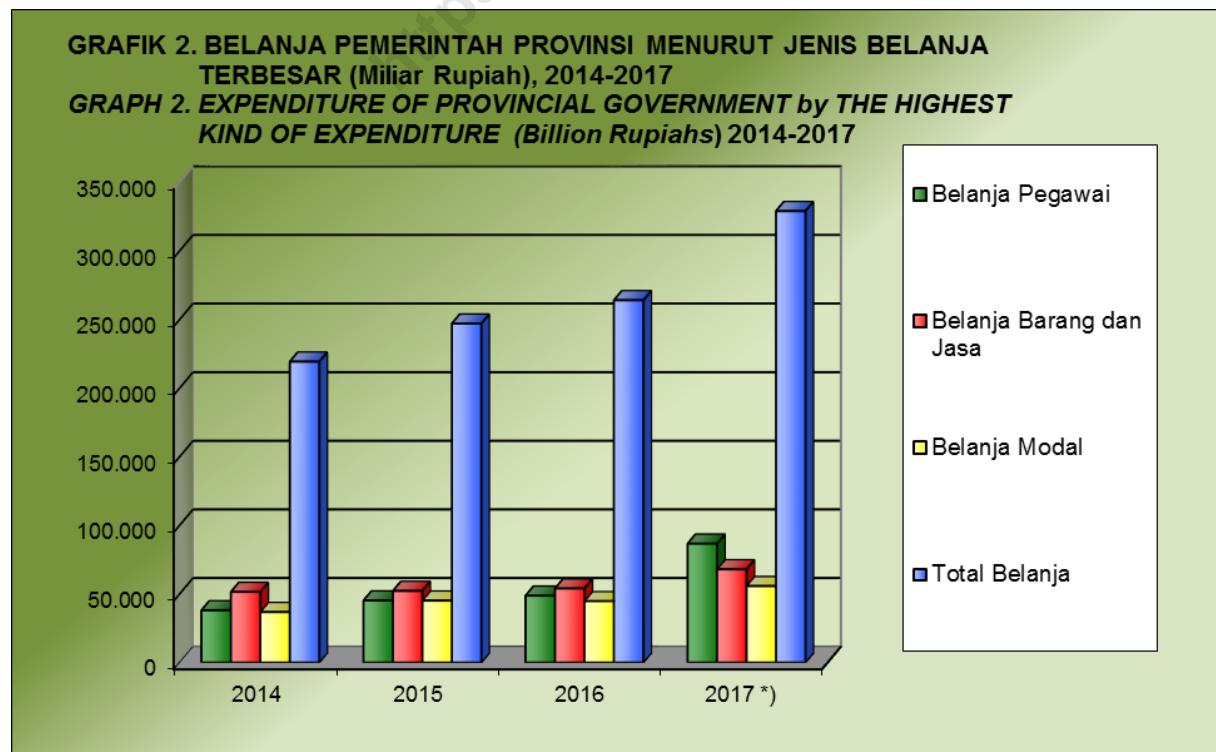
Then, the other component of local government revenue is others legal revenue that has the smallest contribution to total revenue. In 2014, its contribution amounted to 18.41 percent, while in 2015 and 2016 it was 22.09 percent and 10.40 percent respectively. However, for 2017 others legal revenue contribution was expected to decrease become 7.66 percent.

II.2. Belanja Daerah

Secara umum realisasi belanja daerah pada kurun waktu 2014-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 219,33 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 247,04 triliun rupiah tahun 2015 dan 264,10 triliun rupiah pada tahun 2016. Pada tahun 2017 belanja daerah dianggarkan sebesar 329,07 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 24,60 persen dibanding tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja langsung.

II.2. Local Government Expenditure

In general, local government expenditure during 2014-2017 increased every years, that was, from 219.33 trillion rupiahs in 2014 to 247.04 trillion rupiahs in 2015 and 264.10 trillion rupiahs in 2016. Whereas, in 2017 local government expenditure was targeted to 329.07 trillion rupiahs or increased by 24.60 percent compared to 2016. This increasing was due to the increase in almost all types of expenditure, both indirect expenditure and direct expenditure.



Dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2014 dan 2016 terjadi surplus sedangkan pada tahun 2015 mengalami defisit. Pada tahun 2015 realisasi pendapatan bernilai 242,71 triliun rupiah (Tabel A) sedangkan belanja daerah bernilai 247,04 triliun rupiah (Tabel D). Pada tahun 2017, diperkirakan juga akan terjadi defisit anggaran dimana pendapatan bernilai 319,20 triliun rupiah (Tabel A) sedangkan belanja daerah bernilai 329,07 triliun rupiah (Tabel D). Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan komponen pembiayaan untuk menutup kekurangannya. Secara rinci realisasi belanja pemerintah disajikan pada tabel D.

In terms of the realization of revenue and expenditure in 2014 and 2016, the provincial government budget experienced a surplus and in 2015 it experienced a deficit. In 2015 the value of revenue was 242.71 trillion rupiahs (Table A) and the expenditure was 247.04 trillion rupiahs (Table D). Whereas, in fiscal year 2017, it was estimated has deficit budget that reflected in the value of revenue that was 319.20 trillion rupiahs (Table A) and the expenditure was 329.07 trillion rupiahs (Table D). The deficit can be covered by the local government financing receipt. In details, the actual expenditure of local government can be seen in Table D.

Tabel D. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (Miliar Rupiah), 2014-2017
Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure (Billion Rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Belanja	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		123 758	143 156	157 922	196 310
1. Belanja Pegawai		30 925	38 808	41 421	77 692
2. Belanja Bunga		45	61	56	95
3. Belanja Subsidi		32	694	948	3 325
4. Belanja Hibah		33 018	39 957	53 832	51 091
5. Belanja Bantuan Sosial		1 641	3 030	3 405	3 450
6. Belanja Bagi Hasil		31 843	32 794	35 734	37 620
7. Belanja Bantuan Keuangan		26 086	27 730	22 466	22 097
8. Pengeluaran Tidak Terduga		168	81	62	941
B. BELANJA LANGSUNG		95 577	103 886	106 177	132 763
1. Belanja Pegawai		7 216	6 430	7 367	8 996
2. Belanja Barang dan Jasa		51 521	52 298	54 033	68 003
3. Belanja Modal		36 839	45 158	44 777	55 763
JUMLAH/TOTAL		219 335	247 042	264 099	329 073

*) Data APBD

Dari struktur belanja secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa komponen belanja didominasi oleh belanja barang dan jasa. Pada tahun 2014-2016, belanja tersebut berturut-turut sebesar 51,52 triliun rupiah, 52,30 triliun rupiah, dan 54,03 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 1,51 persen pada tahun 2015 dan 3,32 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017 belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar 68,00 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 25,85 persen dibanding tahun 2016.

Komponen belanja berikutnya yang cukup dominan adalah belanja pegawai, dalam hal ini gabungan dari belanja pegawai langsung dan tidak langsung. Pada tahun 2014, belanja tersebut tercatat sebesar 38,14 triliun rupiah dan pada tahun 2015 sebesar 45,24 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 18,61 persen dari tahun 2014. Sementara itu, pada tahun 2016 realisasi belanja pegawai sebesar 48,79 triliun rupiah atau naik sebesar 7,85 persen dari tahun 2015. Dan di tahun 2017, belanja pegawai dianggarkan mengalami kenaikan sebesar 77,68 persen atau sebesar 86,69 triliun rupiah.

Based on the expenditure structure, it can be seen that the dominant component of the expenditure was goods and services expenditure. During 2014 to 2016, the goods and services expenditure was recorded to 51.52 trillion rupiahs, 52.30 trillion rupiahs, and 54.03 trillion rupiahs or increased by 1.51 percent in 2015 and 3.32 percent in 2016. In 2017, goods and services expenditure has been budgeted to 68.00 trillion rupiahs or increased by 25.85 percent compared to 2016.

The next dominant component of expenditure was personnel expenditure, covering both direct and indirect personnel expenditure. In 2014, it recorded at 38.14 trillion rupiahs, and in 2015 it amounted to 45.24 trillion rupiahs or increased by 18.61 persen to that in 2014. Meanwhile, personnel expenditure in 2016 was 48.79 trillion rupiahs or increased by 7.85 persen from one year before. Then, in 2017 it budgeted to 86.69 trillion rupiahs or increased by 77.68 percent.

Tabel E. Kontribusi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (persen), 2014-2017
Contribution of Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure (percent), 2014-2017

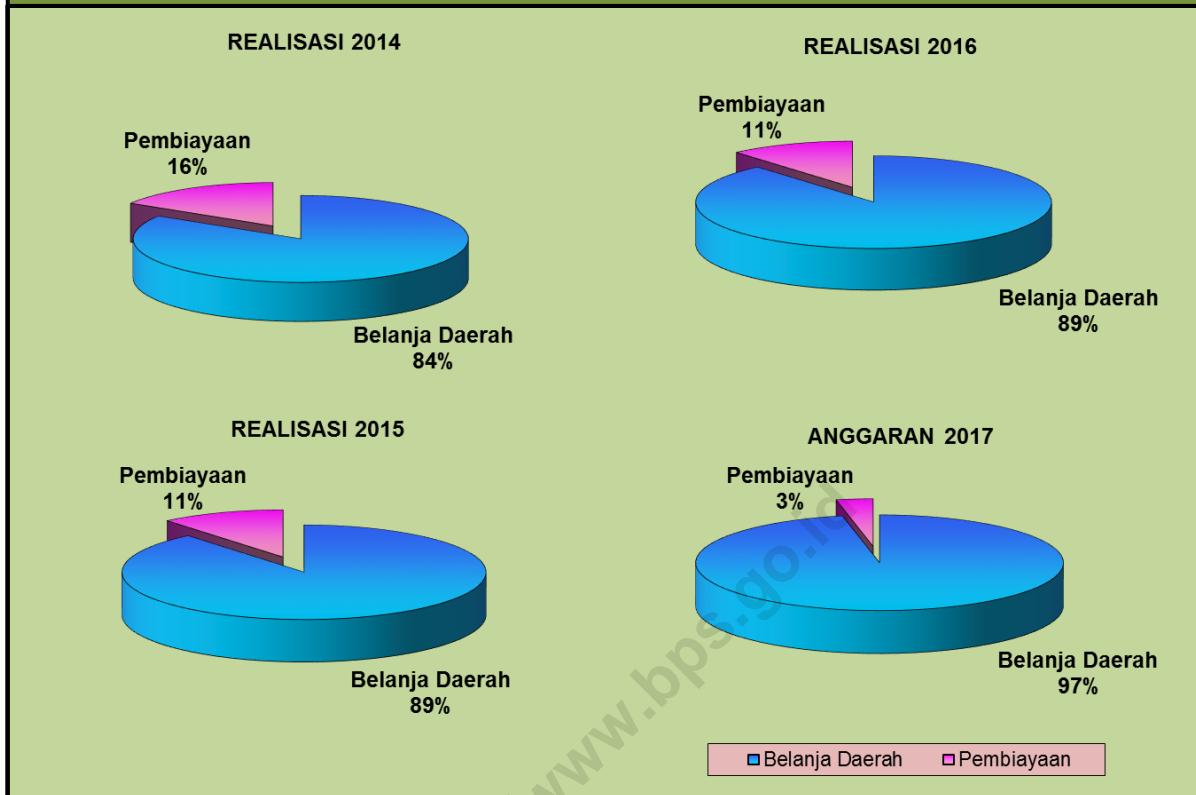
No.	Jenis Belanja	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		56,42	57,95	59,80	59,66
1. Belanja Pegawai	14,10	15,71	15,68	23,61	
2. Belanja Bunga	0,02	0,02	0,02	0,03	
3. Belanja Subsidi	0,01	0,28	0,36	1,01	
4. Belanja Hibah	15,05	16,17	20,38	15,53	
5. Belanja Bantuan Sosial	0,75	1,23	1,29	1,05	
6. Belanja Bagi Hasil	14,52	13,27	13,53	11,43	
7. Belanja Bantuan Keuangan	11,89	11,22	8,51	6,71	
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0,08	0,03	0,02	0,29	
B. BELANJA LANGSUNG		43,58	42,05	40,20	40,34
1. Belanja Pegawai	3,29	2,60	2,79	2,73	
2. Belanja Barang dan Jasa	23,49	21,17	20,46	20,67	
3. Belanja Modal	16,80	18,28	16,95	16,95	
JUMLAH/TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel E menunjukkan kontribusi dari struktur belanja secara keseluruhan, dimana pada tahun 2014-2017 belanja tidak langsung memberikan kontribusi yang lebih besar dari belanja langsung. Pada tahun 2014-2016, komponen belanja tidak langsung yang memiliki kontribusi terbesar adalah belanja hibah dengan kontribusi masing-masing sebesar 15,05 persen, 16,17 persen, dan 20,38 persen. Sedangkan pada tahun 2017, belanja pegawai ditargetkan menjadi komponen belanja tidak langsung yang memiliki kontribusi terbesar yaitu 23,61 persen.

Table E figured out the contribution of each component to total expenditure during 2014-2017, where the value of indirect expenditure was higher than direct expenditure. During 2014 to 2016, grant expenditure was the component with the highest contribution to indirect expenditure, namely 15.05 percent, 16.17 percent, and 20.38 percent respectively. Personnel expenditure was determined as a component of indirect expenditure which had the biggest contribution with the value was 23.61 percent in 2017.

GRAFIK 3. PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI, 2014-2017
GRAPH 3. BUDGET ABSORPTION OF PROVINCIAL GOVERNMENT, 2014-2017



Sementara itu, untuk belanja langsung, komponen yang mempunyai kontribusi yang besar adalah belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Kontribusi keduanya sebesar 40,29 persen pada tahun 2014, 39,45 persen pada tahun 2015, 37,41 persen pada tahun 2016, dan dianggarkan mempunyai kontribusi sebesar 37,61 persen pada tahun 2017.

Meanwhile, in terms of direct expenditure structure, the component with highest portion were goods and services expenditure and capital expenditure. The contribution of both expenditures were 40.29 percent in 2014, 39.45 percent in 2015, and 37.41 percent in 2016. It has been targeted to have contribution of 37.61 percent in 2017.

Penyerapan anggaran daerah yang merupakan persentase realisasi belanja terhadap pendapatan daerah pada tahun 2014 mencapai 83,81 persen, naik menjadi 88,99 persen pada tahun 2015 dan turun menjadi 88,67 persen pada tahun 2016. Sedangkan target penyerapan anggaran pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 96,76 persen (grafik 3).

The absorption of local budget, which is represented by the percentage of actual expenditure to total revenue in 2014 was recorded as much as 83.81 percent, then increased to 88.99 percent in 2015. In 2016, the absorption of budget decreased to 88.67 percent. Meanwhile, the target of budget absorption in 2017 was 96.76 percent (graph 3).

TABEL
—
TABLE

1.

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.a (juta rupiah), 2014

TABLE 1.a *ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA*
(million rupiahs), 2014

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembangunan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembangunan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Aceh	11 606 325	1 399 324	13 005 649	12 045 848	959 801	13 005 649	
2. Sumatera Utara	7 772 029	51 426	7 823 455	7 808 557	14 898	7 823 455	
3. Sumatera Barat	3 635 838	240 277	3 876 115	3 483 673	392 442	3 876 115	
4. Riau	8 132 410	1 451 087	9 583 497	5 602 074	3 981 423	9 583 497	
5. Jambi	3 165 056	514 103	3 679 159	3 204 633	474 526	3 679 159	
6. Sumatera Selatan	6 237 368	10 179	6 247 547	5 770 733	476 814	6 247 547	
7. Bengkulu	1 986 239	210 176	2 196 415	1 934 722	261 693	2 196 415	
8. Lampung	4 526 532	41 141	4 567 673	4 454 187	113 486	4 567 673	
9. Bangka Belitung	1 719 594	201 966	1 921 560	1 596 087	325 473	1 921 560	
10. Kepulauan Riau	2 919 185	538 525	3 457 710	3 312 459	145 251	3 457 710	
11. DKI Jakarta	43 824 301	7 593 995	51 418 296	37 799 664	13 618 632	51 418 296	
12. Jawa Barat	22 310 953	3 586 472	25 897 425	20 797 988	5 099 437	25 897 425	
13. Jawa Tengah	15 157 460	1 689 438	16 846 898	15 086 065	1 760 833	16 846 898	
14. DI Yogyakarta	3 139 872	389 527	3 529 399	2 981 068	548 331	3 529 399	
15. Jawa Timur	20 772 484	1 846 787	22 619 271	20 006 319	2 612 952	22 619 271	
16. Banten	7 068 433	1 069 805	8 138 238	6 192 156	1 946 082	8 138 238	
17. Bali	4 577 678	1 039 710	5 617 388	4 491 646	1 125 742	5 617 388	
18. Nusa Tenggara Barat	2 789 427	13 828	2 803 255	2 614 100	189 155	2 803 255	
19. Nusa Tenggara Timur	2 787 589	235 105	3 022 694	2 693 049	329 645	3 022 694	
20. Kalimantan Barat	3 719 770	127 745	3 847 515	3 652 914	194 601	3 847 515	
21. Kalimantan Tengah	3 129 695	386 720	3 516 415	3 235 800	280 615	3 516 415	
22. Kalimantan Selatan	4 793 165	863 395	5 656 560	4 917 828	738 732	5 656 560	
23. Kalimantan Timur	11 285 828	1 050 356	12 336 184	11 274 556	1 061 628	12 336 184	
24. Kalimantan Utara	1 513 353	313 461	1 826 814	642 365	1 184 449	1 826 814	
25. Sulawesi Utara	2 320 811	249 382	2 570 193	2 229 484	340 709	2 570 193	
26. Sulawesi Tengah	2 440 227	147 909	2 588 136	2 445 661	142 475	2 588 136	
27. Sulawesi Selatan	5 503 161	339 681	5 842 842	5 600 387	242 455	5 842 842	
28. Sulawesi Tenggara	2 189 560	331 004	2 520 564	2 088 600	431 964	2 520 564	
29. Gorontalo	1 209 049	92 443	1 301 492	1 204 490	97 002	1 301 492	
30. Sulawesi Barat	1 240 242	129 255	1 369 497	1 227 422	142 075	1 369 497	
31. Maluku	1 823 030	89 520	1 912 550	1 726 133	186 417	1 912 550	
32. Maluku Utara	1 508 578	24 142	1 532 720	1 481 565	51 155	1 532 720	
33. Papua Barat	5 762 348	1 334 409	7 096 757	5 428 849	1 667 908	7 096 757	
34. Papua	10 709 819	833 203	11 543 022	10 303 787	1 239 235	11 543 022	
JUMLAH/TOTAL	233 277 409	28 435 496	261 712 905	219 334 869	42 378 036	261 712 905	

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.b (juta rupiah), 2015

TABLE 1.b ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA

(million rupiahs), 2015

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembinaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembinaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Aceh	11 694 163	916 943	12 611 106	12 149 422	461 684	12 611 106	
2. Sumatera Utara	8 480 759	14 898	8 495 657	7 959 167	536 490	8 495 657	
3. Sumatera Barat	4 052 249	274 105	4 326 354	4 022 257	304 097	4 326 354	
4. Riau	6 911 045	3 981 811	10 892 856	7 760 972	3 131 884	10 892 856	
5. Jambi	3 129 719	474 526	3 604 245	3 425 566	178 679	3 604 245	
6. Sumatera Selatan	5 990 424	39 970	6 030 394	5 190 199	840 195	6 030 394	
7. Bengkulu	2 180 679	255 525	2 436 204	2 282 345	153 859	2 436 204	
8. Lampung	4 787 308	111 475	4 898 783	4 781 202	117 581	4 898 783	
9. Bangka Belitung	1 886 999	325 654	2 212 653	1 869 959	342 694	2 212 653	
10. Kepulauan Riau	2 513 438	136 340	2 649 778	2 605 394	44 384	2 649 778	
11. DKI Jakarta	44 209 238	9 209 782	53 419 020	43 031 323	10 387 697	53 419 020	
12. Jawa Barat	24 009 981	4 551 872	28 561 853	24 417 606	4 144 247	28 561 853	
13. Jawa Tengah	16 828 154	1 689 437	18 517 591	17 820 760	696 831	18 517 591	
14. DI Yogyakarta	3 400 015	511 093	3 911 108	3 496 426	414 682	3 911 108	
15. Jawa Timur	22 228 450	2 450 199	24 678 649	22 946 308	1 732 341	24 678 649	
16. Banten	7 328 221	1 907 994	9 236 215	8 084 140	1 152 075	9 236 215	
17. Bali	4 967 967	905 741	5 873 708	4 999 031	874 677	5 873 708	
18. Nusa Tenggara Barat	3 448 586	198 748	3 647 334	3 364 904	282 430	3 647 334	
19. Nusa Tenggara Timur	3 315 669	254 559	3 570 228	3 328 496	241 732	3 570 228	
20. Kalimantan Barat	4 073 147	134 601	4 207 748	4 123 636	84 112	4 207 748	
21. Kalimantan Tengah	3 252 748	294 181	3 546 929	3 482 434	64 495	3 546 929	
22. Kalimantan Selatan	4 746 943	753 331	5 500 274	5 102 865	397 409	5 500 274	
23. Kalimantan Timur	9 376 313	0	9 376 313	8 598 988	777 325	9 376 313	
24. Kalimantan Utara	1 444 383	1 184 449	2 628 832	1 893 597	735 235	2 628 832	
25. Sulawesi Utara	2 527 959	290 709	2 818 668	2 693 084	125 584	2 818 668	
26. Sulawesi Tengah	2 901 588	135 830	3 037 418	2 953 281	84 137	3 037 418	
27. Sulawesi Selatan	6 105 815	309 745	6 415 560	6 149 605	265 955	6 415 560	
28. Sulawesi Tenggara	2 471 389	415 301	2 886 690	2 349 274	537 416	2 886 690	
29. Gorontalo	1 389 324	87 003	1 476 327	1 407 931	68 396	1 476 327	
30. Sulawesi Barat	1 473 750	0	1 473 750	1 385 842	87 908	1 473 750	
31. Maluku	2 132 589	171 948	2 304 537	2 280 091	24 446	2 304 537	
32. Maluku Utara	1 801 248	54 882	1 856 130	1 808 760	47 370	1 856 130	
33. Papua Barat	5 840 353	1 665 917	7 506 270	6 880 167	626 103	7 506 270	
34. Papua	11 805 767	1 180 865	12 986 632	12 396 447	590 185	12 986 632	
JUMLAH/TOTAL	242 706 380	34 889 434	277 595 814	247 041 479	30 554 335	277 595 814	

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.c (juta rupiah), 2016

TABLE ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(million rupiahs), 2016

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembinaaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembinaaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Aceh	12 364 564	288 677	12 653 241	12 119 713	533 528	12 653 241	
2. Sumatera Utara	10 440 619	536 276	10 976 895	9 476 424	1 500 471	10 976 895	
3. Sumatera Barat	4 624 675	251 497	4 876 172	4 504 038	372 134	4 876 172	
4. Riau	6 942 927	3 132 206	10 075 133	8 731 938	1 343 195	10 075 133	
5. Jambi	3 203 974	177 911	3 381 885	3 294 485	87 400	3 381 885	
6. Sumatera Selatan	6 582 781	44 861	6 627 642	4 962 573	1 665 069	6 627 642	
7. Bengkulu	2 355 564	136 087	2 491 651	2 029 691	461 960	2 491 651	
8. Lampung	5 588 723	102 512	5 691 235	5 476 922	214 313	5 691 235	
9. Bangka Belitung	1 949 866	337 694	2 287 560	2 069 868	217 692	2 287 560	
10. Kepulauan Riau	2 852 614	0	2 852 614	2 782 118	70 496	2 852 614	
11. DKI Jakarta	53 784 706	5 607 752	59 392 458	47 128 810	12 263 648	59 392 458	
12. Jawa Barat	27 694 035	3 650 427	31 344 462	27 621 964	3 722 498	31 344 462	
13. Jawa Tengah	19 632 577	417 921	20 050 498	19 354 375	696 123	20 050 498	
14. DI Yogyakarta	3 899 193	370 880	4 270 073	3 847 963	422 110	4 270 073	
15. Jawa Timur	24 962 122	1 565 114	26 527 236	23 859 954	2 667 282	26 527 236	
16. Banten	8 656 395	1 130 075	9 786 470	8 925 813	860 657	9 786 470	
17. Bali	5 249 018	674 677	5 923 695	5 420 934	502 761	5 923 695	
18. Nusa Tenggara Barat	3 949 997	198 663	4 148 660	3 764 302	384 358	4 148 660	
19. Nusa Tenggara Timur	3 875 554	165 206	4 040 760	3 702 912	337 848	4 040 760	
20. Kalimantan Barat	4 494 429	9 089	4 503 518	4 320 619	182 899	4 503 518	
21. Kalimantan Tengah	3 548 505	39 350	3 587 855	3 174 706	413 149	3 587 855	
22. Kalimantan Selatan	5 218 111	382 578	5 600 689	5 178 715	421 974	5 600 689	
23. Kalimantan Timur	7 985 728	226 681	8 212 409	7 601 242	611 167	8 212 409	
24. Kalimantan Utara	2 332 987	735 234	3 068 221	2 556 534	511 687	3 068 221	
25. Sulawesi Utara	2 885 186	100 584	2 985 770	2 801 145	184 625	2 985 770	
26. Sulawesi Tengah	3 175 693	77 437	3 253 130	3 178 114	75 016	3 253 130	
27. Sulawesi Selatan	7 162 589	129 955	7 292 544	6 930 979	361 565	7 292 544	
28. Sulawesi Tenggara	2 809 721	450 595	3 260 316	2 663 870	596 446	3 260 316	
29. Gorontalo	1 584 308	68 396	1 652 704	1 595 895	56 809	1 652 704	
30. Sulawesi Barat	1 688 607	125 838	1 814 445	1 765 978	48 467	1 814 445	
31. Maluku	2 744 943	86 709	2 831 652	2 798 916	32 736	2 831 652	
32. Maluku Utara	2 022 258	38 870	2 061 128	2 023 862	37 266	2 061 128	
33. Papua Barat	6 740 387	516 616	7 257 003	6 464 612	792 391	7 257 003	
34. Papua	12 567 840	503 495	13 071 335	11 968 494	1 102 841	13 071 335	
JUMLAH/TOTAL	275 571 196	22 279 863	297 851 059	264 098 478	33 752 581	297 851 059	

ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 1.d (juta rupiah), 2017

TABLE RECEIPT AND EXPENDITURE BUDGET OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(million rupiahs), 2017

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembinaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembinaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	14 291 939	441 761	14 733 700	14 733 700	0	14 733 700
2.	Sumatera Utara	12 170 582	942 102	13 112 684	13 034 684	78 000	13 112 684
3.	Sumatera Barat	6 110 977	135 000	6 245 977	6 225 977	20 000	6 245 977
4.	R i a u	8 859 018	2 149 132	11 008 150	11 008 150	0	11 008 150
5.	J a m b i	4 163 725	178 584	4 342 309	4 342 309	0	4 342 309
6.	Sumatera Selatan	8 587 020	25 000	8 612 020	6 942 881	1 669 139	8 612 020
7.	Bengkulu	3 041 325	321 633	3 362 958	3 344 958	18 000	3 362 958
8.	Lampung	6 723 785	84 143	6 807 928	6 802 928	5 000	6 807 928
9.	Bangka Belitung	2 355 579	315 544	2 671 123	2 666 123	5 000	2 671 123
10.	Kepulauan Riau	3 201 559	159 339	3 360 898	3 360 898	0	3 360 898
11.	DKI Jakarta	62 466 130	7 725 828	70 191 958	63 612 303	6 579 655	70 191 958
12.	Jawa Barat	30 540 901	2 200 000	32 740 901	32 429 026	311 875	32 740 901
13.	Jawa Tengah	23 467 518	200 000	23 667 518	23 363 518	304 000	23 667 518
14.	D I Yogyakarta	4 988 379	216 007	5 204 386	5 200 386	4 000	5 204 386
15.	Jawa Timur	27 932 994	715 000	28 647 994	28 239 661	408 333	28 647 994
16.	Banten	9 790 923	559 063	10 349 986	10 349 986	0	10 349 986
17.	B a l i	6 222 704	505 067	6 727 771	6 654 313	73 458	6 727 771
18.	Nusa Tenggara Barat	4 791 395	237 600	5 028 995	4 942 454	86 541	5 028 995
19.	Nusa Tenggara Timur	4 722 737	122 954	4 845 691	4 663 191	182 500	4 845 691
20.	Kalimantan Barat	5 095 395	85 000	5 180 395	5 065 395	115 000	5 180 395
21.	Kalimantan Tengah	4 086 898	62 365	4 149 263	3 984 273	164 990	4 149 263
22.	Kalimantan Selatan	5 703 186	65 000	5 768 186	5 736 686	31 500	5 768 186
23.	Kalimantan Timur	8 098 900	0	8 098 900	8 098 900	0	8 098 900
24.	Kalimantan Utara	1 978 280	905 000	2 883 280	2 733 280	150 000	2 883 280
25.	Sulawesi Utara	3 556 373	45 970	3 602 343	3 572 343	30 000	3 602 343
26.	Sulawesi Tengah	3 579 386	55 415	3 634 801	3 587 601	47 200	3 634 801
27.	Sulawesi Selatan	8 901 929	383 532	9 285 461	9 149 461	136 000	9 285 461
28.	Sulawesi Tenggara	3 545 198	161 378	3 706 576	3 597 160	109 416	3 706 576
29.	Gorontalo	1 831 693	10 415	1 842 108	1 839 532	2 576	1 842 108
30.	Sulawesi Barat	1 813 837	175 167	1 989 004	1 981 004	8 000	1 989 004
31.	M a l u k u	2 860 027	20 000	2 880 027	2 877 291	2 736	2 880 027
32.	Maluku Utara	2 864 176	120 000	2 984 176	2 649 166	335 010	2 984 176
33.	Papua Barat	6 888 868	365 093	7 253 961	7 198 961	55 000	7 253 961
34.	P a p u a	13 968 877	1 190 000	15 158 877	15 083 877	75 000	15 158 877
JUMLAH/TOTAL		319 202 213	20 878 092	340 080 305	329 072 376	11 007 929	340 080 305

TABEL
TABLE 2.

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2014-2017**
**TABEL 2 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 * (4)	2017 * (5)	2018 (6)
A. PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>		233 277 408 354	242 706 379 550	275 571 195 995	319 202 213 198		
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		121 450 818 035	127 497 344 793	133 179 011 317	140 994 204 504		
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		103 087 606 002	107 892 424 971	112 689 762 824	120 198 368 113		
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		1 705 308 478	1 689 511 259	1 875 861 563	1 800 332 857		
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		2 972 476 313	3 223 546 144	3 158 771 341	3 594 646 011		
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		13 685 427 242	14 691 862 419	15 454 615 589	15 400 857 523		
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		68 882 788 511	61 588 703 775	113 733 211 865	153 766 847 423		
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		17 481 607 781	13 330 307 560	22 178 206 076	26 727 770 029		
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		15 406 003 394	9 359 409 265	8 488 357 513	7 691 292 443		
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		34 121 932 565	35 288 784 853	38 538 077 004	55 417 530 820		
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		1 873 244 771	3 610 202 097	44 528 571 272	63 930 254 131		
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		42 943 801 808	53 620 330 982	28 658 972 813	24 441 161 271		
B. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		28 435 496 655	34 889 433 724	22 279 863 464	20 878 092 222		
JUMLAH/TOTAL		261 712 905 009	277 595 813 274	297 851 059 459	340 080 305 420		

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.1 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.1 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		11 606 324 715	11 694 163 500	12 364 563 974	14 291 939 316
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 731 130 840	1 985 835 617	2 060 180 944	2 227 055 654	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 030 679 175	1 172 685 150	1 252 745 085	1 299 742 665	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	3 701 217	4 799 511	9 504 914	10 068 000	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	134 013 450	165 102 922	176 799 447	227 982 070	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	562 736 998	643 248 034	621 131 498	689 262 919	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 551 683 310	1 561 778 473	1 572 466 631	3 741 189 010	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	77 430 824	205 970 244	157 902 741	210 923 874	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 199 685 909	47 047 187	20 710 528	39 276 672	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 201 612 787	1 237 894 986	1 263 870 989	1 930 152 204	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	72 953 790	70 866 056	129 982 373	1 560 836 260	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	7 323 510 565	8 146 549 410	8 731 916 399	8 323 694 652	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	1 399 323 697	916 943 238	288 676 554	441 760 666	
JUMLAH/TOTAL	13 005 648 412	12 611 106 738	12 653 240 528	14 733 699 982	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.2 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.2 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		7 772 029 153	8 480 758 953	10 440 618 930	12 170 582 106
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		4 416 811 865	4 883 880 619	4 954 833 101	4 925 627 727
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		4 054 634 671	4 427 143 659	4 446 394 795	4 486 811 920
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		78 497 614	36 071 947	34 505 502	33 959 568
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		156 330 873	250 240 903	259 493 569	277 500 968
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		127 348 707	170 424 110	214 439 235	127 355 271
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 812 638 981	1 521 253 168	5 219 273 756	7 235 420 477
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		380 468 139	313 793 086	486 455 044	542 968 184
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		23 310 178	20 451 831	24 628 176	24 914 780
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 349 132 276	1 139 261 371	1 604 505 673	2 638 744 012
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		59 728 388	47 746 880	3 103 684 863	4 028 793 501
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		1 542 578 307	2 075 625 166	266 512 073	9 533 902
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		51 426 062	14 897 906	536 275 841	942 102 186
JUMLAH/TOTAL		7 823 455 215	8 495 656 859	10 976 894 771	13 112 684 292

*) Data APBD

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
 (ribu rupiah), 2014-2017**
**TABEL 2.3 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY KIND OF RECEIPT
 (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A.	PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>	3 635 837 761	4 052 249 308	4 624 674 546	6 110 976 954
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 729 222 284	1 876 733 122	1 964 148 976	2 044 504 493
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 354 541 147	1 445 611 641	1 522 119 230	1 533 304 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	16 751 318	20 373 635	19 362 263	19 945 846
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	94 207 475	85 124 659	89 986 732	98 871 708
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	263 722 344	325 623 187	332 680 751	392 382 939
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 333 059 018	1 390 876 415	2 576 754 985	3 990 886 149
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	132 678 673	94 446 104	130 145 379	151 341 911
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	16 385 839	12 570 605	4 354 936	6 879 674
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 129 886 306	1 221 128 606	1 261 915 864	2 067 838 337
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	54 108 200	62 731 100	1 180 338 806	1 764 826 227
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	573 556 459	784 639 771	83 770 585	75 586 312
B.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	240 276 961	274 104 643	251 496 991	135 000 000
JUMLAH/TOTAL		3 876 114 722	4 326 353 951	4 876 171 537	6 245 976 954

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.4 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.4 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		8 132 409 892	6 911 044 806	6 942 926 673	8 859 017 596
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	3 245 087 745	3 476 960 098	3 110 656 140	3 735 800 000	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	2 496 771 206	2 572 777 209	2 417 976 746	3 000 000 000	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	16 992 124	21 571 219	12 444 464	14 000 000	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	154 214 508	178 216 271	83 335 008	218 000 000	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	577 109 907	704 395 399	596 899 922	503 800 000	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	4 231 808 634	2 548 627 473	3 824 481 733	5 120 242 596	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	668 492 187	756 114 293	836 925 397	1 060 950 201	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 698 594 353	1 074 930 738	827 647 310	938 495 645	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	820 984 584	654 220 250	738 378 737	1 434 458 151	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	43 737 510	63 362 192	1 421 530 289	1 686 338 599	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	655 513 513	885 457 235	7 788 800	2 975 000	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	1 451 086 907	3 981 811 287	3 132 206 277	2 149 132 445	
JUMLAH/TOTAL	9 583 496 799	10 892 856 093	10 075 132 950	11 008 150 041	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.5 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.5 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		3 165 055 793	3 129 718 818	3 203 974 464	4 163 724 816
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 281 239 473	1 241 237 022	1 192 291 685	1 393 072 790	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 010 560 585	1 010 318 980	966 519 347	1 189 792 800	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	14 587 181	19 336 664	18 684 766	20 901 482	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	32 219 309	33 956 073	26 979 273	37 495 287	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	223 872 398	177 625 305	180 108 299	144 883 221	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 514 518 389	1 419 079 798	1 398 290 199	2 766 192 135	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	194 972 088	179 892 405	69 691 960	201 857 776	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	321 853 079	172 076 759	176 500 909	164 661 894	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	948 337 712	1 009 165 864	1 070 452 478	1 432 088 270	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	49 355 510	57 944 770	81 644 852	967 584 195	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	369 297 931	469 401 998	613 392 580	4 459 891	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	514 103 467	474 526 425	177 910 338	178 583 989	
JUMLAH/TOTAL	3 679 159 260	3 604 245 243	3 381 884 802	4 342 308 805	

*) Data APBD

TABEL 2.6 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.6 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY KIND OF RECEIPT
 (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		6 237 367 763	5 990 424 062	6 582 780 930	8 587 019 939
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 407 905 239	2 534 526 413	2 546 177 545	3 023 936 703	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	2 267 779 726	2 324 865 133	2 378 960 065	2 832 420 651	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	11 422 670	17 229 351	18 403 609	14 542 756	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	30 668 098	60 861 027	62 837 135	79 561 221	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	98 034 745	131 570 902	85 976 736	97 412 075	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 982 866 001	2 329 728 331	2 506 312 481	5 559 345 267	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	548 897 750	578 423 875	655 564 087	788 694 737	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 385 670 591	749 983 666	631 146 676	1 031 578 078	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	985 542 760	931 915 470	1 071 421 391	1 721 811 481	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	62 754 900	69 405 320	148 180 327	2 017 260 971	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	846 596 523	1 126 169 318	1 530 290 904	3 737 969	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	10 179 492	39 970 123	44 860 613	25 000 000	
JUMLAH/TOTAL	6 247 547 255	6 030 394 185	6 627 641 543	8 612 019 939	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.7 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.7 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		1 986 238 994	2 180 678 757	2 355 563 885	3 041 325 079
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	672 064 468	701 300 383	731 556 734	905 536 549	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	483 711 051	510 664 692	526 348 050	646 249 666	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	4 625 281	4 048 632	5 052 488	14 924 662	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	17 080 376	18 128 900	18 036 697	22 067 685	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	166 647 760	168 458 159	182 119 499	222 294 536	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 104 582 676	1 208 985 365	1 616 462 130	2 132 917 440	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	50 653 058	36 006 730	52 783 845	51 121 651	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	44 907 411	63 004 615	24 564 583	28 712 489	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	955 095 187	1 046 080 820	1 070 751 292	1 354 429 212	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	53 927 020	63 893 200	468 362 410	698 654 088	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	209 591 850	270 393 009	7 545 021	2 871 090	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	210 176 309	255 524 824	136 086 530	321 632 583	
JUMLAH/TOTAL	2 196 415 303	2 436 203 581	2 491 650 415	3 362 957 662	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.8 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.8 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		4 526 532 292	4 787 308 489	5 588 722 511	6 723 785 172
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		2 274 685 573	2 247 342 668	2 368 796 251	2 649 215 475
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		1 946 452 924	1 963 322 717	2 051 836 519	2 394 300 000
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		9 253 336	10 376 054	7 184 466	5 706 998
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		25 462 865	25 715 957	26 696 866	28 456 956
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		293 516 448	247 927 940	283 078 400	220 751 521
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 472 486 569	1 514 291 529	3 158 712 900	4 031 511 697
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		142 641 117	105 182 867	149 737 823	157 179 635
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		144 940 791	66 912 823	35 738 174	65 919 749
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 136 053 041	1 097 129 439	1 321 679 032	1 906 179 170
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		48 851 620	245 066 400	1 651 557 871	1 902 233 143
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		779 360 150	1 025 674 292	61 213 360	43 058 000
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		41 141 205	111 474 702	102 511 595	84 143 083
JUMLAH/TOTAL		4 567 673 497	4 898 783 191	5 691 234 106	6 807 928 255

*) Data APBD

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2014-2017**
**TABEL 2.9 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>		1 719 594 419	1 886 998 635	1 949 866 524	2 355 579 069
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		562 928 837	571 802 890	574 258 444	678 913 156
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		508 262 616	506 944 936	507 983 460	557 198 594
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		9 357 404	11 520 365	8 651 867	15 448 205
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		1 025 926	5 243 416	5 613 343	8 500 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		44 282 891	48 094 173	52 009 774	97 766 357
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 025 142 797	1 130 400 495	1 126 284 913	1 666 665 913
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		52 839 392	47 461 054	50 251 504	55 808 099
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		122 110 799	140 696 182	92 608 512	120 020 027
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		806 820 146	897 887 443	905 526 208	1 035 119 230
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		43 372 460	44 355 816	77 898 689	455 718 557
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		131 522 785	184 795 250	249 323 167	10 000 000
B. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		201 966 080	325 653 645	337 693 794	315 544 386
JUMLAH/TOTAL		1 921 560 499	2 212 652 280	2 287 560 318	2 671 123 455

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.10 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.10 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		2 919 185 332	2 513 438 254	2 852 614 783	3 201 558 826
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 070 208 289	1 012 146 824	1 039 401 353	1 104 344 659	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 006 068 104	951 535 874	952 263 877	1 001 764 659	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	2 713 029	2 013 340	3 043 686	8 810 000	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	3 740 233	0	2 000 000	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	61 427 156	54 857 377	84 093 790	91 770 000	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 664 959 883	1 246 121 773	1 464 904 580	2 096 085 459	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	203 987 983	167 100 440	239 662 553	278 152 627	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	721 284 492	340 540 412	282 046 399	221 928 988	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	698 009 318	695 943 711	866 810 696	1 043 954 307	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	41 678 090	42 537 210	76 384 932	552 049 537	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	184 017 160	255 169 657	348 308 850	1 128 708	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	538 524 513	136 340 165	0	159 339 365	
JUMLAH/TOTAL	3 457 709 845	2 649 778 419	2 852 614 783	3 360 898 191	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.11 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.11 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		43 824 300 561	44 209 238 168	53 784 706 313	62 466 130 204
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	31 274 215 886	33 686 176 815	36 888 017 588	41 488 193 371	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	27 050 949 024	29 076 926 598	31 613 197 635	35 230 000 000	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	515 162 936	459 459 498	675 475 066	677 885 370	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	465 979 963	527 280 486	303 204 424	453 338 246	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	3 242 123 963	3 622 510 233	4 296 140 463	5 126 969 755	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	9 677 533 225	5 887 267 645	15 271 661 453	18 770 211 233	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	9 279 068 989	5 751 741 853	12 030 019 209	15 485 632 231	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	312 478 954	135 525 792	358 563 870	135 607 124	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	85 985 282	0	0	0	0
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	2 883 078 374	3 148 971 878	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	2 872 551 450	4 635 793 708	1 625 027 272	2 207 725 600	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	7 593 994 776	9 209 781 909	5 607 751 958	7 725 828 000	
JUMLAH/TOTAL	51 418 295 337	53 419 020 077	59 392 458 271	70 191 958 204	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.12 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.12 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 * (4)	2017 * (5)	2017 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		22 310 953 031	24 009 980 850	27 694 035 121	30 540 901 042		
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		15 038 153 310	16 032 856 414	17 042 895 114	16 524 120 918		
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		13 753 760 403	14 617 071 393	15 727 483 590	15 238 472 081		
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		70 081 405	73 404 323	73 564 738	58 245 148		
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		304 380 445	281 661 628	322 402 264	323 443 063		
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		909 931 057	1 060 719 070	919 444 522	903 960 626		
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		3 260 505 636	2 506 877 512	10 622 671 444	13 987 089 324		
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		1 076 897 693	906 645 388	1 494 773 662	1 491 667 777		
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		417 706 527	277 673 745	283 443 274	231 992 436		
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 687 686 386	1 303 654 355	1 248 112 172	2 992 041 501		
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		78 215 030	18 904 024	7 596 342 336	9 271 387 610		
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		4 012 294 085	5 470 246 924	28 468 563	29 690 800		
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		3 586 471 831	4 551 871 625	3 650 427 200	2 200 000 000		
JUMLAH/TOTAL		25 897 424 862	28 561 852 475	31 344 462 321	32 740 901 042		

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.13 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.13 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A.	PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>	15 157 460 004	16 828 153 995	19 632 577 137	23 467 518 025
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	9 916 358 231	10 904 825 813	11 541 029 720	11 967 160 406
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	8 213 117 978	9 090 677 397	9 672 518 190	10 166 892 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	79 475 022	95 871 360	106 225 059	99 766 182
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	291 844 276	320 604 410	340 397 111	363 962 822
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	1 331 920 955	1 397 672 646	1 421 889 360	1 336 539 402
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 542 626 745	2 257 142 994	8 017 297 596	11 414 817 176
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	490 753 590	564 581 508	779 355 174	905 720 434
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	168 776 726	5 159 563	114 318 048	80 519 652
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 803 931 189	1 629 429 283	1 859 907 223	3 688 746 159
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	79 165 240	57 972 640	5 263 717 151	6 739 830 931
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	2 698 475 028	3 666 185 188	74 249 821	85 540 443
B.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	1 689 438 285	1 689 436 792	417 920 564	200 000 000
JUMLAH/TOTAL		16 846 898 289	18 517 590 787	20 050 497 701	23 667 518 025

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.14 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.14 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A.	PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>	3 139 871 880	3 400 014 812	3 899 192 985	4 988 379 318
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 464 604 954	1 593 110 770	1 673 749 196	1 657 147 882
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 291 664 421	1 397 772 210	1 440 571 518	1 437 942 970
1.2.	Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	44 595 095	45 811 954	36 603 883	38 797 470
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	48 247 880	52 502 632	57 333 771	59 711 580
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	80 097 558	97 023 974	139 240 024	120 695 862
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 013 811 390	1 021 886 268	1 697 108 536	2 461 741 044
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	70 324 850	60 016 641	113 024 693	132 293 519
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	6 431 380	2 240 865	40 736	6 498
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	899 923 550	920 544 722	940 835 434	1 380 356 648
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	37 131 610	39 084 040	643 207 673	949 084 379
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	661 455 536	785 017 774	528 335 253	869 490 392
B.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	389 527 178	511 093 118	370 879 688	216 006 693
JUMLAH/TOTAL		3 529 399 058	3 911 107 930	4 270 072 673	5 204 386 011

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.15 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.15 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A.	PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>	20 772 483 874	22 228 450 228	24 962 122 477	27 932 994 314
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	14 442 216 520	15 402 647 675	15 817 795 025	14 900 003 388
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	11 517 684 924	12 497 148 705	12 772 227 118	12 179 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	148 638 032	176 559 903	133 587 974	120 081 924
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	342 920 270	352 223 333	364 325 988	371 135 389
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	2 432 973 294	2 376 715 734	2 547 653 945	2 229 786 075
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	3 485 336 764	3 115 619 118	9 039 003 359	13 025 490 926
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	1 123 170 491	1 024 023 599	1 485 750 232	1 556 794 431
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	393 742 118	438 294 622	364 134 130	482 833 035
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 866 548 185	1 587 261 707	1 672 878 372	3 687 183 876
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	101 875 970	66 039 190	5 516 240 625	7 298 679 584
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	2 844 930 590	3 710 183 435	105 324 093	7 500 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	1 846 787 127	2 450 199 381	1 565 113 939	715 000 000
JUMLAH/TOTAL		22 619 271 001	24 678 649 609	26 527 236 416	28 647 994 314

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.16 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.16 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A.	PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>	7 068 432 912	7 328 220 769	8 656 395 495	9 790 923 478
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	4 899 125 741	4 972 737 619	5 463 156 734	5 666 689 017
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	4 624 337 476	4 686 574 138	5 215 140 686	5 444 173 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	30 734 862	47 693 913	72 500 255	20 891 830
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	42 421 275	42 436 400	50 083 829	49 700 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	201 632 128	196 033 168	125 431 964	151 924 187
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 159 872 633	976 787 586	3 185 553 941	4 118 564 461
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	415 270 933	313 708 987	489 941 664	629 840 260
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	3 573 210	5 308 548	3 552 366	5 375 019
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	728 490 012	640 981 003	693 738 580	1 105 821 476
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	12 538 478	16 789 048	1 998 321 331	2 377 527 706
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	1 009 434 538	1 378 695 564	7 684 820	5 670 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	1 069 804 863	1 907 994 208	1 130 074 819	559 063 064
JUMLAH/TOTAL		8 138 237 775	9 236 214 977	9 786 470 314	10 349 986 542

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.17 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.17 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		4 577 678 391	4 967 966 967	5 249 017 754	6 222 703 627
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 920 416 698	3 041 298 422	3 041 195 258	3 250 531 000	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	2 517 432 372	2 571 035 791	2 593 093 541	2 901 766 389	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	71 324 628	59 882 722	63 858 566	48 738 043	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	89 747 348	105 388 683	172 408 362	104 276 269	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	241 912 350	304 991 226	211 834 789	195 750 299	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 018 431 009	1 070 197 148	1 867 010 930	2 673 596 252	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	144 532 786	104 103 309	171 994 343	205 864 211	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	0	0	0	0	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	832 297 473	831 597 268	850 144 224	1 311 447 133	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	41 600 750	134 496 571	844 872 363	1 156 284 908	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	638 830 684	856 471 397	340 811 566	298 576 375	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	1 039 709 937	905 741 327	674 677 370	505 067 015	
JUMLAH/TOTAL	5 617 388 328	5 873 708 294	5 923 695 124	6 727 770 642	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.18 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.18 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		2 789 427 242	3 448 585 632	3 949 996 798	4 791 395 359
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 115 060 397	1 374 165 767	1 359 844 019	1 501 609 334	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	904 783 591	1 010 655 242	1 003 260 954	1 122 139 007	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	19 838 517	24 357 011	29 792 038	18 459 359	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	55 670 167	63 229 182	72 827 612	92 558 485	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	134 768 122	275 924 332	253 963 415	268 452 483	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 212 086 447	1 450 695 265	2 583 032 590	3 222 521 203	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	149 750 882	134 132 452	327 753 815	185 190 482	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	27 281 795	13 671 946	47 282 610	167 935 203	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	980 390 340	1 088 633 717	1 117 691 709	1 496 972 550	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	54 663 430	214 257 150	1 090 304 456	1 372 422 968	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	462 280 398	623 724 600	7 120 189	67 264 822	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	13 828 458	198 747 835	198 662 806	237 599 598	
JUMLAH/TOTAL	2 803 255 700	3 647 333 467	4 148 659 604	5 028 994 957	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.19 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.19 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		2 787 588 697	3 315 669 415	3 875 554 165	4 722 736 609
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	763 337 478	882 315 240	995 186 121	1 004 044 139	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	559 803 346	662 667 383	745 481 336	766 961 320	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	18 408 844	32 888 198	40 418 138	25 821 710	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	63 445 963	71 557 012	77 139 883	71 550 000	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	121 679 325	115 202 647	132 146 764	139 711 109	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 282 745 347	1 461 922 423	2 839 657 759	3 700 529 341	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	74 913 781	56 298 222	88 320 888	86 258 843	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 908 066	4 523 616	2 892 314	2 056 353	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 131 687 590	1 300 445 875	1 337 091 848	1 782 981 159	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	74 235 910	100 654 710	1 411 352 709	1 829 232 986	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	741 505 872	971 431 752	40 710 285	18 163 129	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	235 104 724	254 559 323	165 206 704	122 953 958	
JUMLAH/TOTAL	3 022 693 421	3 570 228 738	4 040 760 869	4 845 690 567	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.20 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.20 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		3 719 770 111	4 073 146 943	4 494 428 712	5 095 395 280
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 621 610 891	1 702 542 350	1 664 338 992	1 674 190 144	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 343 346 494	1 459 364 275	1 424 303 271	1 445 912 639	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	166 639 948	120 979 151	33 529 205	35 942 515	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	62 865 346	66 063 240	70 822 378	70 822 377	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	48 759 103	56 135 684	135 684 138	121 512 613	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 531 868 903	1 644 655 328	1 860 789 738	3 413 705 136	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	127 364 266	108 019 118	141 806 926	158 654 710	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	51 092 301	45 457 841	25 728 625	71 324 874	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 290 222 856	1 405 594 169	1 493 486 253	1 667 449 642	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	63 189 480	85 584 200	199 767 934	1 516 275 910	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	566 290 317	725 949 265	969 299 982	7 500 000	
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	127 744 740	134 600 710	9 088 795	85 000 000	
JUMLAH/TOTAL	3 847 514 851	4 207 747 653	4 503 517 507	5 180 395 280	

*) Data APBD

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
 TABEL 2.21 (ribu rupiah), 2014-2017**
**TABLE 2.21 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY KIND OF RECEIPT
 (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (1) (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>		3 129 694 746	3 252 747 574	3 548 504 778	4 086 898 379
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 253 708 122	1 174 969 267	1 158 303 928	1 327 494 134	
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 087 630 498	1 019 293 669	941 491 438	1 088 380 040	
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	9 065 199	9 674 080	10 680 538	9 934 994	
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	29 760 680	37 075 680	44 908 111	50 204 000	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	127 251 745	108 925 838	161 223 841	178 975 100	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 557 416 499	1 673 376 687	1 878 977 521	2 615 492 050	
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	144 812 235	117 308 743	200 298 531	147 925 558	
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	198 245 696	202 946 136	142 581 089	163 537 809	
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 152 428 738	1 280 595 848	1 294 850 243	1 612 657 546	
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	61 929 830	72 525 960	241 247 658	691 371 137	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	318 570 125	404 401 620	511 223 329	143 912 195	
B. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	386 719 707	294 181 384	39 349 626	62 364 824	
JUMLAH/TOTAL	3 516 414 453	3 546 928 958	3 587 854 404	4 149 263 203	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.22 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.22 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		4 793 164 631	4 746 943 175	5 218 111 235	5 703 186 211
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		2 898 704 954	2 684 908 314	2 499 530 556	3 205 743 749
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		2 395 925 506	2 040 580 383	1 867 418 431	2 685 646 913
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		20 001 837	29 197 146	27 535 065	25 460 405
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		1 116 058	50 479 364	45 765 385	50 638 160
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		481 661 553	564 651 421	558 811 675	443 998 271
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 523 714 616	1 576 111 339	2 095 330 205	2 457 435 611
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		171 176 951	136 054 700	209 216 036	225 596 340
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		596 622 189	804 921 470	835 291 936	167 341 832
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		701 725 536	571 244 699	779 517 454	1 111 200 737
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		54 189 940	63 890 470	271 304 779	953 296 702
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		370 745 061	485 923 522	623 250 474	40 006 851
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		863 395 088	753 331 196	382 577 990	65 000 000
JUMLAH/TOTAL		5 656 559 719	5 500 274 371	5 600 689 225	5 768 186 211

*) Data APBD

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
 TABEL 2.23 (ribu rupiah), 2014-2017**
**TABLE 2.23 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY KIND OF RECEIPT
 (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 * (4)	2017 * (5)	2017 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>		11 285 828 192	9 376 312 818	7 985 727 918	8 098 900 000		
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		6 663 113 275	4 861 546 726	4 029 364 844	3 987 452 610		
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		5 429 125 999	3 753 718 936	3 127 250 928	3 034 590 000		
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		15 494 253	14 733 943	19 435 791	23 133 125		
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		309 599 926	230 816 058	167 385 378	161 561 830		
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		908 893 097	862 277 789	715 292 747	768 167 655		
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		4 253 320 982	4 024 025 055	3 941 626 961	4 092 045 390		
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		662 727 209	639 155 369	690 750 462	762 711 562		
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		3 532 243 333	3 166 218 336	2 154 070 925	1 545 912 582		
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		57 312 515	0	80 402 179	649 653 899		
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		1 037 925	218 651 350	1 016 403 395	1 133 767 347		
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		369 393 935	490 741 037	14 736 113	19 402 000		
B. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		1 050 356 119		0	226 681 021		0
JUMLAH/TOTAL		12 336 184 311	9 376 312 818	8 212 408 939	8 098 900 000		

*) Data APBD

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2014-2017**
**TABEL 2.24 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 *) (4)	2017 *) (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>		1 513 352 878	1 444 382 660	2 332 986 749	1 978 279 905		
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		11 833 885	370 047 613	507 955 517	320 047 453		
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		0	305 736 943	249 930 125	309 797 453		
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		0	0	129 871	0		
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		0	0	0	0		
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		11 833 885	64 310 670	257 895 521	10 250 000		
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 228 625 713	910 439 345	1 579 537 874	1 653 232 452		
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		104 848 110	86 580 489	53 913 245	79 799 690		
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		1 094 988 347	112 663 608	115 570 656	229 642 913		
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		20 567 986	651 247 428	1 032 459 159	1 032 459 159		
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		8 221 270	59 947 820	377 594 814	311 330 690		
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		272 893 280	163 895 702	245 493 358	5 000 000		
B. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		313 461 401	1 184 448 976	735 234 472	905 000 000		
JUMLAH/TOTAL		1 826 814 279	2 628 831 636	3 068 221 221	2 883 279 905		

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.25 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.25 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A.	PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>	2 320 810 783	2 527 959 070	2 885 186 111	3 556 372 800
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	937 681 927	1 012 945 961	981 044 550	1 076 342 496
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	785 141 595	837 020 758	838 345 527	908 800 896
1.2.	Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	34 468 180	54 224 074	65 162 587	73 936 400
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	29 410 022	33 225 161	21 330 625	55 100 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	88 662 130	88 475 968	56 205 811	38 505 200
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 093 949 318	1 173 041 387	1 880 906 287	2 429 190 571
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	69 660 411	52 779 724	91 228 190	91 681 055
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	14 761 225	16 568 064	11 493 268	6 612 486
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	949 852 622	1 026 948 809	1 065 545 204	1 340 353 014
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	59 675 060	76 744 790	712 639 625	990 544 016
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	289 179 538	341 971 722	23 235 274	50 839 733
B.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	249 382 344	290 708 660	100 583 942	45 969 700
JUMLAH/TOTAL		2 570 193 127	2 818 667 730	2 985 770 053	3 602 342 500

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.26 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.26 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		2 440 226 816	2 901 587 582	3 175 692 920	3 579 386 410
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		824 611 352	904 937 124	939 092 070	914 431 692
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		663 633 353	738 993 197	776 340 401	782 619 046
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		4 326 901	6 203 473	7 046 280	5 155 512
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		9 548 970	20 311 030	23 605 753	21 657 993
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		147 102 128	139 429 424	132 099 636	104 999 141
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 239 776 947	1 557 754 565	2 210 604 520	2 646 828 120
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		62 083 121	53 911 018	64 668 487	96 854 232
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		25 866 332	31 254 392	37 389 645	86 271 426
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 087 885 014	1 221 602 865	1 272 925 036	1 493 238 032
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		63 942 480	250 986 290	835 621 352	970 464 430
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		375 838 517	438 895 893	25 996 330	18 126 598
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		147 909 346	135 829 773	77 436 672	55 415 177
JUMLAH/TOTAL		2 588 136 162	3 037 417 355	3 253 129 592	3 634 801 587

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.27 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.27 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 *) (4)	2017 *) (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		5 503 161 406	6 105 815 095	7 162 588 691	8 901 928 775		
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		3 029 122 239	3 270 828 511	3 449 561 308	3 724 172 762		
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		2 667 266 553	2 902 245 606	3 079 662 364	3 314 207 500		
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		94 595 827	94 314 412	86 532 573	90 140 042		
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		74 599 105	88 982 067	106 759 669	122 029 116		
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		192 660 754	185 286 426	176 606 702	197 796 104		
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 531 386 241	1 590 754 389	3 699 816 674	5 158 708 141		
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		218 129 274	170 370 403	231 803 625	247 924 112		
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		30 681 746	17 687 427	82 539 898	49 195 927		
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 209 598 741	1 180 010 167	1 394 148 361	2 266 264 600		
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		72 976 480	222 686 392	1 991 324 790	2 595 323 502		
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		942 652 926	1 244 232 195	13 210 709	19 047 872		
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		339 681 251	309 744 921	129 955 474	383 532 049		
JUMLAH/TOTAL		5 842 842 657	6 415 560 016	7 292 544 165	9 285 460 824		

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.28 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.28 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 * (4)	2017 * (5)	2017 * (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		2 189 559 758	2 471 388 947	2 809 721 459	3 545 198 442		
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		599 942 751	667 079 210	756 302 657	743 891 514		
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		457 838 380	516 470 918	579 776 256	628 118 997		
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		18 244 034	17 728 744	13 243 197	11 971 877		
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		23 315 540	22 653 081	23 412 409	23 450 508		
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		100 544 797	110 226 467	139 870 795	80 350 132		
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 236 016 579	1 383 850 900	2 037 098 802	2 748 755 754		
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		62 477 343	47 457 636	60 565 883	60 873 542		
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		61 153 215	73 569 737	37 088 482	38 199 559		
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 053 636 011	1 176 423 577	1 200 634 199	1 602 253 856		
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		58 750 010	86 399 950	738 810 238	1 047 428 797		
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		353 600 428	420 458 837	16 320 000	52 551 174		
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		331 004 017	415 300 941	450 595 338	161 377 575		
JUMLAH/TOTAL		2 520 563 775	2 886 689 888	3 260 316 797	3 706 576 017		

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.29 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.29 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (1) (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017 * (5) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		1 209 049 489	1 389 324 213	1 584 307 614	1 831 692 829
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		281 920 210	289 557 151	311 223 202	356 398 685
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		247 137 061	260 996 262	280 594 553	326 098 685
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		1 967 050	4 072 218	6 081 260	6 000 000
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		1 946 292	3 181 275	2 101 314	4 000 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		30 869 807	21 307 396	22 446 075	20 300 000
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		800 313 829	934 046 394	1 232 492 165	1 467 294 144
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		22 554 272	18 908 874	26 648 505	26 937 709
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		1 106 059	1 857 909	1 290 744	6 753 468
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		734 279 438	845 395 651	884 557 753	1 019 780 418
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		42 374 060	67 883 960	319 995 163	413 822 549
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		126 815 450	165 720 668	40 592 247	8 000 000
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		92 443 365	87 002 816	68 395 981	10 415 470
JUMLAH/TOTAL		1 301 492 854	1 476 327 029	1 652 703 595	1 842 108 299

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.30 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.30 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 *) (4)	2017 *) (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		1 240 241 991	1 473 749 820	1 688 606 848	1 813 836 670		
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		223 704 906	273 507 239	277 686 126	299 021 359		
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		196 874 903	228 176 180	247 316 686	252 443 859		
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		4 031 227	11 825 664	14 043 490	20 790 000		
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		1 175 246	2 137 218	3 337 839	4 500 000		
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		21 623 530	31 368 177	12 988 111	21 287 500		
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		857 098 935	991 630 606	1 409 011 535	1 512 701 624		
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		27 843 302	22 547 630	27 854 106	25 354 542		
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		2 455 801	988 093	998 970	302 567		
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		776 214 122	895 580 933	925 147 622	977 903 640		
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		50 585 710	72 513 950	455 010 837	509 140 875		
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		159 438 150	208 611 975	1 909 187	2 113 687		
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		129 254 556		0	125 838 418	175 167 041	
JUMLAH/TOTAL		1 369 496 547	1 473 749 820	1 814 445 266	1 989 003 711		

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.31 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.31 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 *) (4)	2017 *) (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		1 823 030 023	2 132 588 500	2 744 943 162	2 860 026 791		
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		425 425 608	390 813 372	600 781 690	519 252 406		
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		279 566 231	296 851 529	345 765 591	335 588 052		
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		70 162 844	63 034 075	105 659 589	79 932 621		
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		31 317 239	1 750 000	52 600 000	53 288 500		
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		44 379 294	29 177 768	96 756 510	50 443 233		
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 165 471 924	1 453 149 900	2 049 873 654	2 333 050 345		
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		66 624 446	51 135 352	53 981 312	83 185 048		
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		9 009 006	7 325 274	4 596 943	9 434 757		
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 019 704 312	1 177 774 674	1 260 897 986	1 465 641 669		
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		70 134 160	216 914 600	730 397 413	774 788 871		
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		232 132 491	288 625 228	94 287 818	7 724 040		
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		89 519 602	171 947 602	86 709 213	20 000 000		
JUMLAH/TOTAL		1 912 549 625	2 304 536 102	2 831 652 375	2 880 026 791		

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.32 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.32 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 *) (4)	2017 *) (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		1 508 577 673	1 801 248 263	2 022 257 938	2 864 175 975		
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		203 059 698	236 054 154	280 111 908	486 709 146		
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		145 451 712	172 771 593	206 325 470	364 562 246		
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		41 852 324	50 092 679	58 938 273	66 388 300		
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		634 494	0	871 595	871 595		
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		15 121 168	13 189 882	13 976 570	54 887 005		
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		1 089 674 339	1 303 829 596	1 453 204 504	1 907 792 409		
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		44 229 087	37 981 605	59 417 889	54 444 545		
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		64 198 612	57 983 593	27 346 253	51 567 258		
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		906 623 550	1 061 177 950	1 132 578 857	1 219 425 902		
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		74 623 090	146 686 448	233 861 505	582 354 704		
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		215 843 636	261 364 513	288 941 526	469 674 420		
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		24 141 586	54 882 268	38 870 415	120 000 000		
JUMLAH/TOTAL		1 532 719 259	1 856 130 531	2 061 128 353	2 984 175 975		

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.33 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.33 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 * (6)
A.	PENDAPATAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</i>	5 762 348 201	5 840 353 119	6 740 386 627	6 888 867 178
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	306 674 697	322 799 298	338 811 109	403 269 107
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	229 610 362	230 413 878	252 127 729	262 246 500
1.2.	Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	1 206 600	1 076 531	903 364	1 622 250
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	14 364 750	7 725 389	32 210 768	33 600 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	61 492 985	83 583 500	53 569 248	105 800 357
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 783 645 235	2 496 263 895	3 221 910 435	3 196 319 386
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	175 115 617	191 559 617	178 956 654	178 169 166
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 425 049 229	928 248 703	1 230 768 226	1 219 715 760
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 122 264 659	1 284 079 495	1 322 765 639	1 378 805 557
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	61 215 730	92 376 080	489 419 916	419 628 903
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	2 672 028 269	3 021 289 926	3 179 665 083	3 289 278 685
B.	PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	1 334 408 797	1 665 917 453	516 616 637	365 093 355
JUMLAH/TOTAL		7 096 756 998	7 506 270 572	7 257 003 264	7 253 960 533

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS PENERIMAAN
TABEL 2.34 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 2.34 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE		10 709 818 950	11 805 767 353	12 567 839 768	13 968 876 704
1. Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>		944 929 692	912 908 312	1 019 732 912	1 308 280 586
1.1. Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>		566 062 615	633 391 996	666 992 312	1 030 423 565
1.2. Retribusi Daerah <i>Retributions</i>		57 091 739	49 085 469	58 076 738	82 930 263
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>		32 942 178	15 932 454	53 758 803	52 810 183
1.4. Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>		288 833 160	214 498 393	240 905 059	142 116 575
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>		2 643 812 997	3 256 235 610	3 595 089 074	4 419 279 187
2.1. Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>		244 216 931	196 894 225	277 042 212	309 397 335
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>		287 888 085	321 105 167	487 428 302	296 765 909
2.3. Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>		1 991 202 341	2 277 932 698	2 502 449 137	2 570 118 273
2.4. Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>		120 505 640	460 303 520	328 169 423	1 242 997 670
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>		7 121 076 261	7 636 623 431	7 953 017 782	8 241 316 931
B. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		833 202 864	1 180 864 548	503 495 889	1 190 000 000
JUMLAH/TOTAL		11 543 021 814	12 986 631 901	13 071 335 657	15 158 876 704

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 3.A (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 3.A ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	11 606 324 715	11 694 163 500	12 364 563 974	14 291 939 316
2.	Sumatera Utara	7 772 029 153	8 480 758 953	10 440 618 930	12 170 582 106
3.	Sumatera Barat	3 635 837 761	4 052 249 308	4 624 674 546	6 110 976 954
4.	R i a u	8 132 409 892	6 911 044 806	6 942 926 673	8 859 017 596
5.	J a m b i	3 165 055 793	3 129 718 818	3 203 974 464	4 163 724 816
6.	Sumatera Selatan	6 237 367 763	5 990 424 062	6 582 780 930	8 587 019 939
7.	Bengkulu	1 986 238 994	2 180 678 757	2 355 563 885	3 041 325 079
8.	Lampung	4 526 532 292	4 787 308 489	5 588 722 511	6 723 785 172
9.	Bangka Belitung	1 719 594 419	1 886 998 635	1 949 866 524	2 355 579 069
10.	Kepulauan Riau	2 919 185 332	2 513 438 254	2 852 614 783	3 201 558 826
11.	DKI Jakarta	43 824 300 561	44 209 238 168	53 784 706 313	62 466 130 204
12.	Jawa Barat	22 310 953 031	24 009 980 850	27 694 035 121	30 540 901 042
13.	Jawa Tengah	15 157 460 004	16 828 153 995	19 632 577 137	23 467 518 025
14.	D I Yogyakarta	3 139 871 880	3 400 014 812	3 899 192 985	4 988 379 318
15.	Jawa Timur	20 772 483 874	22 228 450 228	24 962 122 477	27 932 994 314
16.	Banten	7 068 432 912	7 328 220 769	8 656 395 495	9 790 923 478
17.	B a l i	4 577 678 391	4 967 966 967	5 249 017 754	6 222 703 627
18.	Nusa Tenggara Barat	2 789 427 242	3 448 585 632	3 949 996 798	4 791 395 359
19.	Nusa Tenggara Timur	2 787 588 697	3 315 669 415	3 875 554 165	4 722 736 609
20.	Kalimantan Barat	3 719 770 111	4 073 146 943	4 494 428 712	5 095 395 280
21.	Kalimantan Tengah	3 129 694 746	3 252 747 574	3 548 504 778	4 086 898 379
22.	Kalimantan Selatan	4 793 164 631	4 746 943 175	5 218 111 235	5 703 186 211
23.	Kalimantan Timur	11 285 828 192	9 376 312 818	7 985 727 918	8 098 900 000
24.	Kalimantan Utara	1 513 352 878	1 444 382 660	2 332 986 749	1 978 279 905
25.	Sulawesi Utara	2 320 810 783	2 527 959 070	2 885 186 111	3 556 372 800
26.	Sulawesi Tengah	2 440 226 816	2 901 587 582	3 175 692 920	3 579 386 410
27.	Sulawesi Selatan	5 503 161 406	6 105 815 095	7 162 588 691	8 901 928 775
28.	Sulawesi Tenggara	2 189 559 758	2 471 388 947	2 809 721 459	3 545 198 442
29.	Gorontalo	1 209 049 489	1 389 324 213	1 584 307 614	1 831 692 829
30.	Sulawesi Barat	1 240 241 991	1 473 749 820	1 688 606 848	1 813 836 670
31.	M a l u k u	1 823 030 023	2 132 588 500	2 744 943 162	2 860 026 791
32.	Maluku Utara	1 508 577 673	1 801 248 263	2 022 257 938	2 864 175 975
33.	Papua Barat	5 762 348 201	5 840 353 119	6 740 386 627	6 888 867 178
34.	P a p u a	10 709 818 950	11 805 767 353	12 567 839 768	13 968 876 704
JUMLAH/TOTAL		233 277 408 354	242 706 379 550	275 571 195 995	319 202 213 198

*) Data APBD

TABEL 3.1

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),
2014-2017**
**ACTUAL ORIGINAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 731 130 840	1 985 835 617	2 060 180 944	2 227 055 654
2.	Sumatera Utara	4 416 811 865	4 883 880 619	4 954 833 101	4 925 627 727
3.	Sumatera Barat	1 729 222 284	1 876 733 122	1 964 148 976	2 044 504 493
4.	R i a u	3 245 087 745	3 476 960 098	3 110 656 140	3 735 800 000
5.	J a m b i	1 281 239 473	1 241 237 022	1 192 291 685	1 393 072 790
6.	Sumatera Selatan	2 407 905 239	2 534 526 413	2 546 177 545	3 023 936 703
7.	Bengkulu	672 064 468	701 300 383	731 556 734	905 536 549
8.	Lampung	2 274 685 573	2 247 342 668	2 368 796 251	2 649 215 475
9.	Bangka Belitung	562 928 837	571 802 890	574 258 444	678 913 156
10.	Kepulauan Riau	1 070 208 289	1 012 146 824	1 039 401 353	1 104 344 659
11.	DKI Jakarta	31 274 215 886	33 686 176 815	36 888 017 588	41 488 193 371
12.	Jawa Barat	15 038 153 310	16 032 856 414	17 042 895 114	16 524 120 918
13.	Jawa Tengah	9 916 358 231	10 904 825 813	11 541 029 720	11 967 160 406
14.	D I Yogyakarta	1 464 604 954	1 593 110 770	1 673 749 196	1 657 147 882
15.	Jawa Timur	14 442 216 520	15 402 647 675	15 817 795 025	14 900 003 388
16.	Banten	4 899 125 741	4 972 737 619	5 463 156 734	5 666 689 017
17.	B a l i	2 920 416 698	3 041 298 422	3 041 195 258	3 250 531 000
18.	Nusa Tenggara Barat	1 115 060 397	1 374 165 767	1 359 844 019	1 501 609 334
19.	Nusa Tenggara Timur	763 337 478	882 315 240	995 186 121	1 004 044 139
20.	Kalimantan Barat	1 621 610 891	1 702 542 350	1 664 338 992	1 674 190 144
21.	Kalimantan Tengah	1 253 708 122	1 174 969 267	1 158 303 928	1 327 494 134
22.	Kalimantan Selatan	2 898 704 954	2 684 908 314	2 499 530 556	3 205 743 749
23.	Kalimantan Timur	6 663 113 275	4 861 546 726	4 029 364 844	3 987 452 610
24.	Kalimantan Utara	11 833 885	370 047 613	507 955 517	320 047 453
25.	Sulawesi Utara	937 681 927	1 012 945 961	981 044 550	1 076 342 496
26.	Sulawesi Tengah	824 611 352	904 937 124	939 092 070	914 431 692
27.	Sulawesi Selatan	3 029 122 239	3 270 828 511	3 449 561 308	3 724 172 762
28.	Sulawesi Tenggara	599 942 751	667 079 210	756 302 657	743 891 514
29.	Gorontalo	281 920 210	289 557 151	311 223 202	356 398 685
30.	Sulawesi Barat	223 704 906	273 507 239	277 686 126	299 021 359
31.	M a l u k u	425 425 608	390 813 372	600 781 690	519 252 406
32.	Maluku Utara	203 059 698	236 054 154	280 111 908	486 709 146
33.	Papua Barat	306 674 697	322 799 298	338 811 109	403 269 107
34.	P a p u a	944 929 692	912 908 312	1 019 732 912	1 308 280 586
JUMLAH/TOTAL		121 450 818 035	127 497 344 793	133 179 011 317	140 994 204 504

*) Data APBD

**REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),
2014-2017**
**ACTUAL LOCAL INCOME TAXES OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 030 679 175	1 172 685 150	1 252 745 085	1 299 742 665
2.	Sumatera Utara	4 054 634 671	4 427 143 659	4 446 394 795	4 486 811 920
3.	Sumatera Barat	1 354 541 147	1 445 611 641	1 522 119 230	1 533 304 000
4.	R i a u	2 496 771 206	2 572 777 209	2 417 976 746	3 000 000 000
5.	J a m b i	1 010 560 585	1 010 318 980	966 519 347	1 189 792 800
6.	Sumatera Selatan	2 267 779 726	2 324 865 133	2 378 960 065	2 832 420 651
7.	Bengkulu	483 711 051	510 664 692	526 348 050	646 249 666
8.	Lampung	1 946 452 924	1 963 322 717	2 051 836 519	2 394 300 000
9.	Bangka Belitung	508 262 616	506 944 936	507 983 460	557 198 594
10.	Kepulauan Riau	1 006 068 104	951 535 874	952 263 877	1 001 764 659
11.	DKI Jakarta	27 050 949 024	29 076 926 598	31 613 197 635	35 230 000 000
12.	Jawa Barat	13 753 760 403	14 617 071 393	15 727 483 590	15 238 472 081
13.	Jawa Tengah	8 213 117 978	9 090 677 397	9 672 518 190	10 166 892 000
14.	D I Yogyakarta	1 291 664 421	1 397 772 210	1 440 571 518	1 437 942 970
15.	Jawa Timur	11 517 684 924	12 497 148 705	12 772 227 118	12 179 000 000
16.	Banten	4 624 337 476	4 686 574 138	5 215 140 686	5 444 173 000
17.	B a l i	2 517 432 372	2 571 035 791	2 593 093 541	2 901 766 389
18.	Nusa Tenggara Barat	904 783 591	1 010 655 242	1 003 260 954	1 122 139 007
19.	Nusa Tenggara Timur	559 803 346	662 667 383	745 481 336	766 961 320
20.	Kalimantan Barat	1 343 346 494	1 459 364 275	1 424 303 271	1 445 912 639
21.	Kalimantan Tengah	1 087 630 498	1 019 293 669	941 491 438	1 088 380 040
22.	Kalimantan Selatan	2 395 925 506	2 040 580 383	1 867 418 431	2 685 646 913
23.	Kalimantan Timur	5 429 125 999	3 753 718 936	3 127 250 928	3 034 590 000
24.	Kalimantan Utara	0	305 736 943	249 930 125	309 797 453
25.	Sulawesi Utara	785 141 595	837 020 758	838 345 527	908 800 896
26.	Sulawesi Tengah	663 633 353	738 993 197	776 340 401	782 619 046
27.	Sulawesi Selatan	2 667 266 553	2 902 245 606	3 079 662 364	3 314 207 500
28.	Sulawesi Tenggara	457 838 380	516 470 918	579 776 256	628 118 997
29.	Gorontalo	247 137 061	260 996 262	280 594 553	326 098 685
30.	Sulawesi Barat	196 874 903	228 176 180	247 316 686	252 443 859
31.	M a l u k u	279 566 231	296 851 529	345 765 591	335 588 052
32.	Maluku Utara	145 451 712	172 771 593	206 325 470	364 562 246
33.	Papua Barat	229 610 362	230 413 878	252 127 729	262 246 500
34.	P a p u a	566 062 615	633 391 996	666 992 312	1 030 423 565
JUMLAH/TOTAL		103 087 606 002	107 892 424 971	112 689 762 824	120 198 368 113

*) Data APBD

**REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI RETRIBUSI DAERAH SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2014-2017**
**TABEL 3.1.2 ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM RETRIBUTIONS THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 (*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	3 701 217	4 799 511	9 504 914	10 068 000
2.	Sumatera Utara	78 497 614	36 071 947	34 505 502	33 959 568
3.	Sumatera Barat	16 751 318	20 373 635	19 362 263	19 945 846
4.	R i a u	16 992 124	21 571 219	12 444 464	14 000 000
5.	J a m b i	14 587 181	19 336 664	18 684 766	20 901 482
6.	Sumatera Selatan	11 422 670	17 229 351	18 403 609	14 542 756
7.	Bengkulu	4 625 281	4 048 632	5 052 488	14 924 662
8.	Lampung	9 253 336	10 376 054	7 184 466	5 706 998
9.	Bangka Belitung	9 357 404	11 520 365	8 651 867	15 448 205
10.	Kepulauan Riau	2 713 029	2 013 340	3 043 686	8 810 000
11.	DKI Jakarta	515 162 936	459 459 498	675 475 066	677 885 370
12.	Jawa Barat	70 081 405	73 404 323	73 564 738	58 245 148
13.	Jawa Tengah	79 475 022	95 871 360	106 225 059	99 766 182
14.	D I Yogyakarta	44 595 095	45 811 954	36 603 883	38 797 470
15.	Jawa Timur	148 638 032	176 559 903	133 587 974	120 081 924
16.	Banten	30 734 862	47 693 913	72 500 255	20 891 830
17.	B a l i	71 324 628	59 882 722	63 858 566	48 738 043
18.	Nusa Tenggara Barat	19 838 517	24 357 011	29 792 038	18 459 359
19.	Nusa Tenggara Timur	18 408 844	32 888 198	40 418 138	25 821 710
20.	Kalimantan Barat	166 639 948	120 979 151	33 529 205	35 942 515
21.	Kalimantan Tengah	9 065 199	9 674 080	10 680 538	9 934 994
22.	Kalimantan Selatan	20 001 837	29 197 146	27 535 065	25 460 405
23.	Kalimantan Timur	15 494 253	14 733 943	19 435 791	23 133 125
24.	Kalimantan Utara	0	0	129 871	0
25.	Sulawesi Utara	34 468 180	54 224 074	65 162 587	73 936 400
26.	Sulawesi Tengah	4 326 901	6 203 473	7 046 280	5 155 512
27.	Sulawesi Selatan	94 595 827	94 314 412	86 532 573	90 140 042
28.	Sulawesi Tenggara	18 244 034	17 728 744	13 243 197	11 971 877
29.	Gorontalo	1 967 050	4 072 218	6 081 260	6 000 000
30.	Sulawesi Barat	4 031 227	11 825 664	14 043 490	20 790 000
31.	M a l u k u	70 162 844	63 034 075	105 659 589	79 932 621
32.	Maluku Utara	41 852 324	50 092 679	58 938 273	66 388 300
33.	Papua Barat	1 206 600	1 076 531	903 364	1 622 250
34.	P a p u a	57 091 739	49 085 469	58 076 738	82 930 263
JUMLAH/TOTAL		1 705 308 478	1 689 511 259	1 875 861 563	1 800 332 857

*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2014-2017

TABEL 3.1.3 *ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM INCOME OF REGIONAL GOVERNMENT CORPORATE AND MANAGEMENT OF SEPARATED REGIONAL GOVERNMENT WEALTH THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017*

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	134 013 450	165 102 922	176 799 447	227 982 070
2.	Sumatera Utara	156 330 873	250 240 903	259 493 569	277 500 968
3.	Sumatera Barat	94 207 475	85 124 659	89 986 732	98 871 708
4.	R i a u	154 214 508	178 216 271	83 335 008	218 000 000
5.	J a m b i	32 219 309	33 956 073	26 979 273	37 495 287
6.	Sumatera Selatan	30 668 098	60 861 027	62 837 135	79 561 221
7.	Bengkulu	17 080 376	18 128 900	18 036 697	22 067 685
8.	Lampung	25 462 865	25 715 957	26 696 866	28 456 956
9.	Bangka Belitung	1 025 926	5 243 416	5 613 343	8 500 000
10.	Kepulauan Riau	0	3 740 233	0	2 000 000
11.	DKI Jakarta	465 979 963	527 280 486	303 204 424	453 338 246
12.	Jawa Barat	304 380 445	281 661 628	322 402 264	323 443 063
13.	Jawa Tengah	291 844 276	320 604 410	340 397 111	363 962 822
14.	D I Yogyakarta	48 247 880	52 502 632	57 333 771	59 711 580
15.	Jawa Timur	342 920 270	352 223 333	364 325 988	371 135 389
16.	Banten	42 421 275	42 436 400	50 083 829	49 700 000
17.	B a l i	89 747 348	105 388 683	172 408 362	104 276 269
18.	Nusa Tenggara Barat	55 670 167	63 229 182	72 827 612	92 558 485
19.	Nusa Tenggara Timur	63 445 963	71 557 012	77 139 883	71 550 000
20.	Kalimantan Barat	62 865 346	66 063 240	70 822 378	70 822 377
21.	Kalimantan Tengah	29 760 680	37 075 680	44 908 111	50 204 000
22.	Kalimantan Selatan	1 116 058	50 479 364	45 765 385	50 638 160
23.	Kalimantan Timur	309 599 926	230 816 058	167 385 378	161 561 830
24.	Kalimantan Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Utara	29 410 022	33 225 161	21 330 625	55 100 000
26.	Sulawesi Tengah	9 548 970	20 311 030	23 605 753	21 657 993
27.	Sulawesi Selatan	74 599 105	88 982 067	106 759 669	122 029 116
28.	Sulawesi Tenggara	23 315 540	22 653 081	23 412 409	23 450 508
29.	Gorontalo	1 946 292	3 181 275	2 101 314	4 000 000
30.	Sulawesi Barat	1 175 246	2 137 218	3 337 839	4 500 000
31.	M a l u k u	31 317 239	1 750 000	52 600 000	53 288 500
32.	Maluku Utara	634 494	0	871 595	871 595
33.	Papua Barat	14 364 750	7 725 389	32 210 768	33 600 000
34.	P a p u a	32 942 178	15 932 454	53 758 803	52 810 183
JUMLAH/TOTAL		2 972 476 313	3 223 546 144	3 158 771 341	3 594 646 011

*) Data APBD

TABEL 3.1.4 REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI LAIN-LAIN P.A.D. YANG SAH
 SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 3.1.4 ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOV. FROM OTHER ORIGINAL PROVINCIAL GOV.
 REVENUE THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	562 736 998	643 248 034	621 131 498	689 262 919	
2. Sumatera Utara	127 348 707	170 424 110	214 439 235	127 355 271	
3. Sumatera Barat	263 722 344	325 623 187	332 680 751	392 382 939	
4. Riau	577 109 907	704 395 399	596 899 922	503 800 000	
5. Jambi	223 872 398	177 625 305	180 108 299	144 883 221	
6. Sumatera Selatan	98 034 745	131 570 902	85 976 736	97 412 075	
7. Bengkulu	166 647 760	168 458 159	182 119 499	222 294 536	
8. Lampung	293 516 448	247 927 940	283 078 400	220 751 521	
9. Bangka Belitung	44 282 891	48 094 173	52 009 774	97 766 357	
10. Kepulauan Riau	61 427 156	54 857 377	84 093 790	91 770 000	
11. DKI Jakarta	3 242 123 963	3 622 510 233	4 296 140 463	5 126 969 755	
12. Jawa Barat	909 931 057	1 060 719 070	919 444 522	903 960 626	
13. Jawa Tengah	1 331 920 955	1 397 672 646	1 421 889 360	1 336 539 402	
14. DI Yogyakarta	80 097 558	97 023 974	139 240 024	120 695 862	
15. Jawa Timur	2 432 973 294	2 376 715 734	2 547 653 945	2 229 786 075	
16. Banten	201 632 128	196 033 168	125 431 964	151 924 187	
17. Bali	241 912 350	304 991 226	211 834 789	195 750 299	
18. Nusa Tenggara Barat	134 768 122	275 924 332	253 963 415	268 452 483	
19. Nusa Tenggara Timur	121 679 325	115 202 647	132 146 764	139 711 109	
20. Kalimantan Barat	48 759 103	56 135 684	135 684 138	121 512 613	
21. Kalimantan Tengah	127 251 745	108 925 838	161 223 841	178 975 100	
22. Kalimantan Selatan	481 661 553	564 651 421	558 811 675	443 998 271	
23. Kalimantan Timur	908 893 097	862 277 789	715 292 747	768 167 655	
24. Kalimantan Utara	11 833 885	64 310 670	257 895 521	10 250 000	
25. Sulawesi Utara	88 662 130	88 475 968	56 205 811	38 505 200	
26. Sulawesi Tengah	147 102 128	139 429 424	132 099 636	104 999 141	
27. Sulawesi Selatan	192 660 754	185 286 426	176 606 702	197 796 104	
28. Sulawesi Tenggara	100 544 797	110 226 467	139 870 795	80 350 132	
29. Gorontalo	30 869 807	21 307 396	22 446 075	20 300 000	
30. Sulawesi Barat	21 623 530	31 368 177	12 988 111	21 287 500	
31. Maluku	44 379 294	29 177 768	96 756 510	50 443 233	
32. Maluku Utara	15 121 168	13 189 882	13 976 570	54 887 005	
33. Papua Barat	61 492 985	83 583 500	53 569 248	105 800 357	
34. Papua	288 833 160	214 498 393	240 905 059	142 116 575	
JUMLAH/TOTAL	13 685 427 242	14 691 862 419	15 454 615 589	15 400 857 523	

*) Data APBD

TABEL 3.2 REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI DANA PERIMBANGAN SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 3.2 ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM BALANCED BUDGET THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	2 551 683 310	1 561 778 473	1 572 466 631	3 741 189 010	
2. Sumatera Utara	1 812 638 981	1 521 253 168	5 219 273 756	7 235 420 477	
3. Sumatera Barat	1 333 059 018	1 390 876 415	2 576 754 985	3 990 886 149	
4. Riau	4 231 808 634	2 548 627 473	3 824 481 733	5 120 242 596	
5. Jambi	1 514 518 389	1 419 079 798	1 398 290 199	2 766 192 135	
6. Sumatera Selatan	2 982 866 001	2 329 728 331	2 506 312 481	5 559 345 267	
7. Bengkulu	1 104 582 676	1 208 985 365	1 616 462 130	2 132 917 440	
8. Lampung	1 472 486 569	1 514 291 529	3 158 712 900	4 031 511 697	
9. Bangka Belitung	1 025 142 797	1 130 400 495	1 126 284 913	1 666 665 913	
10. Kepulauan Riau	1 664 959 883	1 246 121 773	1 464 904 580	2 096 085 459	
11. DKI Jakarta	9 677 533 225	5 887 267 645	15 271 661 453	18 770 211 233	
12. Jawa Barat	3 260 505 636	2 506 877 512	10 622 671 444	13 987 089 324	
13. Jawa Tengah	2 542 626 745	2 257 142 994	8 017 297 596	11 414 817 176	
14. DI Yogyakarta	1 013 811 390	1 021 886 268	1 697 108 536	2 461 741 044	
15. Jawa Timur	3 485 336 764	3 115 619 118	9 039 003 359	13 025 490 926	
16. Banten	1 159 872 633	976 787 586	3 185 553 941	4 118 564 461	
17. Bali	1 018 431 009	1 070 197 148	1 867 010 930	2 673 596 252	
18. Nusa Tenggara Barat	1 212 086 447	1 450 695 265	2 583 032 590	3 222 521 203	
19. Nusa Tenggara Timur	1 282 745 347	1 461 922 423	2 839 657 759	3 700 529 341	
20. Kalimantan Barat	1 531 868 903	1 644 655 328	1 860 789 738	3 413 705 136	
21. Kalimantan Tengah	1 557 416 499	1 673 376 687	1 878 977 521	2 615 492 050	
22. Kalimantan Selatan	1 523 714 616	1 576 111 339	2 095 330 205	2 457 435 611	
23. Kalimantan Timur	4 253 320 982	4 024 025 055	3 941 626 961	4 092 045 390	
24. Kalimantan Utara	1 228 625 713	910 439 345	1 579 537 874	1 653 232 452	
25. Sulawesi Utara	1 093 949 318	1 173 041 387	1 880 906 287	2 429 190 571	
26. Sulawesi Tengah	1 239 776 947	1 557 754 565	2 210 604 520	2 646 828 120	
27. Sulawesi Selatan	1 531 386 241	1 590 754 389	3 699 816 674	5 158 708 141	
28. Sulawesi Tenggara	1 236 016 579	1 383 850 900	2 037 098 802	2 748 755 754	
29. Gorontalo	800 313 829	934 046 394	1 232 492 165	1 467 294 144	
30. Sulawesi Barat	857 098 935	991 630 606	1 409 011 535	1 512 701 624	
31. Maluku	1 165 471 924	1 453 149 900	2 049 873 654	2 333 050 345	
32. Maluku Utara	1 089 674 339	1 303 829 596	1 453 204 504	1 907 792 409	
33. Papua Barat	2 783 645 235	2 496 263 895	3 221 910 435	3 196 319 386	
34. Papua	2 643 812 997	3 256 235 610	3 595 089 074	4 419 279 187	
JUMLAH/TOTAL	68 882 788 511	61 588 703 775	113 733 211 865	153 766 847 423	

*) Data APBD

**REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2014-2017**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM TAX SHARES THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	77 430 824	205 970 244	157 902 741	210 923 874
2.	Sumatera Utara	380 468 139	313 793 086	486 455 044	542 968 184
3.	Sumatera Barat	132 678 673	94 446 104	130 145 379	151 341 911
4.	R i a u	668 492 187	756 114 293	836 925 397	1 060 950 201
5.	J a m b i	194 972 088	179 892 405	69 691 960	201 857 776
6.	Sumatera Selatan	548 897 750	578 423 875	655 564 087	788 694 737
7.	Bengkulu	50 653 058	36 006 730	52 783 845	51 121 651
8.	Lampung	142 641 117	105 182 867	149 737 823	157 179 635
9.	Bangka Belitung	52 839 392	47 461 054	50 251 504	55 808 099
10.	Kepulauan Riau	203 987 983	167 100 440	239 662 553	278 152 627
11.	DKI Jakarta	9 279 068 989	5 751 741 853	12 030 019 209	15 485 632 231
12.	Jawa Barat	1 076 897 693	906 645 388	1 494 773 662	1 491 667 777
13.	Jawa Tengah	490 753 590	564 581 508	779 355 174	905 720 434
14.	D I Yogyakarta	70 324 850	60 016 641	113 024 693	132 293 519
15.	Jawa Timur	1 123 170 491	1 024 023 599	1 485 750 232	1 556 794 431
16.	Banten	415 270 933	313 708 987	489 941 664	629 840 260
17.	B a l i	144 532 786	104 103 309	171 994 343	205 864 211
18.	Nusa Tenggara Barat	149 750 882	134 132 452	327 753 815	185 190 482
19.	Nusa Tenggara Timur	74 913 781	56 298 222	88 320 888	86 258 843
20.	Kalimantan Barat	127 364 266	108 019 118	141 806 926	158 654 710
21.	Kalimantan Tengah	144 812 235	117 308 743	200 298 531	147 925 558
22.	Kalimantan Selatan	171 176 951	136 054 700	209 216 036	225 596 340
23.	Kalimantan Timur	662 727 209	639 155 369	690 750 462	762 711 562
24.	Kalimantan Utara	104 848 110	86 580 489	53 913 245	79 799 690
25.	Sulawesi Utara	69 660 411	52 779 724	91 228 190	91 681 055
26.	Sulawesi Tengah	62 083 121	53 911 018	64 668 487	96 854 232
27.	Sulawesi Selatan	218 129 274	170 370 403	231 803 625	247 924 112
28.	Sulawesi Tenggara	62 477 343	47 457 636	60 565 883	60 873 542
29.	Gorontalo	22 554 272	18 908 874	26 648 505	26 937 709
30.	Sulawesi Barat	27 843 302	22 547 630	27 854 106	25 354 542
31.	M a l u k u	66 624 446	51 135 352	53 981 312	83 185 048
32.	Maluku Utara	44 229 087	37 981 605	59 417 889	54 444 545
33.	Papua Barat	175 115 617	191 559 617	178 956 654	178 169 166
34.	P a p u a	244 216 931	196 894 225	277 042 212	309 397 335
JUMLAH/TOTAL		17 481 607 781	13 330 307 560	22 178 206 076	26 727 770 029

*) Data APBD

**REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM PEMERINTAH
PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2014-2017**
TABEL 3.2.2 TABLE ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM NON TAX SHARES / NATURAL RESOURCES THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	1 199 685 909	47 047 187	20 710 528	39 276 672	
2. Sumatera Utara	23 310 178	20 451 831	24 628 176	24 914 780	
3. Sumatera Barat	16 385 839	12 570 605	4 354 936	6 879 674	
4. Riau	2 698 594 353	1 074 930 738	827 647 310	938 495 645	
5. Jambi	321 853 079	172 076 759	176 500 909	164 661 894	
6. Sumatera Selatan	1 385 670 591	749 983 666	631 146 676	1 031 578 078	
7. Bengkulu	44 907 411	63 004 615	24 564 583	28 712 489	
8. Lampung	144 940 791	66 912 823	35 738 174	65 919 749	
9. Bangka Belitung	122 110 799	140 696 182	92 608 512	120 020 027	
10. Kepulauan Riau	721 284 492	340 540 412	282 046 399	221 928 988	
11. DKI Jakarta	312 478 954	135 525 792	358 563 870	135 607 124	
12. Jawa Barat	417 706 527	277 673 745	283 443 274	231 992 436	
13. Jawa Tengah	168 776 726	5 159 563	114 318 048	80 519 652	
14. DI Yogyakarta	6 431 380	2 240 865	40 736	6 498	
15. Jawa Timur	393 742 118	438 294 622	364 134 130	482 833 035	
16. Banten	3 573 210	5 308 548	3 552 366	5 375 019	
17. Bali	0	0	0	0	
18. Nusa Tenggara Barat	27 281 795	13 671 946	47 282 610	167 935 203	
19. Nusa Tenggara Timur	1 908 066	4 523 616	2 892 314	2 056 353	
20. Kalimantan Barat	51 092 301	45 457 841	25 728 625	71 324 874	
21. Kalimantan Tengah	198 245 696	202 946 136	142 581 089	163 537 809	
22. Kalimantan Selatan	596 622 189	804 921 470	835 291 936	167 341 832	
23. Kalimantan Timur	3 532 243 333	3 166 218 336	2 154 070 925	1 545 912 582	
24. Kalimantan Utara	1 094 988 347	112 663 608	115 570 656	229 642 913	
25. Sulawesi Utara	14 761 225	16 568 064	11 493 268	6 612 486	
26. Sulawesi Tengah	25 866 332	31 254 392	37 389 645	86 271 426	
27. Sulawesi Selatan	30 681 746	17 687 427	82 539 898	49 195 927	
28. Sulawesi Tenggara	61 153 215	73 569 737	37 088 482	38 199 559	
29. Gorontalo	1 106 059	1 857 909	1 290 744	6 753 468	
30. Sulawesi Barat	2 455 801	988 093	998 970	302 567	
31. Maluku	9 009 006	7 325 274	4 596 943	9 434 757	
32. Maluku Utara	64 198 612	57 983 593	27 346 253	51 567 258	
33. Papua Barat	1 425 049 229	928 248 703	1 230 768 226	1 219 715 760	
34. Papua	287 888 085	321 105 167	487 428 302	296 765 909	
JUMLAH/TOTAL	15 406 003 394	9 359 409 265	8 488 357 513	7 691 292 443	

*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2014-2017
TABEL 3.2.3 TABLE ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM GENERAL ALLOCATION FUNDS THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	1 201 612 787	1 237 894 986	1 263 870 989	1 930 152 204	
2. Sumatera Utara	1 349 132 276	1 139 261 371	1 604 505 673	2 638 744 012	
3. Sumatera Barat	1 129 886 306	1 221 128 606	1 261 915 864	2 067 838 337	
4. Riau	820 984 584	654 220 250	738 378 737	1 434 458 151	
5. Jambi	948 337 712	1 009 165 864	1 070 452 478	1 432 088 270	
6. Sumatera Selatan	985 542 760	931 915 470	1 071 421 391	1 721 811 481	
7. Bengkulu	955 095 187	1 046 080 820	1 070 751 292	1 354 429 212	
8. Lampung	1 136 053 041	1 097 129 439	1 321 679 032	1 906 179 170	
9. Bangka Belitung	806 820 146	897 887 443	905 526 208	1 035 119 230	
10. Kepulauan Riau	698 009 318	695 943 711	866 810 696	1 043 954 307	
11. DKI Jakarta	85 985 282	0	0	0	
12. Jawa Barat	1 687 686 386	1 303 654 355	1 248 112 172	2 992 041 501	
13. Jawa Tengah	1 803 931 189	1 629 429 283	1 859 907 223	3 688 746 159	
14. DI Yogyakarta	899 923 550	920 544 722	940 835 434	1 380 356 648	
15. Jawa Timur	1 866 548 185	1 587 261 707	1 672 878 372	3 687 183 876	
16. Banten	728 490 012	640 981 003	693 738 580	1 105 821 476	
17. Bali	832 297 473	831 597 268	850 144 224	1 311 447 133	
18. Nusa Tenggara Barat	980 390 340	1 088 633 717	1 117 691 709	1 496 972 550	
19. Nusa Tenggara Timur	1 131 687 590	1 300 445 875	1 337 091 848	1 782 981 159	
20. Kalimantan Barat	1 290 222 856	1 405 594 169	1 493 486 253	1 667 449 642	
21. Kalimantan Tengah	1 152 428 738	1 280 595 848	1 294 850 243	1 612 657 546	
22. Kalimantan Selatan	701 725 536	571 244 699	779 517 454	1 111 200 737	
23. Kalimantan Timur	57 312 515	0	80 402 179	649 653 899	
24. Kalimantan Utara	20 567 986	651 247 428	1 032 459 159	1 032 459 159	
25. Sulawesi Utara	949 852 622	1 026 948 809	1 065 545 204	1 340 353 014	
26. Sulawesi Tengah	1 087 885 014	1 221 602 865	1 272 925 036	1 493 238 032	
27. Sulawesi Selatan	1 209 598 741	1 180 010 167	1 394 148 361	2 266 264 600	
28. Sulawesi Tenggara	1 053 636 011	1 176 423 577	1 200 634 199	1 602 253 856	
29. Gorontalo	734 279 438	845 395 651	884 557 753	1 019 780 418	
30. Sulawesi Barat	776 214 122	895 580 933	925 147 622	977 903 640	
31. Maluku	1 019 704 312	1 177 774 674	1 260 897 986	1 465 641 669	
32. Maluku Utara	906 623 550	1 061 177 950	1 132 578 857	1 219 425 902	
33. Papua Barat	1 122 264 659	1 284 079 495	1 322 765 639	1 378 805 557	
34. Papua	1 991 202 341	2 277 932 698	2 502 449 137	2 570 118 273	
JUMLAH/TOTAL	34 121 932 565	35 288 784 853	38 538 077 004	55 417 530 820	

*) Data APBD

**REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2014-2017**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM SPECIAL ALLOCATION FUNDS
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	72 953 790	70 866 056	129 982 373	1 560 836 260
2.	Sumatera Utara	59 728 388	47 746 880	3 103 684 863	4 028 793 501
3.	Sumatera Barat	54 108 200	62 731 100	1 180 338 806	1 764 826 227
4.	R i a u	43 737 510	63 362 192	1 421 530 289	1 686 338 599
5.	J a m b i	49 355 510	57 944 770	81 644 852	967 584 195
6.	Sumatera Selatan	62 754 900	69 405 320	148 180 327	2 017 260 971
7.	Bengkulu	53 927 020	63 893 200	468 362 410	698 654 088
8.	Lampung	48 851 620	245 066 400	1 651 557 871	1 902 233 143
9.	Bangka Belitung	43 372 460	44 355 816	77 898 689	455 718 557
10.	Kepulauan Riau	41 678 090	42 537 210	76 384 932	552 049 537
11.	DKI Jakarta	0	0	2 883 078 374	3 148 971 878
12.	Jawa Barat	78 215 030	18 904 024	7 596 342 336	9 271 387 610
13.	Jawa Tengah	79 165 240	57 972 640	5 263 717 151	6 739 830 931
14.	D I Yogyakarta	37 131 610	39 084 040	643 207 673	949 084 379
15.	Jawa Timur	101 875 970	66 039 190	5 516 240 625	7 298 679 584
16.	Banten	12 538 478	16 789 048	1 998 321 331	2 377 527 706
17.	B a l i	41 600 750	134 496 571	844 872 363	1 156 284 908
18.	Nusa Tenggara Barat	54 663 430	214 257 150	1 090 304 456	1 372 422 968
19.	Nusa Tenggara Timur	74 235 910	100 654 710	1 411 352 709	1 829 232 986
20.	Kalimantan Barat	63 189 480	85 584 200	199 767 934	1 516 275 910
21.	Kalimantan Tengah	61 929 830	72 525 960	241 247 658	691 371 137
22.	Kalimantan Selatan	54 189 940	63 890 470	271 304 779	953 296 702
23.	Kalimantan Timur	1 037 925	218 651 350	1 016 403 395	1 133 767 347
24.	Kalimantan Utara	8 221 270	59 947 820	377 594 814	311 330 690
25.	Sulawesi Utara	59 675 060	76 744 790	712 639 625	990 544 016
26.	Sulawesi Tengah	63 942 480	250 986 290	835 621 352	970 464 430
27.	Sulawesi Selatan	72 976 480	222 686 392	1 991 324 790	2 595 323 502
28.	Sulawesi Tenggara	58 750 010	86 399 950	738 810 238	1 047 428 797
29.	Gorontalo	42 374 060	67 883 960	319 995 163	413 822 549
30.	Sulawesi Barat	50 585 710	72 513 950	455 010 837	509 140 875
31.	M a l u k u	70 134 160	216 914 600	730 397 413	774 788 871
32.	Maluku Utara	74 623 090	146 686 448	233 861 505	582 354 704
33.	Papua Barat	61 215 730	92 376 080	489 419 916	419 628 903
34.	P a p u a	120 505 640	460 303 520	328 169 423	1 242 997 670
JUMLAH/TOTAL		1 873 244 771	3 610 202 097	44 528 571 272	63 930 254 131

*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 3.3 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 3.3 ACTUAL OTHER LEGAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	7 323 510 565	8 146 549 410	8 731 916 399	8 323 694 652	
2. Sumatera Utara	1 542 578 307	2 075 625 166	266 512 073	9 533 902	
3. Sumatera Barat	573 556 459	784 639 771	83 770 585	75 586 312	
4. Riau	655 513 513	885 457 235	7 788 800	2 975 000	
5. Jambi	369 297 931	469 401 998	613 392 580	4 459 891	
6. Sumatera Selatan	846 596 523	1 126 169 318	1 530 290 904	3 737 969	
7. Bengkulu	209 591 850	270 393 009	7 545 021	2 871 090	
8. Lampung	779 360 150	1 025 674 292	61 213 360	43 058 000	
9. Bangka Belitung	131 522 785	184 795 250	249 323 167	10 000 000	
10. Kepulauan Riau	184 017 160	255 169 657	348 308 850	1 128 708	
11. DKI Jakarta	2 872 551 450	4 635 793 708	1 625 027 272	2 207 725 600	
12. Jawa Barat	4 012 294 085	5 470 246 924	28 468 563	29 690 800	
13. Jawa Tengah	2 698 475 028	3 666 185 188	74 249 821	85 540 443	
14. DI Yogyakarta	661 455 536	785 017 774	528 335 253	869 490 392	
15. Jawa Timur	2 844 930 590	3 710 183 435	105 324 093	7 500 000	
16. Banten	1 009 434 538	1 378 695 564	7 684 820	5 670 000	
17. Bali	638 830 684	856 471 397	340 811 566	298 576 375	
18. Nusa Tenggara Barat	462 280 398	623 724 600	7 120 189	67 264 822	
19. Nusa Tenggara Timur	741 505 872	971 431 752	40 710 285	18 163 129	
20. Kalimantan Barat	566 290 317	725 949 265	969 299 982	7 500 000	
21. Kalimantan Tengah	318 570 125	404 401 620	511 223 329	143 912 195	
22. Kalimantan Selatan	370 745 061	485 923 522	623 250 474	40 006 851	
23. Kalimantan Timur	369 393 935	490 741 037	14 736 113	19 402 000	
24. Kalimantan Utara	272 893 280	163 895 702	245 493 358	5 000 000	
25. Sulawesi Utara	289 179 538	341 971 722	23 235 274	50 839 733	
26. Sulawesi Tengah	375 838 517	438 895 893	25 996 330	18 126 598	
27. Sulawesi Selatan	942 652 926	1 244 232 195	13 210 709	19 047 872	
28. Sulawesi Tenggara	353 600 428	420 458 837	16 320 000	52 551 174	
29. Gorontalo	126 815 450	165 720 668	40 592 247	8 000 000	
30. Sulawesi Barat	159 438 150	208 611 975	1 909 187	2 113 687	
31. Maluku Utara	232 132 491	288 625 228	94 287 818	7 724 040	
32. Papua Barat	215 843 636	261 364 513	288 941 526	469 674 420	
33. Papua	2 672 028 269	3 021 289 926	3 179 665 083	3 289 278 685	
34. Papua	7 121 076 261	7 636 623 431	7 953 017 782	8 241 316 931	
JUMLAH/TOTAL	42 943 801 808	53 620 330 982	28 658 972 813	24 441 161 271	

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 3.B (ribu rupiah), 2014-2017
ACTUAL FINANCING RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	1 399 323 697	916 943 238	288 676 554	441 760 666	
2. Sumatera Utara	51 426 062	14 897 906	536 275 841	942 102 186	
3. Sumatera Barat	240 276 961	274 104 643	251 496 991	135 000 000	
4. Riau	1 451 086 907	3 981 811 287	3 132 206 277	2 149 132 445	
5. Jambi	514 103 467	474 526 425	177 910 338	178 583 989	
6. Sumatera Selatan	10 179 492	39 970 123	44 860 613	25 000 000	
7. Bengkulu	210 176 309	255 524 824	136 086 530	321 632 583	
8. Lampung	41 141 205	111 474 702	102 511 595	84 143 083	
9. Bangka Belitung	201 966 080	325 653 645	337 693 794	315 544 386	
10. Kepulauan Riau	538 524 513	136 340 165	0	159 339 365	
11. DKI Jakarta	7 593 994 776	9 209 781 909	5 607 751 958	7 725 828 000	
12. Jawa Barat	3 586 471 831	4 551 871 625	3 650 427 200	2 200 000 000	
13. Jawa Tengah	1 689 438 285	1 689 436 792	417 920 564	200 000 000	
14. DI Yogyakarta	389 527 178	511 093 118	370 879 688	216 006 693	
15. Jawa Timur	1 846 787 127	2 450 199 381	1 565 113 939	715 000 000	
16. Banten	1 069 804 863	1 907 994 208	1 130 074 819	559 063 064	
17. Bali	1 039 709 937	905 741 327	674 677 370	505 067 015	
18. Nusa Tenggara Barat	13 828 458	198 747 835	198 662 806	237 599 598	
19. Nusa Tenggara Timur	235 104 724	254 559 323	165 206 704	122 953 958	
20. Kalimantan Barat	127 744 740	134 600 710	9 088 795	85 000 000	
21. Kalimantan Tengah	386 719 707	294 181 384	39 349 626	62 364 824	
22. Kalimantan Selatan	863 395 088	753 331 196	382 577 990	65 000 000	
23. Kalimantan Timur	1 050 356 119	0	226 681 021	0	
24. Kalimantan Utara	313 461 401	1 184 448 976	735 234 472	905 000 000	
25. Sulawesi Utara	249 382 344	290 708 660	100 583 942	45 969 700	
26. Sulawesi Tengah	147 909 346	135 829 773	77 436 672	55 415 177	
27. Sulawesi Selatan	339 681 251	309 744 921	129 955 474	383 532 049	
28. Sulawesi Tenggara	331 004 017	415 300 941	450 595 338	161 377 575	
29. Gorontalo	92 443 365	87 002 816	68 395 981	10 415 470	
30. Sulawesi Barat	129 254 556	0	125 838 418	175 167 041	
31. Maluku	89 519 602	171 947 602	86 709 213	20 000 000	
32. Maluku Utara	24 141 586	54 882 268	38 870 415	120 000 000	
33. Papua Barat	1 334 408 797	1 665 917 453	516 616 637	365 093 355	
34. Papua	833 202 864	1 180 864 548	503 495 889	1 190 000 000	
JUMLAH/TOTAL	28 435 496 655	34 889 433 724	22 279 863 464	20 878 092 222	

*) Data APBD

TABEL

TABLE 4.

TABEL 4
TABLE

REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	30 925 017 579	38 807 912 341	41 420 506 302	77 691 661 339
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	45 111 554	61 277 821	55 672 199	95 188 159
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	31 757 432	694 262 769	947 977 814	3 324 580 148
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	33 018 207 958	39 957 250 083	53 831 992 474	51 090 706 312
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	1 640 604 334	3 029 787 495	3 404 874 370	3 449 704 803
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	31 842 794 308	32 794 183 403	35 733 513 393	37 619 973 645
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	26 086 116 602	27 729 825 183	22 465 736 129	22 096 641 048
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	168 076 466	81 266 609	61 684 429	941 385 687
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	7 216 339 267	6 429 833 490	7 366 638 255	8 995 849 364
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	51 521 457 321	52 297 824 333	54 033 172 998	68 003 215 757
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	36 839 387 037	45 158 055 320	44 776 710 219	55 763 470 363
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>					
JUMLAH/TOTAL		261 712 905 009	277 595 813 274	297 851 059 459	340 080 305 420

*) Data APBD

TABEL 4.1 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS
TABLE 4.1 **PENGELUARAN (ribu rupiah), 2014-2017**
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		5 580 074 906	5 643 598 833	6 028 564 353	7 272 664 778
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		870 169 543	899 104 777	928 936 862	2 377 917 451
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		693 008 973	643 933 200	1 167 158 912	677 188 600
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		309 012 899	250 088 300	228 993 000	206 251 075
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		298 490 577	503 280 080	659 116 002	570 627 504
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		3 407 472 166	3 343 547 380	3 035 461 375	3 410 680 148
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		1 920 748	3 645 096	8 898 202	30 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		6 465 772 436	6 505 823 422	6 091 148 844	7 461 035 204
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		364 456 742	435 005 438	421 302 251	537 012 020
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		3 703 813 328	4 045 714 495	3 384 994 292	4 394 818 072
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		2 397 502 366	2 025 103 489	2 284 852 301	2 529 205 112
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		959 801 070	461 684 483	533 527 331	0
JUMLAH/TOTAL		13 005 648 412	12 611 106 738	12 653 240 528	14 733 699 982

*) Data APBD

TABEL 4.2 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.2 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		5 371 411 832	5 886 083 698	7 037 202 955	8 661 188 766
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 008 161 979	1 055 299 207	1 115 950 650	3 037 330 274	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 611 718 257	2 094 026 766	3 010 055 530	3 620 208 919	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	1 065 000		0	0	0
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	1 692 809 639	2 330 828 370	2 774 649 016	1 982 455 819	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 053 174 611	405 929 355	134 545 437	2 443 754	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	4 482 346		0	2 002 322	18 750 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	2 437 145 478	2 073 083 486	2 439 220 960	4 373 495 526	
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	144 540 209	151 092 148	150 934 731	121 913 823	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 146 633 041	989 746 989	1 268 431 086	2 154 412 517	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 145 972 228	932 244 349	1 019 855 143	2 097 169 186	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	14 897 905	536 489 675	1 500 470 856	78 000 000	
JUMLAH/TOTAL	7 823 455 215	8 495 656 859	10 976 894 771	13 112 684 292	

*) Data APBD

TABEL 4.3 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.3 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 831 872 717	2 359 421 523	2 600 444 061	4 186 773 954
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	598 043 410	672 707 253	685 822 983	2 273 447 378	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	591 642 080	894 816 808	1 079 238 247	1 088 582 600	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	0	0	0	0	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	546 614 466	669 370 829	698 437 478	710 893 585	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	94 969 449	122 483 415	135 581 771	108 850 391	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	603 312	43 218	1 363 582	5 000 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 651 799 638	1 662 835 437	1 903 593 198	2 039 203 000
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	116 677 136	100 029 258	18 302 036	23 472 960	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	749 234 578	774 656 224	895 361 390	1 065 294 013	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	785 887 924	788 149 955	989 929 772	950 436 027	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		392 442 367	304 096 991	372 134 278	20 000 000
JUMLAH/TOTAL		3 876 114 722	4 326 353 951	4 876 171 537	6 245 976 954

*) Data APBD

TABEL 4.4 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELOUARAN
 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.4 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY KIND OF
 EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		3 431 470 705	4 133 737 638	4 457 822 880	5 404 312 111
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		937 258 185	979 663 542	1 007 962 484	2 311 534 133
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		751 853 825	936 850 423	1 303 798 175	1 015 273 600
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		13 015 000	855 180	6 649 300	10 000 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		1 614 630 539	1 233 314 138	1 192 559 065	1 390 025 921
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		114 713 156	983 054 355	945 142 048	565 920 132
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		0	0	1 711 808	111 558 325
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		2 170 603 791	3 627 234 830	4 274 115 270	5 603 837 930
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		188 187 847	215 518 119	287 834 567	432 504 511
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		1 358 771 642	1 397 229 026	1 950 644 869	2 625 348 904
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		623 644 302	2 014 487 685	2 035 635 834	2 545 984 515
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		3 981 422 303	3 131 883 625	1 343 194 800	0
JUMLAH/TOTAL		9 583 496 799	10 892 856 093	10 075 132 950	11 008 150 041

*) Data APBD

TABEL 4.5 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS
TABLE 4.5 *ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiah), 2014-2017*

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 483 115 535	1 762 391 117	1 649 327 433	2 373 133 364
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		480 217 430	552 244 225	570 140 805	1 004 988 139
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		380 761 572	622 071 193	678 057 205	647 306 190
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		19 518 750	0	0	0
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		462 356 647	467 708 760	399 535 722	550 366 384
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		138 550 780	119 320 829	1 500 245	158 280 251
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		1 710 356	1 046 110	93 456	12 192 400
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 721 517 300	1 663 174 974	1 645 157 536	1 969 175 441
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		90 004 993	110 945 007	122 473 126	177 988 109
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		813 453 043	760 927 878	577 145 403	780 068 371
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		818 059 264	791 302 089	945 539 007	1 011 118 961
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		474 526 425	178 679 152	87 399 833	0
JUMLAH/TOTAL		3 679 159 260	3 604 245 243	3 381 884 802	4 342 308 805

*) Data APBD

TABEL 4.6 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.6 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		4 010 626 533	3 108 721 120	3 564 656 085	3 669 905 266
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		752 819 177	776 889 350	655 041 326	1 400 613 628
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		1 574 378 204	1 638 104 118	2 041 107 498	1 707 294 054
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		513 384	380 000	226 252	600 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		268 508 790	115 950 085	239 086 976	445 000 000
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		1 413 549 040	576 359 567	629 014 033	111 997 584
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		857 938	1 038 000	180 000	4 400 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 760 106 497	2 081 477 692	1 397 916 246	3 272 976 140
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		23 441 741	5 368 504	4 314 166	6 964 061
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		1 005 053 067	1 035 087 257	785 861 153	1 342 928 970
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		731 611 689	1 041 021 931	607 740 927	1 923 083 109
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		476 814 225	840 195 373	1 665 069 212	1 669 138 533
JUMLAH/TOTAL		6 247 547 255	6 030 394 185	6 627 641 543	8 612 019 939

*) Data APBD

TABEL 4.7 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS
TABLE 4.7 *ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiah), 2014-2017*

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		908 754 313	1 069 307 495	1 094 260 686	1 674 625 192
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	450 265 493	493 881 157	482 269 227	975 543 934	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	225 782 948	361 930 070	370 456 153	385 302 209	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	0	0	0	0	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	211 055 929	211 928 326	239 805 950	294 245 598	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	21 144 500	1 567 942	1 729 356	14 533 451	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	505 443	0	0	5 000 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 025 967 285	1 213 037 385	935 429 609	1 670 332 470
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	96 977 553	107 604 273	82 249 055	55 779 027	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	623 936 194	626 251 826	467 212 695	603 962 017	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	305 053 538	479 181 286	385 967 859	1 010 591 426	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		261 693 705	153 858 701	461 960 120	18 000 000
JUMLAH/TOTAL		2 196 415 303	2 436 203 581	2 491 650 415	3 362 957 662

*) Data APBD

TABEL 4.8 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS
TABLE 4.8 *ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiah), 2014-2017*

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		2 144 560 815	2 584 515 351	3 337 212 484	4 461 638 214
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		544 114 850	700 857 892	743 620 265	1 662 465 214
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		847 424 324	1 092 450 979	1 450 803 388	1 507 323 000
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		4 521 800	6 409 900	2 587 280	6 000 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		723 095 813	762 543 531	1 089 846 007	1 181 000 000
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		20 173 866	22 253 049	46 368 544	76 850 000
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		5 230 162	0	3 987 000	28 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		2 309 626 502	2 196 686 698	2 139 709 112	2 341 290 041
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		109 214 896	90 380 434	95 685 684	135 364 090
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		1 274 956 923	1 237 307 069	1 038 243 623	1 073 398 133
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		925 454 683	868 999 195	1 005 779 805	1 132 527 818
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		113 486 180	117 581 142	214 312 510	5 000 000
JUMLAH/TOTAL		4 567 673 497	4 898 783 191	5 691 234 106	6 807 928 255

*) Data APBD

TABEL 4.9 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.9 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		855 780 981	1 080 851 837	1 209 394 930	1 489 821 437
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	274 339 635	312 375 890	396 188 131	710 654 094	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	167 022 783	257 790 335	403 743 237	311 439 900	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	745 500	666 700	717 060	943 000	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	212 859 717	303 413 475	156 076 110	344 731 978	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	200 796 461	206 510 261	251 916 010	116 755 422	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	16 885	95 176	754 382	5 297 043	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		740 305 877	789 106 649	860 473 362	1 176 302 018
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	70 712 734	81 446 273	99 564 291	148 234 646	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	364 039 655	473 942 523	531 132 089	579 449 190	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	305 553 488	233 717 853	229 776 982	448 618 182	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		325 473 641	342 693 794	217 692 026	5 000 000
JUMLAH/TOTAL		1 921 560 499	2 212 652 280	2 287 560 318	2 671 123 455

*) Data APBD

TABEL 4.10 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.10 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 213 820 569	1 219 616 966	1 493 246 117	1 451 119 063
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		252 064 813	281 351 911	304 724 044	554 419 169
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		470 786 270	485 780 546	419 287 000	388 489 000
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		40 688 431	58 079 160	13 576 941	5 557 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		252 894 344	315 613 621	742 700 704	480 179 521
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		197 356 711	78 215 728	12 636 714	22 224 373
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		30 000	576 000	320 714	250 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		2 098 638 305	1 385 777 170	1 288 872 343	1 909 779 128
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		183 736 097	163 651 073	158 890 339	230 248 104
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		1 196 907 727	880 841 202	842 466 564	1 105 587 652
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		717 994 481	341 284 895	287 515 440	573 943 372
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		145 250 971	44 384 283	70 496 323	0
JUMLAH/TOTAL		3 457 709 845	2 649 778 419	2 852 614 783	3 360 898 191

*) Data APBD

TABEL 4.11
TABLE

**REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2014-2017**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		12 631 884 602	20 707 205 013	22 784 925 586	28 055 746 848
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	10 472 324 237	15 866 062 897	17 044 063 148	20 140 729 686	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	1 218 529	5 478 640	11 739 277	49 226 438	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	659 081 781	903 898 737	3 234 116 848	
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 462 044 387	1 717 428 916	2 161 217 950	1 458 036 810	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	680 155 340	2 087 123 200	2 452 948 130	2 499 348 722	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	0	0	0	0	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	14 005 707	371 152 504	210 314 034	348 804 150	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 136 402	877 075	744 310	325 484 194	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		25 167 779 696	22 324 117 934	24 343 884 660	35 556 556 458
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	2 132 264 555	1 446 281 119	2 315 743 866	3 066 783 558	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	12 624 396 751	10 633 820 106	13 062 670 779	16 608 666 979	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	10 411 118 390	10 244 016 709	8 965 470 015	15 881 105 921	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		13 618 631 039	10 387 697 130	12 263 648 025	6 579 654 898
JUMLAH/TOTAL		51 418 295 337	53 419 020 077	59 392 458 271	70 191 958 204

*) Data APBD

TABEL 4.12 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS
TABLE 4.12 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY KIND OF
 PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
 EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		16 958 816 394	19 256 280 146	21 748 500 642	26 208 737 552
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		1 569 541 693	1 671 229 143	1 835 034 493	5 054 514 042
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		6 805 400	18 990 870	14 999 772	15 000 000
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		6 179 782 846	6 826 862 952	9 854 923 609	10 382 158 832
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		2 871 320	3 048 750	9 940 000	38 479 445
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		5 461 539 028	6 406 192 658	6 393 271 240	6 408 516 457
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		3 738 146 028	4 329 955 773	3 640 311 644	4 249 268 776
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		130 079	0	19 884	60 800 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		3 839 172 071	5 161 325 715	5 873 463 825	6 220 288 490
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		304 590 204	223 252 161	233 811 805	287 984 627
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		2 174 779 252	2 639 397 429	2 780 296 396	3 640 712 429
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		1 359 802 615	2 298 676 125	2 859 355 624	2 291 591 434
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		5 099 436 397	4 144 246 614	3 722 497 854	311 875 000
JUMLAH/TOTAL		25 897 424 862	28 561 852 475	31 344 462 321	32 740 901 042

*) Data APBD

TABEL 4.13 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS
TABLE 4.13 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY KIND OF
 EXPENDITURE (ribu rupiah), 2014-2017
 EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		10 646 904 181	12 396 063 966	13 717 072 629	17 390 342 088
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		1 726 640 884	2 186 704 012	2 239 684 000	5 719 852 846
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		2 963 856 035	3 745 182 609	5 246 848 625	4 943 528 652
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		23 281 040	18 715 300	36 531 500	248 562 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		3 263 403 899	4 130 087 481	4 088 437 192	4 398 826 211
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		2 661 510 573	2 303 371 333	2 100 703 904	2 059 572 379
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		8 211 750	12 003 231	4 867 408	20 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		4 439 160 853	5 424 696 529	5 637 302 196	5 973 175 937
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		470 795 604	294 192 183	328 192 391	503 732 895
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		2 397 685 838	2 615 822 791	2 493 431 626	3 619 124 924
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		1 570 679 411	2 514 681 555	2 815 678 179	1 850 318 118
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		1 760 833 255	696 830 292	696 122 876	304 000 000
JUMLAH/TOTAL		16 846 898 289	18 517 590 787	20 050 497 701	23 667 518 025

*) Data APBD

TABEL 4.14 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.14 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 560 157 356	1 810 940 127	1 998 595 550	2 779 012 766
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		512 498 971	540 817 462	570 939 445	1 316 547 065
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		441 914 970	562 260 179	727 099 422	719 522 034
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		9 919 078	7 073 500	1 919 000	2 091 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		472 309 827	583 092 613	611 852 157	601 307 079
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		121 560 575	117 696 373	86 724 508	114 625 863
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		1 953 935	0	61 018	24 919 725
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 420 910 964	1 685 485 375	1 849 367 416	2 421 373 245
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		111 425 291	128 727 296	136 990 455	185 780 385
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		867 039 199	929 155 893	875 503 249	1 195 029 683
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		442 446 474	627 602 186	836 873 712	1 040 563 177
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		548 330 738	414 682 428	422 109 707	4 000 000
JUMLAH/TOTAL		3 529 399 058	3 911 107 930	4 270 072 673	5 204 386 011

*) Data APBD

TABEL 4.15 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS
TABLE 4.15 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF**
EXPENDITURE (thousand rupiah), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		13 700 106 993	15 074 834 724	16 380 714 234	18 639 858 407
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		1 623 569 154	1 805 820 309	2 327 052 985	5 891 426 841
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		3 921 186	2 761 252	1 753 220	840 044
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		4 673 473 427	5 412 737 369	7 220 422 955	6 430 091 440
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		8 434 380	8 130 227	8 747 792	10 000 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		4 934 876 836	4 667 452 412	5 015 881 821	5 174 885 021
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		2 362 512 570	3 149 506 610	1 787 383 314	1 032 615 061
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		93 319 440	28 426 545	19 472 147	100 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		6 306 212 284	7 871 472 846	7 479 239 692	9 599 802 574
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		656 587 346	662 267 949	562 836 333	651 596 263
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		4 442 168 317	4 950 884 825	4 765 809 248	6 308 768 624
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		1 207 456 621	2 258 320 072	2 150 594 111	2 639 437 687
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		2 612 951 724	1 732 342 039	2 667 282 490	408 333 333
JUMLAH/TOTAL		22 619 271 001	24 678 649 609	26 527 236 416	28 647 994 314

*) Data APBD

TABEL 4.16 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS
TABLE 4.16 **REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS**
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		4 013 607 703	4 758 963 213	5 835 995 714	6 936 624 336
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		481 328 441	544 637 409	594 410 665	1 587 691 144
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		1 244 666 640	1 500 205 771	2 493 536 667	2 376 144 610
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		86 602 000	131 217 500	131 544 393	138 877 500
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		1 764 024 523	1 920 559 281	2 063 821 141	2 184 014 250
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		436 986 099	657 845 799	552 584 088	613 846 832
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		0	4 497 453	98 760	36 050 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		2 178 547 864	3 325 176 946	3 089 817 728	3 413 362 206
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		144 776 980	156 935 313	134 390 258	213 992 374
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		1 342 286 491	1 732 271 926	1 621 293 887	1 683 721 266
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		691 484 393	1 435 969 707	1 334 133 583	1 515 648 566
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		1 946 082 208	1 152 074 818	860 656 872	0
JUMLAH/TOTAL		8 138 237 775	9 236 214 977	9 786 470 314	10 349 986 542

*) Data APBD

TABEL 4.17 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENGELOUARAN
 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.17 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY KIND OF
 EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		3 151 101 687	3 483 142 655	3 857 588 697	4 842 048 376
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		715 280 041	733 564 306	753 993 266	1 830 777 811
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		10 000 000	9 819 600	9 990 000	10 000 000
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		867 202 764	809 295 976	1 116 809 328	1 073 267 400
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		147 024 713	151 729 625	155 774 827	12 640 400
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		910 123 410	1 088 091 712	1 026 250 938	1 091 363 071
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		497 128 613	690 452 391	794 578 161	813 999 694
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		4 342 146	189 045	192 177	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 340 543 869	1 515 888 269	1 563 344 832	1 812 263 921
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		62 150 385	83 696 356	96 558 764	19 382 321
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		907 808 176	869 956 280	735 861 830	1 086 822 900
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		370 585 308	562 235 633	730 924 238	706 058 700
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		1 125 742 772	874 677 370	502 761 595	73 458 345
JUMLAH/TOTAL		5 617 388 328	5 873 708 294	5 923 695 124	6 727 770 642

*) Data APBD

TABEL 4.18 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.18 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 558 834 866	1 731 408 033	2 273 102 493	2 917 302 636
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		502 984 121	564 302 754	488 238 252	1 383 300 712
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		248 496	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		536 698 599	686 038 528	1 209 997 934	980 897 000
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		25 477 063	30 622 895	95 288 393	17 455 319
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		454 803 323	435 441 046	462 284 296	531 938 554
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		38 517 986	12 762 278	13 234 650	3 711 051
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		105 278	2 240 532	4 058 968	0
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 055 265 236	1 633 495 638	1 491 199 458	2 025 151 681
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		89 028 411	121 707 586	96 402 736	142 365 787
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		543 439 395	677 203 973	698 115 076	932 201 263
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		422 797 430	834 584 079	696 681 646	950 584 631
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		189 155 598	282 429 796	384 357 653	86 540 640
JUMLAH/TOTAL		2 803 255 700	3 647 333 467	4 148 659 604	5 028 994 957

*) Data APBD

TABEL 4.19 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.19 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 734 235 032	2 044 792 233	2 393 234 089	3 011 483 032
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	464 325 697	506 293 029	542 985 141	1 222 020 641	
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0	
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0	
4. Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	932 596 147	1 171 350 214	1 472 015 600	1 348 419 750	
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	22 191 490	20 957 580	10 848 900	23 151 000	
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	267 099 625	317 680 998	346 786 046	406 968 396	
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	29 252 565	27 459 614	19 448 994	3 423 245	
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	18 769 508	1 050 798	1 149 408	7 500 000	
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		958 813 561	1 283 703 881	1 309 678 361	1 651 707 535
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	77 667 705	90 070 776	101 681 932	146 775 214	
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	473 545 067	586 930 890	605 697 383	922 140 942	
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	407 600 789	606 702 215	602 299 046	582 791 379	
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		329 644 828	241 732 624	337 848 419	182 500 000
JUMLAH/TOTAL		3 022 693 421	3 570 228 738	4 040 760 869	4 845 690 567

*) Data APBD

TABEL 4.20 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.20 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		2 064 408 105	2 615 246 070	2 728 184 377	2 701 044 997
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		546 771 365	644 818 816	662 457 323	1 142 627 756
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		666 837 274	802 457 462	1 043 728 486	854 992 300
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		252 000	1 895 000	410 000	720 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		435 940 603	845 411 837	681 158 346	695 683 647
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		414 606 863	320 662 955	340 430 222	2 021 294
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		0	0	0	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 588 506 036	1 508 390 153	1 592 434 416	2 364 350 283
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		151 348 580	149 317 200	109 290 968	133 245 837
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		946 938 051	990 530 746	1 008 338 792	1 292 472 348
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		490 219 405	368 542 207	474 804 656	938 632 098
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		194 600 710	84 111 430	182 898 714	115 000 000
JUMLAH/TOTAL		3 847 514 851	4 207 747 653	4 503 517 507	5 180 395 280

*) Data APBD

TABEL 4.21 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.21 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 485 025 739	1 649 116 750	1 632 582 444	2 422 412 547
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		385 757 112	434 769 090	502 777 468	1 284 287 554
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	102 500	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		13 704 956	1 779 018	1 163 230	1 163 300
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		332 463 903	604 198 436	582 192 380	437 578 149
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		69 886 615	67 090 690	32 735 415	43 165 642
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		527 398 945	372 558 292	510 062 774	597 917 902
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		154 846 272	165 953 964	3 548 677	38 300 000
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		967 936	2 767 260	0	20 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 750 774 460	1 833 317 047	1 542 123 318	1 561 860 656
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		71 273 654	139 076 929	164 699 321	162 636 103
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		864 992 982	735 098 575	593 559 204	814 120 354
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		814 507 824	959 141 543	783 864 793	585 104 199
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		280 614 254	64 495 161	413 148 642	164 990 000
JUMLAH/TOTAL		3 516 414 453	3 546 928 958	3 587 854 404	4 149 263 203

*) Data APBD

TABEL 4.22 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.22 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		2 242 236 096	2 434 410 881	2 311 117 050	2 995 394 990
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		592 656 846	637 628 355	718 077 611	1 287 399 649
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		412 026 386	669 242 425	651 516 975	585 378 400
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		1 325 000	0	0	0
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		1 195 304 364	1 092 049 850	940 058 062	1 114 432 539
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		38 419 519	33 505 812	1 464 402	1 464 402
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		2 503 981	1 984 439	0	6 720 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		2 675 591 544	2 668 454 369	2 867 597 474	2 741 291 221
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		141 220 680	166 567 850	108 823 939	147 069 538
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		1 267 486 876	1 280 154 128	1 410 377 265	1 381 537 514
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		1 266 883 988	1 221 732 391	1 348 396 270	1 212 684 169
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		738 732 079	397 409 121	421 974 701	31 500 000
JUMLAH/TOTAL		5 656 559 719	5 500 274 371	5 600 689 225	5 768 186 211

*) Data APBD

TABEL 4.23 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.23 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		6 414 604 671	4 251 297 752	4 031 278 537	5 278 546 305
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		930 549 933	943 304 357	874 380 274	1 949 609 202
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		909 317 897	966 801 166	844 687 442	867 158 700
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		4 249 500	4 419 500	3 459 990	5 010 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		2 563 201 309	2 440 676	1 446 352 403	1 825 627 075
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		2 005 786 032	2 330 897 807	861 148 428	621 141 328
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		1 500 000	3 434 246	1 250 000	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		4 859 951 094	4 347 690 549	3 569 963 802	2 820 353 695
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		494 060 058	311 271 403	454 630 639	223 723 285
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		2 154 573 721	2 025 501 327	1 543 518 536	1 670 776 456
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		2 211 317 315	2 010 917 819	1 571 814 627	925 853 954
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		1 061 628 546	777 324 517	611 166 600	0
JUMLAH/TOTAL		12 336 184 311	9 376 312 818	8 212 408 939	8 098 900 000

*) Data APBD

TABEL 4.24 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.24 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		141 231 908	708 397 786	996 711 497	1 141 309 655
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		46 206 963	109 924 600	181 900 063	312 963 303
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	11 795 978	18 000 000
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		94 624 945	248 342 543	203 116 570	231 935 200
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		0	0	2 400 000	5 000 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		0	83 619 643	188 852 025	157 377 652
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		0	266 011 000	408 425 243	406 033 500
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		400 000	500 000	221 618	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		501 133 396	1 185 199 377	1 559 822 219	1 591 970 250
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		35 906 166	92 740 579	112 057 099	143 192 675
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		240 588 072	423 849 113	650 482 864	713 272 455
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		224 639 158	668 609 685	797 282 256	735 505 120
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		1 184 448 975	735 234 473	511 687 505	150 000 000
JUMLAH/TOTAL		1 826 814 279	2 628 831 636	3 068 221 221	2 883 279 905

*) Data APBD

TABEL 4.25
TABLE

REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
	A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>	1 141 016 762	1 409 339 276	1 452 472 986	2 120 843 037
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	467 712 987	521 408 422	546 479 832	1 175 484 173
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	998 580	1 182 650	1 196 820	1 300 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	294 610 568	548 284 694	501 568 300	522 738 500
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	12 316 500	300 000	280 000	500 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	293 834 637	327 901 116	388 066 553	363 720 364
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	69 957 386	9 833 144	14 381 281	52 600 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 586 104	429 250	500 200	4 500 000
	B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>	1 088 467 705	1 283 744 512	1 348 672 410	1 451 499 463
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	35 073 022	22 775 699	34 164 143	28 732 880
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	546 671 365	503 691 768	568 608 677	725 701 873
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	506 723 318	757 277 045	745 899 590	697 064 710
	C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>	340 708 660	125 583 942	184 624 657	30 000 000
	JUMLAH/TOTAL	2 570 193 127	2 818 667 730	2 985 770 053	3 602 342 500

*) Data APBD

TABEL 4.26

REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 167 333 262	1 526 076 325	1 545 657 444	2 252 257 809
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		376 699 998	531 258 852	562 081 903	1 277 664 509
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		363 244 679	578 491 677	603 336 224	601 681 000
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		4 124 500	2 025 000	1 684 500	1 000 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		305 162 965	307 534 979	365 381 748	362 718 276
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		117 267 144	106 638 838	13 171 319	6 694 024
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		833 976	126 979	1 750	2 500 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		1 278 327 985	1 427 204 358	1 632 457 038	1 335 343 778
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		148 177 160	143 934 108	120 271 628	117 596 318
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		853 319 017	840 745 925	1 008 212 400	738 129 641
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		276 831 808	442 524 325	503 973 010	479 617 819
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		142 474 915	84 136 672	75 015 110	47 200 000
JUMLAH/TOTAL		2 588 136 162	3 037 417 355	3 253 129 592	3 634 801 587

*) Data APBD

TABEL 4.27
**REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS
 PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY
 KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		3 446 840 488	3 798 198 140	4 635 403 139	6 591 338 410
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		852 198 957	913 334 508	940 833 055	2 940 457 161
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		16 151 416	28 158 983	21 172 836	19 500 000
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		950 682 805	1 221 910 000	1 899 789 706	1 898 113 207
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		0	0	0	600 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		1 101 354 583	1 175 949 066	1 408 139 588	1 555 493 325
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		525 489 443	458 845 583	365 467 954	152 174 717
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		963 284	0	0	25 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		2 153 546 288	2 351 406 402	2 295 575 529	2 558 122 414
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		168 276 411	188 238 513	198 792 269	203 674 832
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		1 309 032 668	1 313 862 831	1 239 919 516	1 294 939 515
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		676 237 209	849 305 058	856 863 744	1 059 508 067
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		242 455 881	265 955 474	361 565 497	136 000 000
JUMLAH/TOTAL		5 842 842 657	6 415 560 016	7 292 544 165	9 285 460 824

*) Data APBD

TABEL 4.28 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.28 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		1 114 072 138	1 235 549 809	1 466 650 011	2 439 650 182
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		458 968 695	491 167 574	531 192 910	1 298 460 830
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		22 627 810	21 128 245	18 805 025	12 227 469
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		324 556 946	419 566 403	579 245 510	707 025 070
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		0	0	0	0
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		203 217 978	217 328 398	284 325 279	376 926 983
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		104 700 709	86 359 189	53 081 287	34 545 830
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		0	0	0	10 464 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		974 527 586	1 113 724 658	1 197 220 363	1 157 510 095
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		58 057 283	55 814 254	61 282 812	61 819 437
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		362 977 173	374 401 879	384 020 428	321 137 529
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		553 493 130	683 508 525	751 917 123	774 553 129
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		431 964 051	537 415 421	596 446 423	109 415 740
JUMLAH/TOTAL		2 520 563 775	2 886 689 888	3 260 316 797	3 706 576 017

*) Data APBD

TABEL 4.29

**REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2014-2017**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		558 125 330	620 104 488	767 132 534	1 034 870 652
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		239 795 987	269 685 980	286 486 159	571 774 214
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		181 553 544	204 002 311	328 554 312	296 034 032
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		1 479 000	3 006 000	1 637 500	2 103 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		112 638 502	122 823 973	126 689 832	148 635 023
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		21 600 082	18 135 176	21 778 849	11 324 383
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		1 058 215	2 451 048	1 985 882	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		646 364 708	787 826 560	828 762 215	804 661 247
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		35 278 153	52 049 234	61 888 416	70 359 783
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		378 661 812	391 533 251	469 950 841	444 029 324
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		232 424 743	344 244 075	296 922 958	290 272 140
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		97 002 816	68 395 981	56 808 846	2 576 400
JUMLAH/TOTAL		1 301 492 854	1 476 327 029	1 652 703 595	1 842 108 299

*) Data APBD

TABEL 4.30

**REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2014-2017**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY KIND
OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		507 606 860	490 231 734	825 500 639	960 361 645
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		210 732 942	239 971 271	264 689 241	401 241 067
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	2 876 292	1 541 393	8 956 208
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		173 152 932	233 733 427	397 636 730	354 099 656
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		11 125 744	13 650 744	17 372 607	19 000 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		112 595 242	0	115 925 229	126 665 701
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		0	0	28 335 439	48 399 013
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		0	0	0	2 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		719 815 524	895 610 256	940 476 919	1 020 642 066
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		0	129 750	7 661 627	11 600 915
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		452 797 262	450 252 488	434 079 839	468 946 802
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		267 018 262	445 228 018	498 735 453	540 094 349
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		142 074 163	87 907 830	48 467 708	8 000 000
JUMLAH/TOTAL		1 369 496 547	1 473 749 820	1 814 445 266	1 989 003 711

*) Data APBD

TABEL 4.31
TABLE

**REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2014-2017**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		830 868 693	1 069 228 383	1 218 897 435	1 616 486 426
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		392 741 104	466 045 470	494 537 752	896 032 356
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		1 192 613	874 409	557 948	238 000
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		306 012 795	388 797 248	490 652 243	496 178 001
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		2 016 380	11 945 863	13 272 000	12 000 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		102 848 334	183 231 747	201 080 282	181 888 069
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		24 215 570	16 407 977	11 297 210	22 650 000
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		1 841 897	1 925 669	7 500 000	7 500 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		895 264 571	1 210 862 620	1 580 019 055	1 260 804 480
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		30 606 186	5 970 209	8 141 512	9 007 083
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		495 328 479	662 106 967	739 813 193	667 961 757
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		369 329 906	542 785 444	832 064 350	583 835 640
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		186 416 361	24 445 099	32 735 885	2 735 885
JUMLAH/TOTAL		1 912 549 625	2 304 536 102	2 831 652 375	2 880 026 791

*) Data APBD

TABEL 4.32 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS
TABLE 4.32 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY KIND
 OF EXPENDITURE (thousand rupiah), 2014-2017**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		560 913 095	754 110 831	776 040 767	1 133 696 269
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		265 437 989	334 290 451	353 911 605	655 881 105
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	4 200 000
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	3 408 850	4 933 277	5 000 000
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		196 660 633	262 402 128	304 995 100	335 071 600
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		15 042 365	11 856 100	5 059 185	5 480 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		83 272 108	129 990 936	103 330 676	117 163 564
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		0	11 220 596	3 610 875	8 400 000
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		500 000	941 770	200 049	2 500 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		920 652 250	1 054 649 285	1 247 822 035	1 515 469 685
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		77 207 847	107 589 459	101 561 902	134 499 714
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		415 479 700	523 567 485	553 569 062	691 392 534
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		427 964 703	423 492 341	592 691 071	689 577 437
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		51 153 914	47 370 415	37 265 551	335 010 021
JUMLAH/TOTAL		1 532 719 259	1 856 130 531	2 061 128 353	2 984 175 975

*) Data APBD

TABEL 4.33 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENGELOUARAN (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 4.33 ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		2 876 703 562	3 502 393 797	3 289 955 912	4 123 221 855
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		178 580 573	207 475 746	226 773 839	683 615 529
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	0
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		463 623 362	514 552 922	896 788 111	753 103 059
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		35 295 750	44 192 000	24 499 000	43 660 000
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		713 746 670	1 180 116 277	460 430 955	864 710 694
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		1 485 457 207	1 556 056 852	1 681 464 007	1 768 132 573
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		0	0	0	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		2 552 145 929	3 377 772 879	3 174 656 330	3 075 738 678
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		136 216 566	135 607 772	139 519 476	181 820 947
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		1 224 141 281	1 565 161 033	1 588 593 202	1 853 744 620
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		1 191 788 082	1 677 004 074	1 446 543 652	1 040 173 111
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		1 667 907 507	626 103 896	792 391 022	55 000 000
JUMLAH/TOTAL		7 096 756 998	7 506 270 572	7 257 003 264	7 253 960 533

*) Data APBD

TABEL 4.34 REALISASI PENGELOUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS
TABLE 4.34 **PENGELUARAN (ribu rupiah), 2014-2017**
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 *) (6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i>		6 419 561 804	6 980 187 994	6 782 510 720	8 072 068 176
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		744 258 374	919 022 324	986 869 095	1 358 388 729
2. Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>		0	0	0	0
3. Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>		0	0	0	40 000 000
4. Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>		732 224 238	835 350 289	1 077 606 950	1 089 144 838
5. Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>		88 453 792	94 308 781	145 771 405	91 509 700
6. Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>		280 781 136	290 677 197	313 261 780	383 667 482
7. Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>		4 562 248 919	4 829 851 734	4 258 952 106	5 094 357 427
8. Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>		11 595 345	10 977 669	49 384	15 000 000
B. BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i>		3 884 225 042	5 416 259 242	5 185 983 701	7 011 808 528
1. Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>		196 401 072	190 579 265	235 693 718	278 995 242
2. Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>		1 998 521 178	2 360 218 215	2 459 956 541	3 202 596 186
3. Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>		1 689 302 792	2 865 461 762	2 490 333 442	3 530 217 100
C. PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i>		1 239 234 968	590 184 665	1 102 841 236	75 000 000
JUMLAH/TOTAL		11 543 021 814	12 986 631 901	13 071 335 657	15 158 876 704

*) Data APBD

TABEL
TABLE 5.

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.A (ribu rupiah), 2014-2017
ACTUAL INDIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	5 580 074 906	5 643 598 833	6 028 564 353	7 272 664 778	
2. Sumatera Utara	5 371 411 832	5 886 083 698	7 037 202 955	8 661 188 766	
3. Sumatera Barat	1 831 872 717	2 359 421 523	2 600 444 061	4 186 773 954	
4. Riau	3 431 470 705	4 133 737 638	4 457 822 880	5 404 312 111	
5. Jambi	1 483 115 535	1 762 391 117	1 649 327 433	2 373 133 364	
6. Sumatera Selatan	4 010 626 533	3 108 721 120	3 564 656 085	3 669 905 266	
7. Bengkulu	908 754 313	1 069 307 495	1 094 260 686	1 674 625 192	
8. Lampung	2 144 560 815	2 584 515 351	3 337 212 484	4 461 638 214	
9. Bangka Belitung	855 780 981	1 080 851 837	1 209 394 930	1 489 821 437	
10. Kepulauan Riau	1 213 820 569	1 219 616 966	1 493 246 117	1 451 119 063	
11. DKI Jakarta	12 631 884 602	20 707 205 013	22 784 925 586	28 055 746 848	
12. Jawa Barat	16 958 816 394	19 256 280 146	21 748 500 642	26 208 737 552	
13. Jawa Tengah	10 646 904 181	12 396 063 966	13 717 072 629	17 390 342 088	
14. DI Yogyakarta	1 560 157 356	1 810 940 127	1 998 595 550	2 779 012 766	
15. Jawa Timur	13 700 106 993	15 074 834 724	16 380 714 234	18 639 858 407	
16. Banten	4 013 607 703	4 758 963 213	5 835 995 714	6 936 624 336	
17. Bali	3 151 101 687	3 483 142 655	3 857 588 697	4 842 048 376	
18. Nusa Tenggara Barat	1 558 834 866	1 731 408 033	2 273 102 493	2 917 302 636	
19. Nusa Tenggara Timur	1 734 235 032	2 044 792 233	2 393 234 089	3 011 483 032	
20. Kalimantan Barat	2 064 408 105	2 615 246 070	2 728 184 377	2 701 044 997	
21. Kalimantan Tengah	1 485 025 739	1 649 116 750	1 632 582 444	2 422 412 547	
22. Kalimantan Selatan	2 242 236 096	2 434 410 881	2 311 117 050	2 995 394 990	
23. Kalimantan Timur	6 414 604 671	4 251 297 752	4 031 278 537	5 278 546 305	
24. Kalimantan Utara	141 231 908	708 397 786	996 711 497	1 141 309 655	
25. Sulawesi Utara	1 141 016 762	1 409 339 276	1 452 472 986	2 120 843 037	
26. Sulawesi Tengah	1 167 333 262	1 526 076 325	1 545 657 444	2 252 257 809	
27. Sulawesi Selatan	3 446 840 488	3 798 198 140	4 635 403 139	6 591 338 410	
28. Sulawesi Tenggara	1 114 072 138	1 235 549 809	1 466 650 011	2 439 650 182	
29. Gorontalo	558 125 330	620 104 488	767 132 534	1 034 870 652	
30. Sulawesi Barat	507 606 860	490 231 734	825 500 639	960 361 645	
31. Maluku	830 868 693	1 069 228 383	1 218 897 435	1 616 486 426	
32. Maluku Utara	560 913 095	754 110 831	776 040 767	1 133 696 269	
33. Papua Barat	2 876 703 562	3 502 393 797	3 289 955 912	4 123 221 855	
34. Papua	6 419 561 804	6 980 187 994	6 782 510 720	8 072 068 176	
JUMLAH/TOTAL	123 757 686 233	143 155 765 704	157 921 957 110	196 309 841 141	

*) Data APBD

TABEL
TABLE 5.A.1

**REALISASI BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2014-2017**
**ACTUAL INDIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	870 169 543	899 104 777	928 936 862	2 377 917 451
2.	Sumatera Utara	1 008 161 979	1 055 299 207	1 115 950 650	3 037 330 274
3.	Sumatera Barat	598 043 410	672 707 253	685 822 983	2 273 447 378
4.	R i a u	937 258 185	979 663 542	1 007 962 484	2 311 534 133
5.	J a m b i	480 217 430	552 244 225	570 140 805	1 004 988 139
6.	Sumatera Selatan	752 819 177	776 889 350	655 041 326	1 400 613 628
7.	Bengkulu	450 265 493	493 881 157	482 269 227	975 543 934
8.	Lampung	544 114 850	700 857 892	743 620 265	1 662 465 214
9.	Bangka Belitung	274 339 635	312 375 890	396 188 131	710 654 094
10.	Kepulauan Riau	252 064 813	281 351 911	304 724 044	554 419 169
11.	DKI Jakarta	10 472 324 237	15 866 062 897	17 044 063 148	20 140 729 686
12.	Jawa Barat	1 569 541 693	1 671 229 143	1 835 034 493	5 054 514 042
13.	Jawa Tengah	1 726 640 884	2 186 704 012	2 239 684 000	5 719 852 846
14.	D I Yogyakarta	512 498 971	540 817 462	570 939 445	1 316 547 065
15.	Jawa Timur	1 623 569 154	1 805 820 309	2 327 052 985	5 891 426 841
16.	Banten	481 328 441	544 637 409	594 410 665	1 587 691 144
17.	B a l i	715 280 041	733 564 306	753 993 266	1 830 777 811
18.	Nusa Tenggara Barat	502 984 121	564 302 754	488 238 252	1 383 300 712
19.	Nusa Tenggara Timur	464 325 697	506 293 029	542 985 141	1 222 020 641
20.	Kalimantan Barat	546 771 365	644 818 816	662 457 323	1 142 627 756
21.	Kalimantan Tengah	385 757 112	434 769 090	502 777 468	1 284 287 554
22.	Kalimantan Selatan	592 656 846	637 628 355	718 077 611	1 287 399 649
23.	Kalimantan Timur	930 549 933	943 304 357	874 380 274	1 949 609 202
24.	Kalimantan Utara	46 206 963	109 924 600	181 900 063	312 963 303
25.	Sulawesi Utara	467 712 987	521 408 422	546 479 832	1 175 484 173
26.	Sulawesi Tengah	376 699 998	531 258 852	562 081 903	1 277 664 509
27.	Sulawesi Selatan	852 198 957	913 334 508	940 833 055	2 940 457 161
28.	Sulawesi Tenggara	458 968 695	491 167 574	531 192 910	1 298 460 830
29.	Gorontalo	239 795 987	269 685 980	286 486 159	571 774 214
30.	Sulawesi Barat	210 732 942	239 971 271	264 689 241	401 241 067
31.	M a l u k u	392 741 104	466 045 470	494 537 752	896 032 356
32.	Maluku Utara	265 437 989	334 290 451	353 911 605	655 881 105
33.	Papua Barat	178 580 573	207 475 746	226 773 839	683 615 529
34.	P a p u a	744 258 374	919 022 324	986 869 095	1 358 388 729
JUMLAH/TOTAL		30 925 017 579	38 807 912 341	41 420 506 302	77 691 661 339

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BUNGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.A.2 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 5.A.2 ACTUAL INTEREST EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh		0	0	0	0
2. Sumatera Utara		0	0	0	0
3. Sumatera Barat		0	0	0	0
4. Riau		0	0	0	0
5. Jambi		0	0	0	0
6. Sumatera Selatan		0	0	0	0
7. Bengkulu		0	0	0	0
8. Lampung		0	0	0	0
9. Bangka Belitung		0	0	0	0
10. Kepulauan Riau		0	0	0	0
11. DKI Jakarta	1 218 529	5 478 640	11 739 277	49 226 438	
12. Jawa Barat	0	0	0	0	0
13. Jawa Tengah	0	0	0	0	0
14. DI Yogyakarta	0	0	0	0	0
15. Jawa Timur	3 921 186	2 761 252	1 753 220	840 044	
16. Banten	0	0	0	0	0
17. Bali	0	0	0	0	0
18. Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0
19. Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0
20. Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
21. Kalimantan Tengah	0	0	102 500	0	
22. Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0
23. Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
24. Kalimantan Utara	0	0	0	0	0
25. Sulawesi Utara	0	0	0	0	0
26. Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0
27. Sulawesi Selatan	16 151 416	28 158 983	21 172 836	19 500 000	
28. Sulawesi Tenggara	22 627 810	21 128 245	18 805 025	12 227 469	
29. Gorontalo	0	0	0	0	0
30. Sulawesi Barat	0	2 876 292	1 541 393	8 956 208	
31. Maluku	1 192 613	874 409	557 948	238 000	
32. Maluku Utara	0	0	0	4 200 000	
33. Papua Barat	0	0	0	0	0
34. Papua	0	0	0	0	0
JUMLAH/TOTAL	45 111 554	61 277 821	55 672 199	95 188 159	

*) Data APBD

REALISASI BELANJA SUBSIDI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.A.3 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 5.A.3 ACTUAL SUBSIDIES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh		0	0	0	0
2. Sumatera Utara		0	0	0	0
3. Sumatera Barat		0	0	0	0
4. Riau		0	0	0	0
5. Jambi		0	0	0	0
6. Sumatera Selatan		0	0	0	0
7. Bengkulu		0	0	0	0
8. Lampung		0	0	0	0
9. Bangka Belitung		0	0	0	0
10. Kepulauan Riau		0	0	0	0
11. DKI Jakarta		0	659 081 781	903 898 737	3 234 116 848
12. Jawa Barat	6 805 400	18 990 870	14 999 772	15 000 000	
13. Jawa Tengah	0	0	0	0	
14. DI Yogyakarta	0	0	0	0	
15. Jawa Timur	0	0	0	0	
16. Banten	0	0	0	0	
17. Bali	10 000 000	9 819 600	9 990 000	10 000 000	
18. Nusa Tenggara Barat	248 496	0	0	0	
19. Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	
20. Kalimantan Barat	0	0	0	0	
21. Kalimantan Tengah	13 704 956	1 779 018	1 163 230	1 163 300	
22. Kalimantan Selatan	0	0	0	0	
23. Kalimantan Timur	0	0	0	0	
24. Kalimantan Utara	0	0	11 795 978	18 000 000	
25. Sulawesi Utara	998 580	1 182 650	1 196 820	1 300 000	
26. Sulawesi Tengah	0	0	0	0	
27. Sulawesi Selatan	0	0	0	0	
28. Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	
29. Gorontalo	0	0	0	0	
30. Sulawesi Barat	0	0	0	0	
31. Maluku	0	0	0	0	
32. Maluku Utara	0	3 408 850	4 933 277	5 000 000	
33. Papua Barat	0	0	0	0	
34. Papua	0	0	0	40 000 000	
JUMLAH/TOTAL	31 757 432	694 262 769	947 977 814	3 324 580 148	

*) Data APBD

REALISASI BELANJA HIBAH PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.A.4 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 5.A.4 ACTUAL GRANT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	693 008 973	643 933 200	1 167 158 912	677 188 600
2.	Sumatera Utara	1 611 718 257	2 094 026 766	3 010 055 530	3 620 208 919
3.	Sumatera Barat	591 642 080	894 816 808	1 079 238 247	1 088 582 600
4.	R i a u	751 853 825	936 850 423	1 303 798 175	1 015 273 600
5.	J a m b i	380 761 572	622 071 193	678 057 205	647 306 190
6.	Sumatera Selatan	1 574 378 204	1 638 104 118	2 041 107 498	1 707 294 054
7.	Bengkulu	225 782 948	361 930 070	370 456 153	385 302 209
8.	Lampung	847 424 324	1 092 450 979	1 450 803 388	1 507 323 000
9.	Bangka Belitung	167 022 783	257 790 335	403 743 237	311 439 900
10.	Kepulauan Riau	470 786 270	485 780 546	419 287 000	388 489 000
11.	DKI Jakarta	1 462 044 387	1 717 428 916	2 161 217 950	1 458 036 810
12.	Jawa Barat	6 179 782 846	6 826 862 952	9 854 923 609	10 382 158 832
13.	Jawa Tengah	2 963 856 035	3 745 182 609	5 246 848 625	4 943 528 652
14.	D I Yogyakarta	441 914 970	562 260 179	727 099 422	719 522 034
15.	Jawa Timur	4 673 473 427	5 412 737 369	7 220 422 955	6 430 091 440
16.	Banten	1 244 666 640	1 500 205 771	2 493 536 667	2 376 144 610
17.	B a l i	867 202 764	809 295 976	1 116 809 328	1 073 267 400
18.	Nusa Tenggara Barat	536 698 599	686 038 528	1 209 997 934	980 897 000
19.	Nusa Tenggara Timur	932 596 147	1 171 350 214	1 472 015 600	1 348 419 750
20.	Kalimantan Barat	666 837 274	802 457 462	1 043 728 486	854 992 300
21.	Kalimantan Tengah	332 463 903	604 198 436	582 192 380	437 578 149
22.	Kalimantan Selatan	412 026 386	669 242 425	651 516 975	585 378 400
23.	Kalimantan Timur	909 317 897	966 801 166	844 687 442	867 158 700
24.	Kalimantan Utara	94 624 945	248 342 543	203 116 570	231 935 200
25.	Sulawesi Utara	294 610 568	548 284 694	501 568 300	522 738 500
26.	Sulawesi Tengah	363 244 679	578 491 677	603 336 224	601 681 000
27.	Sulawesi Selatan	950 682 805	1 221 910 000	1 899 789 706	1 898 113 207
28.	Sulawesi Tenggara	324 556 946	419 566 403	579 245 510	707 025 070
29.	Gorontalo	181 553 544	204 002 311	328 554 312	296 034 032
30.	Sulawesi Barat	173 152 932	233 733 427	397 636 730	354 099 656
31.	M a l u k u	306 012 795	388 797 248	490 652 243	496 178 001
32.	Maluku Utara	196 660 633	262 402 128	304 995 100	335 071 600
33.	Papua Barat	463 623 362	514 552 922	896 788 111	753 103 059
34.	P a p u a	732 224 238	835 350 289	1 077 606 950	1 089 144 838
JUMLAH/TOTAL		33 018 207 958	39 957 250 083	53 831 992 474	51 090 706 312

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.A.5 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 5.A.5 ACTUAL SOCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	309 012 899	250 088 300	228 993 000	206 251 075	
2. Sumatera Utara	1 065 000	0	0	0	
3. Sumatera Barat	0	0	0	0	
4. Riau	13 015 000	855 180	6 649 300	10 000 000	
5. Jambi	19 518 750	0	0	0	
6. Sumatera Selatan	513 384	380 000	226 252	600 000	
7. Bengkulu	0	0	0	0	
8. Lampung	4 521 800	6 409 900	2 587 280	6 000 000	
9. Bangka Belitung	745 500	666 700	717 060	943 000	
10. Kepulauan Riau	40 688 431	58 079 160	13 576 941	5 557 000	
11. DKI Jakarta	680 155 340	2 087 123 200	2 452 948 130	2 499 348 722	
12. Jawa Barat	2 871 320	3 048 750	9 940 000	38 479 445	
13. Jawa Tengah	23 281 040	18 715 300	36 531 500	248 562 000	
14. DI Yogyakarta	9 919 078	7 073 500	1 919 000	2 091 000	
15. Jawa Timur	8 434 380	8 130 227	8 747 792	10 000 000	
16. Banten	86 602 000	131 217 500	131 544 393	138 877 500	
17. Bali	147 024 713	151 729 625	155 774 827	12 640 400	
18. Nusa Tenggara Barat	25 477 063	30 622 895	95 288 393	17 455 319	
19. Nusa Tenggara Timur	22 191 490	20 957 580	10 848 900	23 151 000	
20. Kalimantan Barat	252 000	1 895 000	410 000	720 000	
21. Kalimantan Tengah	69 886 615	67 090 690	32 735 415	43 165 642	
22. Kalimantan Selatan	1 325 000	0	0	0	
23. Kalimantan Timur	4 249 500	4 419 500	3 459 990	5 010 000	
24. Kalimantan Utara	0	0	2 400 000	5 000 000	
25. Sulawesi Utara	12 316 500	300 000	280 000	500 000	
26. Sulawesi Tengah	4 124 500	2 025 000	1 684 500	1 000 000	
27. Sulawesi Selatan	0	0	0	600 000	
28. Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	
29. Gorontalo	1 479 000	3 006 000	1 637 500	2 103 000	
30. Sulawesi Barat	11 125 744	13 650 744	17 372 607	19 000 000	
31. Maluku	2 016 380	11 945 863	13 272 000	12 000 000	
32. Maluku Utara	15 042 365	11 856 100	5 059 185	5 480 000	
33. Papua Barat	35 295 750	44 192 000	24 499 000	43 660 000	
34. Papua	88 453 792	94 308 781	145 771 405	91 509 700	
JUMLAH/TOTAL	1 640 604 334	3 029 787 495	3 404 874 370	3 449 704 803	

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.A.6 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 5.A.6 ACTUAL SHARING FUND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	298 490 577	503 280 080	659 116 002	570 627 504	
2. Sumatera Utara	1 692 809 639	2 330 828 370	2 774 649 016	1 982 455 819	
3. Sumatera Barat	546 614 466	669 370 829	698 437 478	710 893 585	
4. Riau	1 614 630 539	1 233 314 138	1 192 559 065	1 390 025 921	
5. Jambi	462 356 647	467 708 760	399 535 722	550 366 384	
6. Sumatera Selatan	268 508 790	115 950 085	239 086 976	445 000 000	
7. Bengkulu	211 055 929	211 928 326	239 805 950	294 245 598	
8. Lampung	723 095 813	762 543 531	1 089 846 007	1 181 000 000	
9. Bangka Belitung	212 859 717	303 413 475	156 076 110	344 731 978	
10. Kepulauan Riau	252 894 344	315 613 621	742 700 704	480 179 521	
11. DKI Jakarta	0	0	0	0	
12. Jawa Barat	5 461 539 028	6 406 192 658	6 393 271 240	6 408 516 457	
13. Jawa Tengah	3 263 403 899	4 130 087 481	4 088 437 192	4 398 826 211	
14. DI Yogyakarta	472 309 827	583 092 613	611 852 157	601 307 079	
15. Jawa Timur	4 934 876 836	4 667 452 412	5 015 881 821	5 174 885 021	
16. Banten	1 764 024 523	1 920 559 281	2 063 821 141	2 184 014 250	
17. Bali	910 123 410	1 088 091 712	1 026 250 938	1 091 363 071	
18. Nusa Tenggara Barat	454 803 323	435 441 046	462 284 296	531 938 554	
19. Nusa Tenggara Timur	267 099 625	317 680 998	346 786 046	406 968 396	
20. Kalimantan Barat	435 940 603	845 411 837	681 158 346	695 683 647	
21. Kalimantan Tengah	527 398 945	372 558 292	510 062 774	597 917 902	
22. Kalimantan Selatan	1 195 304 364	1 092 049 850	940 058 062	1 114 432 539	
23. Kalimantan Timur	2 563 201 309	2 440 676	1 446 352 403	1 825 627 075	
24. Kalimantan Utara	0	83 619 643	188 852 025	157 377 652	
25. Sulawesi Utara	293 834 637	327 901 116	388 066 553	363 720 364	
26. Sulawesi Tengah	305 162 965	307 534 979	365 381 748	362 718 276	
27. Sulawesi Selatan	1 101 354 583	1 175 949 066	1 408 139 588	1 555 493 325	
28. Sulawesi Tenggara	203 217 978	217 328 398	284 325 279	376 926 983	
29. Gorontalo	112 638 502	122 823 973	126 689 832	148 635 023	
30. Sulawesi Barat	112 595 242	0	115 925 229	126 665 701	
31. Maluku	102 848 334	183 231 747	201 080 282	181 888 069	
32. Maluku Utara	83 272 108	129 990 936	103 330 676	117 163 564	
33. Papua Barat	713 746 670	1 180 116 277	460 430 955	864 710 694	
34. Papua	280 781 136	290 677 197	313 261 780	383 667 482	
JUMLAH/TOTAL	31 842 794 308	32 794 183 403	35 733 513 393	37 619 973 645	

*) Data APBD

**REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2014-2017**
**TABEL 5.A.7 ACTUAL FINANCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017**

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	3 407 472 166	3 343 547 380	3 035 461 375	3 410 680 148	
2. Sumatera Utara	1 053 174 611	405 929 355	134 545 437	2 443 754	
3. Sumatera Barat	94 969 449	122 483 415	135 581 771	108 850 391	
4. Riau	114 713 156	983 054 355	945 142 048	565 920 132	
5. Jambi	138 550 780	119 320 829	1 500 245	158 280 251	
6. Sumatera Selatan	1 413 549 040	576 359 567	629 014 033	111 997 584	
7. Bengkulu	21 144 500	1 567 942	1 729 356	14 533 451	
8. Lampung	20 173 866	22 253 049	46 368 544	76 850 000	
9. Bangka Belitung	200 796 461	206 510 261	251 916 010	116 755 422	
10. Kepulauan Riau	197 356 711	78 215 728	12 636 714	22 224 373	
11. DKI Jakarta	14 005 707	371 152 504	210 314 034	348 804 150	
12. Jawa Barat	3 738 146 028	4 329 955 773	3 640 311 644	4 249 268 776	
13. Jawa Tengah	2 661 510 573	2 303 371 333	2 100 703 904	2 059 572 379	
14. DI Yogyakarta	121 560 575	117 696 373	86 724 508	114 625 863	
15. Jawa Timur	2 362 512 570	3 149 506 610	1 787 383 314	1 032 615 061	
16. Banten	436 986 099	657 845 799	552 584 088	613 846 832	
17. Bali	497 128 613	690 452 391	794 578 161	813 999 694	
18. Nusa Tenggara Barat	38 517 986	12 762 278	13 234 650	3 711 051	
19. Nusa Tenggara Timur	29 252 565	27 459 614	19 448 994	3 423 245	
20. Kalimantan Barat	414 606 863	320 662 955	340 430 222	2 021 294	
21. Kalimantan Tengah	154 846 272	165 953 964	3 548 677	38 300 000	
22. Kalimantan Selatan	38 419 519	33 505 812	1 464 402	1 464 402	
23. Kalimantan Timur	2 005 786 032	2 330 897 807	861 148 428	621 141 328	
24. Kalimantan Utara	0	266 011 000	408 425 243	406 033 500	
25. Sulawesi Utara	69 957 386	9 833 144	14 381 281	52 600 000	
26. Sulawesi Tengah	117 267 144	106 638 838	13 171 319	6 694 024	
27. Sulawesi Selatan	525 489 443	458 845 583	365 467 954	152 174 717	
28. Sulawesi Tenggara	104 700 709	86 359 189	53 081 287	34 545 830	
29. Gorontalo	21 600 082	18 135 176	21 778 849	11 324 383	
30. Sulawesi Barat	0	0	28 335 439	48 399 013	
31. Maluku	24 215 570	16 407 977	11 297 210	22 650 000	
32. Maluku Utara	0	11 220 596	3 610 875	8 400 000	
33. Papua Barat	1 485 457 207	1 556 056 852	1 681 464 007	1 768 132 573	
34. Papua	4 562 248 919	4 829 851 734	4 258 952 106	5 094 357 427	
JUMLAH/TOTAL	26 086 116 602	27 729 825 183	22 465 736 129	22 096 641 048	

*) Data APBD

REALISASI BELANJA TAK TERDUGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.A.8 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 5.A.8 ACTUAL UNPREDICTED EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh		1 920 748	3 645 096	8 898 202	30 000 000
2. Sumatera Utara		4 482 346	0	2 002 322	18 750 000
3. Sumatera Barat		603 312	43 218	1 363 582	5 000 000
4. Riau		0	0	1 711 808	111 558 325
5. Jambi		1 710 356	1 046 110	93 456	12 192 400
6. Sumatera Selatan		857 938	1 038 000	180 000	4 400 000
7. Bengkulu		505 443	0	0	5 000 000
8. Lampung		5 230 162	0	3 987 000	28 000 000
9. Bangka Belitung		16 885	95 176	754 382	5 297 043
10. Kepulauan Riau		30 000	576 000	320 714	250 000
11. DKI Jakarta		2 136 402	877 075	744 310	325 484 194
12. Jawa Barat		130 079	0	19 884	60 800 000
13. Jawa Tengah		8 211 750	12 003 231	4 867 408	20 000 000
14. DI Yogyakarta		1 953 935	0	61 018	24 919 725
15. Jawa Timur		93 319 440	28 426 545	19 472 147	100 000 000
16. Banten		0	4 497 453	98 760	36 050 000
17. Bali		4 342 146	189 045	192 177	10 000 000
18. Nusa Tenggara Barat		105 278	2 240 532	4 058 968	0
19. Nusa Tenggara Timur		18 769 508	1 050 798	1 149 408	7 500 000
20. Kalimantan Barat		0	0	0	5 000 000
21. Kalimantan Tengah		967 936	2 767 260	0	20 000 000
22. Kalimantan Selatan		2 503 981	1 984 439	0	6 720 000
23. Kalimantan Timur		1 500 000	3 434 246	1 250 000	10 000 000
24. Kalimantan Utara		400 000	500 000	221 618	10 000 000
25. Sulawesi Utara		1 586 104	429 250	500 200	4 500 000
26. Sulawesi Tengah		833 976	126 979	1 750	2 500 000
27. Sulawesi Selatan		963 284	0	0	25 000 000
28. Sulawesi Tenggara		0	0	0	10 464 000
29. Gorontalo		1 058 215	2 451 048	1 985 882	5 000 000
30. Sulawesi Barat		0	0	0	2 000 000
31. Maluku		1 841 897	1 925 669	7 500 000	7 500 000
32. Maluku Utara		500 000	941 770	200 049	2 500 000
33. Papua Barat		0	0	0	10 000 000
34. Papua		11 595 345	10 977 669	49 384	15 000 000
JUMLAH/TOTAL		168 076 466	81 266 609	61 684 429	941 385 687

*) Data APBD

TABEL 5.B REALISASI BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
 (ribu rupiah), 2014-2017
*ACTUAL DIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
 INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017*

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	6 465 772 436	6 505 823 422	6 091 148 844	7 461 035 204	
2. Sumatera Utara	2 437 145 478	2 073 083 486	2 439 220 960	4 373 495 526	
3. Sumatera Barat	1 651 799 638	1 662 835 437	1 903 593 198	2 039 203 000	
4. Riau	2 170 603 791	3 627 234 830	4 274 115 270	5 603 837 930	
5. Jambi	1 721 517 300	1 663 174 974	1 645 157 536	1 969 175 441	
6. Sumatera Selatan	1 760 106 497	2 081 477 692	1 397 916 246	3 272 976 140	
7. Bengkulu	1 025 967 285	1 213 037 385	935 429 609	1 670 332 470	
8. Lampung	2 309 626 502	2 196 686 698	2 139 709 112	2 341 290 041	
9. Bangka Belitung	740 305 877	789 106 649	860 473 362	1 176 302 018	
10. Kepulauan Riau	2 098 638 305	1 385 777 170	1 288 872 343	1 909 779 128	
11. DKI Jakarta	25 167 779 696	22 324 117 934	24 343 884 660	35 556 556 458	
12. Jawa Barat	3 839 172 071	5 161 325 715	5 873 463 825	6 220 288 490	
13. Jawa Tengah	4 439 160 853	5 424 696 529	5 637 302 196	5 973 175 937	
14. DI Yogyakarta	1 420 910 964	1 685 485 375	1 849 367 416	2 421 373 245	
15. Jawa Timur	6 306 212 284	7 871 472 846	7 479 239 692	9 599 802 574	
16. Banten	2 178 547 864	3 325 176 946	3 089 817 728	3 413 362 206	
17. Bali	1 340 543 869	1 515 888 269	1 563 344 832	1 812 263 921	
18. Nusa Tenggara Barat	1 055 265 236	1 633 495 638	1 491 199 458	2 025 151 681	
19. Nusa Tenggara Timur	958 813 561	1 283 703 881	1 309 678 361	1 651 707 535	
20. Kalimantan Barat	1 588 506 036	1 508 390 153	1 592 434 416	2 364 350 283	
21. Kalimantan Tengah	1 750 774 460	1 833 317 047	1 542 123 318	1 561 860 656	
22. Kalimantan Selatan	2 675 591 544	2 668 454 369	2 867 597 474	2 741 291 221	
23. Kalimantan Timur	4 859 951 094	4 347 690 549	3 569 963 802	2 820 353 695	
24. Kalimantan Utara	501 133 396	1 185 199 377	1 559 822 219	1 591 970 250	
25. Sulawesi Utara	1 088 467 705	1 283 744 512	1 348 672 410	1 451 499 463	
26. Sulawesi Tengah	1 278 327 985	1 427 204 358	1 632 457 038	1 335 343 778	
27. Sulawesi Selatan	2 153 546 288	2 351 406 402	2 295 575 529	2 558 122 414	
28. Sulawesi Tenggara	974 527 586	1 113 724 658	1 197 220 363	1 157 510 095	
29. Gorontalo	646 364 708	787 826 560	828 762 215	804 661 247	
30. Sulawesi Barat	719 815 524	895 610 256	940 476 919	1 020 642 066	
31. Maluku	895 264 571	1 210 862 620	1 580 019 055	1 260 804 480	
32. Maluku Utara	920 652 250	1 054 649 285	1 247 822 035	1 515 469 685	
33. Papua Barat	2 552 145 929	3 377 772 879	3 174 656 330	3 075 738 678	
34. Papua	3 884 225 042	5 416 259 242	5 185 983 701	7 011 808 528	
JUMLAH/TOTAL	95 577 183 625	103 885 713 143	106 176 521 472	132 762 535 484	

*) Data APBD

**REALISASI BELANJA PEGAWAI LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2014-2017**
TABEL 5.B.1 *ACTUAL DIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017*

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	364 456 742	435 005 438	421 302 251	537 012 020
2.	Sumatera Utara	144 540 209	151 092 148	150 934 731	121 913 823
3.	Sumatera Barat	116 677 136	100 029 258	18 302 036	23 472 960
4.	R i a u	188 187 847	215 518 119	287 834 567	432 504 511
5.	J a m b i	90 004 993	110 945 007	122 473 126	177 988 109
6.	Sumatera Selatan	23 441 741	5 368 504	4 314 166	6 964 061
7.	Bengkulu	96 977 553	107 604 273	82 249 055	55 779 027
8.	Lampung	109 214 896	90 380 434	95 685 684	135 364 090
9.	Bangka Belitung	70 712 734	81 446 273	99 564 291	148 234 646
10.	Kepulauan Riau	183 736 097	163 651 073	158 890 339	230 248 104
11.	DKI Jakarta	2 132 264 555	1 446 281 119	2 315 743 866	3 066 783 558
12.	Jawa Barat	304 590 204	223 252 161	233 811 805	287 984 627
13.	Jawa Tengah	470 795 604	294 192 183	328 192 391	503 732 895
14.	D I Yogyakarta	111 425 291	128 727 296	136 990 455	185 780 385
15.	Jawa Timur	656 587 346	662 267 949	562 836 333	651 596 263
16.	Banten	144 776 980	156 935 313	134 390 258	213 992 374
17.	B a l i	62 150 385	83 696 356	96 558 764	19 382 321
18.	Nusa Tenggara Barat	89 028 411	121 707 586	96 402 736	142 365 787
19.	Nusa Tenggara Timur	77 667 705	90 070 776	101 681 932	146 775 214
20.	Kalimantan Barat	151 348 580	149 317 200	109 290 968	133 245 837
21.	Kalimantan Tengah	71 273 654	139 076 929	164 699 321	162 636 103
22.	Kalimantan Selatan	141 220 680	166 567 850	108 823 939	147 069 538
23.	Kalimantan Timur	494 060 058	311 271 403	454 630 639	223 723 285
24.	Kalimantan Utara	35 906 166	92 740 579	112 057 099	143 192 675
25.	Sulawesi Utara	35 073 022	22 775 699	34 164 143	28 732 880
26.	Sulawesi Tengah	148 177 160	143 934 108	120 271 628	117 596 318
27.	Sulawesi Selatan	168 276 411	188 238 513	198 792 269	203 674 832
28.	Sulawesi Tenggara	58 057 283	55 814 254	61 282 812	61 819 437
29.	Gorontalo	35 278 153	52 049 234	61 888 416	70 359 783
30.	Sulawesi Barat	0	129 750	7 661 627	11 600 915
31.	M a l u k u	30 606 186	5 970 209	8 141 512	9 007 083
32.	Maluku Utara	77 207 847	107 589 459	101 561 902	134 499 714
33.	Papua Barat	136 216 566	135 607 772	139 519 476	181 820 947
34.	P a p u a	196 401 072	190 579 265	235 693 718	278 995 242
JUMLAH/TOTAL		7 216 339 267	6 429 833 490	7 366 638 255	8 995 849 364

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.B.2 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 5.B.2 ACTUAL GOODS AND SERVICES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	3 703 813 328	4 045 714 495	3 384 994 292	4 394 818 072	
2. Sumatera Utara	1 146 633 041	989 746 989	1 268 431 086	2 154 412 517	
3. Sumatera Barat	749 234 578	774 656 224	895 361 390	1 065 294 013	
4. Riau	1 358 771 642	1 397 229 026	1 950 644 869	2 625 348 904	
5. Jambi	813 453 043	760 927 878	577 145 403	780 068 371	
6. Sumatera Selatan	1 005 053 067	1 035 087 257	785 861 153	1 342 928 970	
7. Bengkulu	623 936 194	626 251 826	467 212 695	603 962 017	
8. Lampung	1 274 956 923	1 237 307 069	1 038 243 623	1 073 398 133	
9. Bangka Belitung	364 039 655	473 942 523	531 132 089	579 449 190	
10. Kepulauan Riau	1 196 907 727	880 841 202	842 466 564	1 105 587 652	
11. DKI Jakarta	12 624 396 751	10 633 820 106	13 062 670 779	16 608 666 979	
12. Jawa Barat	2 174 779 252	2 639 397 429	2 780 296 396	3 640 712 429	
13. Jawa Tengah	2 397 685 838	2 615 822 791	2 493 431 626	3 619 124 924	
14. DI Yogyakarta	867 039 199	929 155 893	875 503 249	1 195 029 683	
15. Jawa Timur	4 442 168 317	4 950 884 825	4 765 809 248	6 308 768 624	
16. Banten	1 342 286 491	1 732 271 926	1 621 293 887	1 683 721 266	
17. Bali	907 808 176	869 956 280	735 861 830	1 086 822 900	
18. Nusa Tenggara Barat	543 439 395	677 203 973	698 115 076	932 201 263	
19. Nusa Tenggara Timur	473 545 067	586 930 890	605 697 383	922 140 942	
20. Kalimantan Barat	946 938 051	990 530 746	1 008 338 792	1 292 472 348	
21. Kalimantan Tengah	864 992 982	735 098 575	593 559 204	814 120 354	
22. Kalimantan Selatan	1 267 486 876	1 280 154 128	1 410 377 265	1 381 537 514	
23. Kalimantan Timur	2 154 573 721	2 025 501 327	1 543 518 536	1 670 776 456	
24. Kalimantan Utara	240 588 072	423 849 113	650 482 864	713 272 455	
25. Sulawesi Utara	546 671 365	503 691 768	568 608 677	725 701 873	
26. Sulawesi Tengah	853 319 017	840 745 925	1 008 212 400	738 129 641	
27. Sulawesi Selatan	1 309 032 668	1 313 862 831	1 239 919 516	1 294 939 515	
28. Sulawesi Tenggara	362 977 173	374 401 879	384 020 428	321 137 529	
29. Gorontalo	378 661 812	391 533 251	469 950 841	444 029 324	
30. Sulawesi Barat	452 797 262	450 252 488	434 079 839	468 946 802	
31. Maluku	495 328 479	662 106 967	739 813 193	667 961 757	
32. Maluku Utara	415 479 700	523 567 485	553 569 062	691 392 534	
33. Papua Barat	1 224 141 281	1 565 161 033	1 588 593 202	1 853 744 620	
34. Papua	1 998 521 178	2 360 218 215	2 459 956 541	3 202 596 186	
JUMLAH/TOTAL	51 521 457 321	52 297 824 333	54 033 172 998	68 003 215 757	

*) Data APBD

REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.B.3 (ribu rupiah), 2014-2017
TABLE 5.B.3 ACTUAL CAPITAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	2 397 502 366	2 025 103 489	2 284 852 301	2 529 205 112	
2. Sumatera Utara	1 145 972 228	932 244 349	1 019 855 143	2 097 169 186	
3. Sumatera Barat	785 887 924	788 149 955	989 929 772	950 436 027	
4. Riau	623 644 302	2 014 487 685	2 035 635 834	2 545 984 515	
5. Jambi	818 059 264	791 302 089	945 539 007	1 011 118 961	
6. Sumatera Selatan	731 611 689	1 041 021 931	607 740 927	1 923 083 109	
7. Bengkulu	305 053 538	479 181 286	385 967 859	1 010 591 426	
8. Lampung	925 454 683	868 999 195	1 005 779 805	1 132 527 818	
9. Bangka Belitung	305 553 488	233 717 853	229 776 982	448 618 182	
10. Kepulauan Riau	717 994 481	341 284 895	287 515 440	573 943 372	
11. DKI Jakarta	10 411 118 390	10 244 016 709	8 965 470 015	15 881 105 921	
12. Jawa Barat	1 359 802 615	2 298 676 125	2 859 355 624	2 291 591 434	
13. Jawa Tengah	1 570 679 411	2 514 681 555	2 815 678 179	1 850 318 118	
14. DI Yogyakarta	442 446 474	627 602 186	836 873 712	1 040 563 177	
15. Jawa Timur	1 207 456 621	2 258 320 072	2 150 594 111	2 639 437 687	
16. Banten	691 484 393	1 435 969 707	1 334 133 583	1 515 648 566	
17. Bali	370 585 308	562 235 633	730 924 238	706 058 700	
18. Nusa Tenggara Barat	422 797 430	834 584 079	696 681 646	950 584 631	
19. Nusa Tenggara Timur	407 600 789	606 702 215	602 299 046	582 791 379	
20. Kalimantan Barat	490 219 405	368 542 207	474 804 656	938 632 098	
21. Kalimantan Tengah	814 507 824	959 141 543	783 864 793	585 104 199	
22. Kalimantan Selatan	1 266 883 988	1 221 732 391	1 348 396 270	1 212 684 169	
23. Kalimantan Timur	2 211 317 315	2 010 917 819	1 571 814 627	925 853 954	
24. Kalimantan Utara	224 639 158	668 609 685	797 282 256	735 505 120	
25. Sulawesi Utara	506 723 318	757 277 045	745 899 590	697 064 710	
26. Sulawesi Tengah	276 831 808	442 524 325	503 973 010	479 617 819	
27. Sulawesi Selatan	676 237 209	849 305 058	856 863 744	1 059 508 067	
28. Sulawesi Tenggara	553 493 130	683 508 525	751 917 123	774 553 129	
29. Gorontalo	232 424 743	344 244 075	296 922 958	290 272 140	
30. Sulawesi Barat	267 018 262	445 228 018	498 735 453	540 094 349	
31. Maluku	369 329 906	542 785 444	832 064 350	583 835 640	
32. Maluku Utara	427 964 703	423 492 341	592 691 071	689 577 437	
33. Papua Barat	1 191 788 082	1 677 004 074	1 446 543 652	1 040 173 111	
34. Papua	1 689 302 792	2 865 461 762	2 490 333 442	3 530 217 100	
JUMLAH/TOTAL	36 839 387 037	45 158 055 320	44 776 710 219	55 763 470 363	

*) Data APBD

REALISASI BELANJA PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
TABEL 5.C (ribu rupiah), 2014-2017
ACTUAL FINANCING EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2014-2017

No.	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	959 801 070	461 684 483	533 527 331	0	
2. Sumatera Utara	14 897 905	536 489 675	1 500 470 856	78 000 000	
3. Sumatera Barat	392 442 367	304 096 991	372 134 278	20 000 000	
4. Riau	3 981 422 303	3 131 883 625	1 343 194 800	0	
5. Jambi	474 526 425	178 679 152	87 399 833	0	
6. Sumatera Selatan	476 814 225	840 195 373	1 665 069 212	1 669 138 533	
7. Bengkulu	261 693 705	153 858 701	461 960 120	18 000 000	
8. Lampung	113 486 180	117 581 142	214 312 510	5 000 000	
9. Bangka Belitung	325 473 641	342 693 794	217 692 026	5 000 000	
10. Kepulauan Riau	145 250 971	44 384 283	70 496 323	0	
11. DKI Jakarta	13 618 631 039	10 387 697 130	12 263 648 025	6 579 654 898	
12. Jawa Barat	5 099 436 397	4 144 246 614	3 722 497 854	311 875 000	
13. Jawa Tengah	1 760 833 255	696 830 292	696 122 876	304 000 000	
14. DI Yogyakarta	548 330 738	414 682 428	422 109 707	4 000 000	
15. Jawa Timur	2 612 951 724	1 732 342 039	2 667 282 490	408 333 333	
16. Banten	1 946 082 208	1 152 074 818	860 656 872	0	
17. Bali	1 125 742 772	874 677 370	502 761 595	73 458 345	
18. Nusa Tenggara Barat	189 155 598	282 429 796	384 357 653	86 540 640	
19. Nusa Tenggara Timur	329 644 828	241 732 624	337 848 419	182 500 000	
20. Kalimantan Barat	194 600 710	84 111 430	182 898 714	115 000 000	
21. Kalimantan Tengah	280 614 254	64 495 161	413 148 642	164 990 000	
22. Kalimantan Selatan	738 732 079	397 409 121	421 974 701	31 500 000	
23. Kalimantan Timur	1 061 628 546	777 324 517	611 166 600	0	
24. Kalimantan Utara	1 184 448 975	735 234 473	511 687 505	150 000 000	
25. Sulawesi Utara	340 708 660	125 583 942	184 624 657	30 000 000	
26. Sulawesi Tengah	142 474 915	84 136 672	75 015 110	47 200 000	
27. Sulawesi Selatan	242 455 881	265 955 474	361 565 497	136 000 000	
28. Sulawesi Tenggara	431 964 051	537 415 421	596 446 423	109 415 740	
29. Gorontalo	97 002 816	68 395 981	56 808 846	2 576 400	
30. Sulawesi Barat	142 074 163	87 907 830	48 467 708	8 000 000	
31. Maluku	186 416 361	24 445 099	32 735 885	2 735 885	
32. Maluku Utara	51 153 914	47 370 415	37 265 551	335 010 021	
33. Papua Barat	1 667 907 507	626 103 896	792 391 022	55 000 000	
34. Papua	1 239 234 968	590 184 665	1 102 841 236	75 000 000	
JUMLAH/TOTAL	42 378 035 151	30 554 334 427	33 752 580 877	11 007 928 795	

*) Data APBD

STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI 2014-2017

Anggota Tim Penyusun:

Koordinator : Dr. Titi Kanti Lestari, SE, M.Com.

Editor : Ir. Dody Rudyanto, MM.
Maskurdin, S.ST.

Penulis : Izzun Nafiah, SST

Pengolah Data : Desy Apresziyanti, SST

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://www.bps.go.id



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id



9 770126 790000